

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Volume 1, Nomor 1, Desember 2024

- 1. Membangun Kesejahteraan Kabupaten Blitar Melalui Layanan Publik Ramah Disabilitas**
Kezia Marieca Kristanto
- 2. Strategi Pengembangan Perkotaan Kademangan Sebagai Pusat Agropolitan**
Kevie Desderius, Degihon Daud Martua Hutabarat,
Gloria Aprillianti Suryaretnaningtyas
- 3. Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur**
Hasti Aringga Suminar, Nana Fadjar Prijantoro, Aris Purwowidi Yanto
- 4. Si Delman: Solusi Digital untuk Pelayanan Publik yang Efisien di Desa Suwarno**
- 5. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Air Sendang Bulus Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**
Rony Pujo Santoso, Bambang Triono, Yusuf Adam Hilman,
Irvan Nur Ridho
- 6. Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar**
Yuni Purwita Sari

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

VOLUME 1, NOMOR 1, DESEMBER 2024

Penanggung Jawab

Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto, M.E.
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Ketua Editor (*Editor-in-Chief*)

Arisanti, S.S.T.P., M.M.
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Dewan Editor (*Editorial Board*)

Ir. Tri Kurniastuti, M.M.A.
Universitas Islam Balitar Blitar

Myro Boyke Persijn, S.Sos., M.M.
Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya

Lilla Erayunia Pramusinta, S.S., M.A.P.
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Fera Tara Batari, S.I.Kom.
*Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Blitar*

Harry Bali Kusuma, S.Kom.
*Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Blitar*

Associate Editor

Yuni Purwita Sari, S.T., M.A.P.
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Mitra Bestari (*Peer-Reviewers*)

Mayuko Galuh Mahardika, S.I.P., M.I.P.
*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya*

Istifada Alhidayatuss Sibyan, S.T., M.T.
Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

Ratnaningsih Damayanti, S.I.P., M.Ec.Dev.
*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya*

Myro Boyke Persijn, S.Sos., M.M.
Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya

Suci Emilia Fitri, M.P.A.
*Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri
Badan Riset dan Inovasi Nasional*

Sekretariat

Agus Sugeng Jaka S., S.Sos., M.M.
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Yusti Andiari. S.Si.
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

Sigit Ardianto
*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Blitar*

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

VOLUME 1, NOMOR 1, DESEMBER 2024

DAFTAR ISI

- 1-10 **Membangun Kesejahteraan Kabupaten Blitar Melalui Layanan Publik Ramah Disabilitas**
Kezia Marieca Kristanto
- 11-23 **Strategi Pengembangan Perkotaan Kademangan Sebagai Pusat Agropolitan**
*Kevie Desderius, Degihon Daud Martua Hutabarat, Gloria Aprillianti
Suryaretnaningtyas*
- 24-33 **Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur**
Hasti Aringga Suminar, Nana Fadjar Prijantoro, Aris Purwowidi Yanto
- 34-40 **Si Delman: Solusi Digital untuk Pelayanan Publik yang Efisien di Desa**
Suwarno
- 41-55 **Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Air Sendang Bulus Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo**
Rony Pujo Santoso, Bambang Triono, Yusuf Adam Hilman, Irvan Nur Ridho
- 56-66 **Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar**
Yuni Purwita Sari



Tersedia secara online pada
<https://jurnalpradah.com/>



Membangun Kesejahteraan Kabupaten Blitar Melalui Layanan Publik Ramah Disabilitas

Kezia Marieca Kristanto¹

Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia¹

keziamarieca@student.ub.ac.id

Abstract

In the development of a region, the welfare of the community is the primary priority. The focus on inclusive public services for people with disabilities has become a crucial agenda in efforts to achieve inclusive welfare in Blitar Regency. The aim of this research is to understand how the implementation of disability-friendly public services can strengthen the efforts of welfare development in the Blitar Regency. This research employs a qualitative approach by combining a review of academic literature related to inclusive public services and in-depth interviews with relevant stakeholders. Through the analysis of academic literature, inclusive welfare development requires a comprehensive approach that considers the needs and rights of people with disabilities. This study indicates that understanding the importance of integrating disabilities into the planning and implementation of public services is a crucial initial step in ensuring equitable welfare in the community. The results of interviews with providers of public services indicate that there are still several obstacles hindering the implementation of disability-friendly public services in Blitar Regency. Some of these include a lack of understanding, unfriendly facilities, and the absence of regulations that serve as guidelines for the implementation of public services for people with disabilities. In this research, the government, the community, and the disability community must collaborate to design and implement policies that ensure inclusive public services. By implementing policies that strengthen the protection and participation of people with disabilities, significant changes are expected in the development of inclusive welfare in the Blitar Regency.

Keywords: Blitar Regency; Development; Welfare; Public Services; Disability

Abstrak

Dalam pembangunan suatu daerah, kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama. Fokus pada pelayanan publik yang inklusif bagi masyarakat penyandang disabilitas telah menjadi agenda penting dalam upaya mencapai kesejahteraan inklusif di Kabupaten Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan layanan publik yang ramah terhadap disabilitas dapat memperkuat upaya pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan tinjauan literatur akademis yang terkait dengan layanan publik inklusif dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait. Melalui analisis literatur akademis, pembangunan kesejahteraan yang inklusif membutuhkan pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan kebutuhan dan hak orang dengan disabilitas. Studi ini menunjukkan bahwa memahami betapa pentingnya memasukkan disabilitas ke dalam perencanaan dan

pelaksanaan layanan publik adalah langkah awal yang penting untuk menjamin kesejahteraan yang merata di masyarakat. Hasil wawancara dengan penyelenggara pelayanan publik menunjukkan bahwa masih ada beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaan layanan publik yang ramah disabilitas di Kabupaten Blitar. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman, fasilitas yang tidak ramah, dan belum tersedianya regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, pemerintah, masyarakat, dan komunitas disabilitas harus bekerja sama untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang memastikan pelayanan publik yang inklusif. Dengan menerapkan kebijakan yang memperkuat perlindungan dan partisipasi masyarakat disabilitas, diharapkan akan terjadi perubahan besar dalam pembangunan kesejahteraan yang inklusif di Kabupaten Blitar.

Kata Kunci: Kabupaten Blitar; Pembangunan; Kesejahteraan; Pelayanan Publik; Disabilitas

PENDAHULUAN

Kabupaten Blitar merupakan sebuah daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan saat ini menjadi fokus perhatian dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah mengutamakan pembangunan ini, mencakup upaya peningkatan di berbagai bidang, termasuk infrastruktur jaringan jalan, transportasi, dan pengembangan industri. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini menciptakan peluang baru bagi masyarakat Kabupaten Blitar, memungkinkan mereka berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan daerah.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memperbaiki pelayanan publik. Peningkatan ini adalah komponen penting dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk menyediakan pelayanan publik yang baik dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana. Penting untuk memastikan bahwa semua pelayanan publik bersifat inklusif dan ramah terhadap masyarakat, terutama penyandang disabilitas. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya menghadirkan lingkungan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Mereka memiliki langkah-langkah yang tepat untuk menyediakan pelayanan publik yang mendukung inklusivitas, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dan Kabupaten Blitar dapat menjadi daerah yang ramah disabilitas.

Dalam tulisan ini, penulis mengajak pembaca untuk menganalisis berbagai hal terkait Kabupaten Blitar sebagai daerah layanan publik ramah disabilitas. Tulisan ini akan mengupas informasi umum mengenai kabupaten ini dan menyoroti fokus pembangunan daerah, khususnya di bidang pelayanan publik yang ramah disabilitas, untuk mengevaluasi apakah pembangunan tersebut telah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan kontekstual topik yang sedang dibahas dalam jurnal ini. Penulis memilih pendekatan ini karena lebih memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap berbagai aspek subjek penelitian, terutama yang melibatkan pengalaman, pandangan, dan persepsi individu secara kompleks dan saling berkaitan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur merupakan langkah awal yang diambil untuk mengeksplorasi berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur yang digunakan mencakup buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, serta sumber informasi lainnya yang berhubungan langsung dengan topik yang dibahas. Analisis literatur ini akan membantu peneliti dalam memahami kerangka konseptual dan konteks yang berkaitan dengan topik penelitian, serta mengidentifikasi celah pengetahuan yang mungkin belum terungkap dalam literatur yang ada.

Setelah studi literatur, tahap berikutnya adalah wawancara mendalam. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan wawasan lebih lanjut dari individu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang terlibat berasal dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan yang telah disusun secara sistematis, yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait aspek penting dalam topik penelitian. Proses wawancara dilaksanakan secara online melalui platform Zoom Meeting serta secara tatap muka, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan penelitian.

Selama wawancara, peneliti mencatat secara rinci tanggapan dan informasi yang diberikan oleh informan. Hasil wawancara mendalam ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih detail terkait pandangan dan pengalaman informan yang berhubungan langsung dengan fenomena yang dibahas. Selain itu, wawancara juga berpotensi membuka peluang untuk menemukan informasi tambahan yang mungkin tidak tercantum dalam literatur yang telah diteliti sebelumnya. Dengan demikian, kedua metode pengumpulan data ini yang berupa studi literatur dan wawancara mendalam dapat berfungsi saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih holistik terkait topik penelitian yang diangkat dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang mana menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam sejarah, budaya dan potensi yang sangat menjamin pembangunan Kabupaten Blitar mengalami peningkatan ke arah yang luar biasa. Sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang mengalami perkembangan yang signifikan, Kabupaten Blitar telah memiliki fokus utama dalam lingkup pembangunan daerah. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan gambaran tentang Kabupaten Blitar sebagai lokasi pembangunan daerah yang tentunya menarik perhatian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sejarah dan Warisan Budaya

Kabupaten Blitar memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang sangat menarik untuk diperhatikan. Apalagi Kabupaten Blitar ini menjadi tempat kelahiran seorang Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia yaitu Ir. Soekarno yang akhirnya berkembang menjadi warisan budaya dan sejarah yang dapat diwujudkan melalui hadirnya Museum dan Makam Bung Karno yang saat ini sudah menjadi wisata yang wajib untuk dikunjungi.

2. Potensi Pertanian

Kabupaten Blitar terkenal sebagai salah satu daerah yang menjadi pusat pertanian di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blitar memiliki tanah yang subur dan iklim yang mendukung sehingga beberapa jenis tanaman mudah untuk diproduksi di daerah ini. Contoh tanaman yang mudah untuk diproduksi di Kabupaten Blitar adalah kopi, padi dan tembakau yang mana ini sangat berperan besar terhadap perekonomian daerah Kabupaten Blitar.

3. Pariwisata

Kabupaten Blitar juga memiliki potensi di bidang pariwisata yang tentu saja menarik untuk dilihat. Daerah ini memiliki keindahan alam yang tak kalah dengan daerah - daerah lainnya. Pariwisata yang terkenal di Kabupaten Blitar ini adalah Pantai Serang dan Gunung Kelud dan Pantai Serang yang nantinya ini membuka sebuah peluang untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah Kabupaten Blitar.

4. Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Blitar telah berkomitmen penuh untuk terus melakukan pengembangan terhadap infrastruktur dasar, seperti sarana transportasi hingga kondisi jalan raya yang mana hal ini dilakukan untuk memberikan fasilitas yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan kemudahan aksesibilitas masyarakat Kabupaten Blitar.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu sasaran utama dari hadirnya suatu pembangunan daerah pasti berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Blitar terus bekerja dengan giat untuk menjamin bahwa setiap program yang ada baik bidang pendidikan, kesehatan hingga sosial tersedia dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Kesejahteraan masyarakat ini dapat diimplementasikan melalui pembangunan pelayanan publik. Tidak akan pernah terlepas dari semua masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam kehidupan manusia. Dimulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan, serta administrasi terkait lainnya. Hal ini telah disesuaikan dengan UUD 1945, yang menetapkan bahwa negara harus dapat memenuhi semua kebutuhan dasar semua warganya.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang ada dalam satu rangkaian pemenuhan kebutuhan pelayanan terhadap barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh lembaga pelayanan publik. Kegiatan pelayanan publik ini telah diatur seluruh urusan pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan menyelesaikan semua kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Ada empat tujuan di balik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

1. Memberikan batas-batas yang jelas dan hubungan antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Menciptakan pelayanan publik yang baik yang berbasis korporasi dan pemerintahan;
3. Menciptakan pelayanan publik yang memadai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan perlindungan hukum dan keyakinan kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik.

Standar pelayanan adalah standar yang digunakan untuk mengatur dan menilai kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat untuk memberikan layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Setiap penyelenggara layanan, termasuk penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN, dan penyelenggara swasta, diwajibkan untuk menyediakan layanan terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kualitas pelayanan publik yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Di Indonesia terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan publik yang ramah terhadap disabilitas. Ini penting untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama dan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama.

Kesejahteraan masyarakat harus dirasakan secara merata ke seluruh sektor masyarakat. Salah satu sektor masyarakat yang perlu diperhatikan kesejahteraannya adalah masyarakat penyandang disabilitas. Indikator yang terutama dalam suatu inklusi sosial yang berhasil adalah masyarakat penyandang disabilitas merasakan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Hal ini tentu saja melibatkan berbagai aspek seperti pekerjaan, kesehatan, partisipasi dan pendidikan yang hadir dalam kehidupan sosial. Sangat diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menjamin masyarakat disabilitas ini sudah menerima akses yang sama terhadap setiap peluang dan layanan publik.

Dalam pemahaman dan perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar yang inklusif dibutuhkan kunci penting yang bisa ditemukan dalam statistik jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Blitar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar, pada tahun 2023 terdapat sejumlah 4.673 jiwa penyandang disabilitas yang beragam yang ada di Kabupaten Blitar (BPS, 2023). Data ini memberikan suatu bayangan awal mengenai urgensinya memberikan perhatian terhadap kebutuhan mereka dalam berbagai hal dalam kehidupan ini. Namun perlu diingat bahwa data ini merupakan data yang cukup lama dan saat ini peneliti masih belum bisa menemukan data terbaru mengenai statistik jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang umum untuk dihadapi dalam pengumpulan data mengenai populasi disabilitas. Meskipun demikian, data ini tetap memberikan informasi yang kuat bahwa Kabupaten Blitar memiliki jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang signifikan.

Selain data mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Blitar, sangat penting juga informasi yang didapat secara langsung dari masyarakat penyandang disabilitas ini mengenai kendala apa saja yang mereka hadapi dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Informasi ini yang nantinya akan sangat berguna untuk Pemerintah agar bisa terus meningkatkan pelayanan publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata.

Adapun beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. **Aksesibilitas Fisik yang Terbatas**
Aksesibilitas fisik yang mengalami keterbatasan ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan dan fasilitas pelayanan publik yang tidak dikonsep dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. Hal yang biasa ditemukan biasanya seperti kondisi toilet yang tidak sesuai, lokasi tangga yang curam, dan sulitnya akses bagi masyarakat disabilitas yang menggunakan alat bantu seperti kursi roda ataupun alat lainnya sehingga ini sangat menghalangi mereka untuk bisa menerima dan merasakan pelayanan publik yang telah ada.
2. **Keterbatasan Akses Informasi**
Dalam kehidupan yang serba modern ini, sangat penting sebuah informasi mendapatkan kemudahan untuk diakses oleh masyarakat. Namun realitanya seringkali berbeda dengan apa yang dibayangkan khususnya terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Masyarakat disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses baik informasi yang terdapat di *website* maupun informasi fisik yang tidak disesuaikan dengan format yang dibutuhkan oleh masyarakat penyandang disabilitas

3. Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan

Saat ini masyarakat dinilai masih kurang memahami dan sadar akan kondisi masyarakat penyandang disabilitas di sekitar mereka. Sehingga hal ini menyebabkan bermunculannya perilaku beberapa masyarakat yang diskriminatif ataupun kurang memberikan *support* kepada masyarakat dengan penyandang disabilitas. Hal ini bisa menjadi hambatan yang mungkin kasat mata namun sangat berdampak cukup kuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Mungkin beberapa penyedia layanan publik masih belum mengerti mengenai tata cara untuk berinteraksi dengan masyarakat penyandang disabilitas yang baik dan benar atau bahkan mereka masih belum paham sama sekali mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat penyandang disabilitas.

Data ini sangat penting untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih baik dalam membantu masyarakat disabilitas. Dengan data yang akurat dan terkini, pemerintah dan organisasi terkait dapat menilai aksesibilitas, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja untuk penyandang disabilitas. Pemahaman yang lebih baik tentang jenis dan jumlah disabilitas yang ada memungkinkan pengambilan tindakan yang lebih sesuai dan inklusif. Pastinya, untuk meningkatkan inklusi sosial, Kabupaten Blitar harus terus meningkatkan teknik pengumpulan data disabilitas. Ini dapat termasuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap masalah disabilitas dan melakukan survei atau sensus lebih lanjut.

Kualitas pelayanan publik yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Di Indonesia terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan publik yang ramah terhadap disabilitas. Ini penting untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama dan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama.

Tujuan standar pelayanan publik yang ramah disabilitas adalah untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi akses dan memastikan bahwa individu dengan disabilitas menerima pelayanan yang setara dan bermartabat. Pelaksanaan standar ini akan membantu membangun masyarakat yang inklusif di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pelayanan publik yang mereka butuhkan. Berikut adalah beberapa contoh standar pelayanan publik yang ramah disabilitas:

1. Aksesibilitas fisik: Organisasi dan lembaga pemerintah harus menyediakan fasilitas fisik yang ramah disabilitas. Ini termasuk akses tanpa hambatan, seperti lift, area parkir khusus, tangga dan ram yang dapat diakses, dan toilet yang sesuai dengan kebutuhan orang dengan disabilitas.
2. Aksesibilitas komunikasi: Individu dengan berbagai jenis disabilitas harus dapat berkomunikasi dengan pelayanan publik. Misalnya, memberikan informasi tertulis dalam bentuk Braille atau besar, menggunakan penerjemah bahasa isyarat, atau menggunakan metode komunikasi alternatif seperti berbicara melalui teks.
3. Pengaturan prioritas: Lembaga pemerintah dan penyelenggara layanan publik harus menetapkan prioritas untuk memenuhi kebutuhan individu dengan disabilitas dalam situasi pelayanan yang padat. Ini dapat mencakup waktu tunggu yang lebih singkat, akses prioritas, atau fasilitas khusus untuk memudahkan layanan.

Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan dua instansi yang menjadi fokus utama dalam analisis pelayanan publik yang ramah terhadap disabilitas. Kedua instansi tersebut adalah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Peneliti telah merumuskan sejumlah pertanyaan yang relevan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kedua instansi ini dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang inklusif bagi individu dengan disabilitas.

Untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan data-data yang relevan dengan topik penelitian, peneliti telah melakukan wawancara dengan dua narasumber kunci dari RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, serta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Wawancara ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik-praktik pelayanan publik yang ramah disabilitas yang telah diterapkan oleh kedua instansi ini, serta kendala-kendala yang mungkin mereka hadapi dalam prosesnya. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh warga, termasuk individu dengan disabilitas.

A. Pelayanan Publik Ramah Disabilitas pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah berusaha menciptakan pelayanan publik yang ramah untuk masyarakat disabilitas di Kabupaten Blitar. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah memiliki layanan atau fasilitas khusus yang dirancang dan disesuaikan untuk membantu individu dengan disabilitas ini mudah untuk mengakses layanan publik yang ada di instansi ini. Instansi ini telah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas dari masyarakat disabilitas. Sarana dan prasarana yang ada di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan telah disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas terdiri atas parkir khusus disabilitas dan loket prioritas bagi disabilitas yang tentunya telah disertai dengan mesin nomor antrian yang memudahkan masyarakat disabilitas untuk registrasi. Selain itu, instansi ini juga telah menyediakan ruang tunggu prioritas, toilet khusus disabilitas, loket pengambilan obat yang telah dikhususkan untuk masyarakat disabilitas hingga disediakan lift khusus yang telah dilengkapi handrail dan informasi mengenai layanan publik dalam konsep huruf braille.

Dalam upaya menyediakan pelayanan publik yang ramah disabilitas, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi juga telah memastikan bahwa semua layanan publik yang disediakan dapat diakses dengan mudah oleh individu dengan berbagai jenis disabilitas. Instansi ini telah menyediakan tenaga kerja yang telah di edukasi mengenai pelayanan publik bagi masyarakat disabilitas sehingga mereka dapat mengerti dan membantu masyarakat disabilitas dalam mengakses semua pelayanan publik yang ada di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Tentu dalam memberikan pelayanan publik pasti ada suatu peraturan atau pedoman dari instansi tersebut yang menjadi landasan agar pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan standar yang ada. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sudah memiliki Standar Operasional Prosedur atau SOP yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik secara umum, namun untuk SOP yang lebih spesifik terhadap pelayanan publik yang diarahkan kepada masyarakat disabilitas belum tersedia. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi juga melakukan promosi untuk mengenalkan pelayanan publik prioritas melalui sosial media, baik sosial media resmi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi maupun sosial media para pegawai.

Selain SOP mengenai penyediaan pelayanan publik, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi juga memiliki prosedur lainnya yang berkaitan dengan individu penyandang disabilitas untuk memberikan masukan atau komplain terkait pelayanan yang mereka terima. Terdapat 2 sistem kritik dan saran yang tersedia, yaitu via elektronik dan non elektronik. Untuk sistem elektronik, masyarakat penyandang disabilitas dapat mengirimkan kritik dan saran melalui aplikasi yang telah dibuat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur maupun melalui nomor pengaduan yang telah disiapkan. Sedangkan untuk sistem non elektronik, masyarakat dapat menyampaikan kritik dan sarannya melalui form yang telah disediakan pada bagian lobby instansi. Apabila masyarakat penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengisi form, pihak rumah sakit telah menyediakan pendamping khusus yang siap sedia membantu mengatasi kesulitan tersebut. Di dalam form maupun aplikasi tersebut, pihak rumah sakit ini telah menyediakan kolom khusus untuk pertanyaan terbuka yang mana masyarakat bisa mengisinya sesuai dengan kondisi maupun kesulitan yang dialami.

Berkenaan dengan keberhasilan pelayanan publik yang ramah disabilitas, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah melakukan survei kepuasan masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan rumah sakit dalam menyediakan pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Survei Kepuasan Masyarakat ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 14 Tahun 2017, di mana ada 9 unsur yang perlu ada dalam survei kepuasan masyarakat. Salah satu unsur yang sangat berkaitan dengan pelayanan publik ada pada bagian sarana prasarana, khususnya fasilitas fisik yang berkaitan secara langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas. Terakhir, pihak rumah sakit telah memiliki kelompok staf khusus yang akan berfokus terhadap pelayanan publik yang ramah disabilitas untuk membantu penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik yang ada. Staf khusus ini selalu standby di bagian lobby agar memudahkan pihak rumah sakit membantu masyarakat prioritas ini. Apabila kondisi rumah sakit sedang mengalami peningkatan pasien yang cukup besar, maka masyarakat bisa langsung mengunjungi *customer service* untuk meminta layanan prioritas tersebut.

B. Pelayanan Publik Ramah Disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar telah memiliki layanan atau fasilitas khusus yang telah dirancang sedemikian rupa untuk membantu masyarakat dengan kebutuhan khusus termasuk disabilitas bisa untuk mengakses setiap pelayanan yang tersedia di instansi ini. Fasilitas yang telah disesuaikan dengan standar pelayanan publik bagi disabilitas yang terdapat di Dispendukcapil antara lain tersedianya alat kursi roda, loket tersendiri khusus untuk masyarakat prioritas, toilet khusus disabilitas, tersedianya medan jalan yang landai atau *ramp*, serta inovasi Si Jaran Ijo yang untuk memudahkan pelayanan

instansi ini terakses secara merata kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus seperti masyarakat disabilitas

Program Si Jaran Ijo atau Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujuk Omah merupakan suatu inovasi yang diciptakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Blitar pada tahun 2020, sebagai suatu inovasi yang memberikan kemudahan pelayanan administrasi mengenai kependudukan khususnya bagian perekaman e-KTP bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus atau rentan adminduk, yang salah satunya diperuntukan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Si Jaran Ijo hadir sebagai respon atas masalah banyaknya masyarakat Kabupaten Blitar yang belum memiliki e-KTP dikarenakan masih keterbatasan dalam mengakses layanan mengenai administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Blitar ini.

Sistem kerja dari Si Jaran Ijo ini dimulai dari desa. Masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang termasuk dalam kategori penduduk rentan disarankan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak Desa. Setelah menerima laporan dari masyarakat, Desa akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas registrasi untuk memeriksa data pemohon sebelum melakukan perekaman e-KTP. Dokumen persyaratan yang diperlukan dalam proses perekaman e-KTP adalah Kartu Keluarga (KK). Jika terjadi keadaan di mana pemohon belum memiliki Kartu Keluarga (KK), maka pemohon akan diminta untuk mengisi formulir F1.01. Kemudian, petugas registrasi akan memasukkan data pemohon ke dalam sistem untuk mendapatkan dokumen KK sebagai persyaratan yang diperlukan dalam proses perekaman e-KTP.

Jika syarat-syarat dari pemohon telah terpenuhi, Desa akan mengirimkan surat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penjadwalan tim pelayanan Si Jaran Ijo di wilayah Desa tersebut. Setelah surat pengajuan dikirimkan oleh pihak Desa, masyarakat harus menunggu sekitar satu hingga dua minggu untuk menerima layanan Si Jaran Ijo, yang tergantung pada jumlah surat pengajuan yang diterima oleh Dispendukcapil. Setelah data e-KTP tercatat, pemohon harus menunggu selama satu minggu untuk mendapatkan e-KTP-nya, yang dapat diambil langsung di Kantor Desa masing-masing.

Dispendukcapil Kabupaten Blitar memastikan bahwa seluruh layanan publik yang tersedia bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dengan berbagai jenis disabilitas yang ada. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana mereka telah berusaha melakukan komunikasi kepada masyarakat penyandang disabilitas mengenai layanan publik yang telah disediakan.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kabupaten Blitar dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat mengenai pelayanan yang ramah disabilitas ini. Pertama, Dispendukcapil memberikan surat tugas kepada Kepala Desa sebagai Kepala Registrasi. Hal ini dilakukan untuk berkoordinasi dengan Desa agar apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus bisa langsung direspon dengan cepat oleh pihak Dispendukcapil. Kedua, Dispendukcapil melakukan komunikasi melalui website resmi mereka. Masyarakat bisa mengakses website resmi dari Dispendukcapil Kabupaten Blitar melalui <https://dispendukcapil.blitarkab.go.id/>. Dalam website tersebut, segala informasi mengenai pelayanan publik yang disediakan oleh Dispendukcapil telah dijelaskan secara lengkap. Ketiga, Dispendukcapil melakukan melalui sosialisasi dan promosi baik melalui sosialisasi tatap muka maupun melalui media massa. Dispendukcapil Kabupaten Blitar telah bekerjasama dengan LPPL Persada FM untuk mempromosikan setiap layanan publik yang ada agar informasi mudah tersampaikan kepada masyarakat. Dispendukcapil secara aktif menyebarkan informasi tentang manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh Inovasi Si Jaran Ijo, sehingga warga dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan lebih efisien dan cepat. Melalui sosialisasi ini, Dispendukcapil juga menunjukkan betapa pentingnya memiliki fasilitas yang ramah disabilitas di kantor pelayanan mereka untuk membuat masyarakat dengan kebutuhan khusus lebih inklusif.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik pasti sangat diperlukan adanya suatu peraturan atau kebijakan untuk mengatur pelayanan tersebut. Dispendukcapil telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang mereka sediakan. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih khusus dan terfokus pada pelayanan publik yang dapat memenuhi standar dan kebutuhan masyarakat disabilitas. Meski demikian, langkah positif telah diambil dengan memberikan materi pelatihan kepada seluruh pegawai Dispendukcapil tentang cara memberikan pelayanan khusus kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat disabilitas. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.

Berkaitan dengan pengukuran keberhasilan terhadap pelayanan publik, Dispendukcapil Kabupaten Blitar telah memiliki survei kepuasan masyarakat baik melalui aplikasi maupun form yang sudah disiapkan. Selain itu, terdapat survei secara langsung yang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk

mendapatkan sampling yang tepat sehingga data yang didapatkan nanti bisa meningkatkan kinerja dari pelayanan publik ini.

Selanjutnya mengenai kelompok staf khusus untuk mengatur/membantu individu dengan disabilitas dalam mengakses pelayanan publik, Dispendukcapil Kabupaten Blitar belum memilikinya. Namun, Dispendukcapil telah melakukan briefing kepada seluruh pegawai yang ada untuk mengerti dan bisa memberikan pelayanan yang tepat untuk masyarakat prioritas termasuk masyarakat disabilitas.

Dari kedua instansi di atas, sebenarnya kedua instansi ini sudah baik dalam hal membangun pelayanan publik yang ramah disabilitas. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah memperhatikan kebutuhan masyarakat disabilitas dengan mengupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan aksesibilitas, seperti fasilitas khusus, pelatihan staf, dan mekanisme pengaduan yang inklusif. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar. Program Si Jaran Ijo yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar dianggap sebagai langkah besar yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan bagi individu dengan kebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas.

Namun, peneliti menekankan beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. SOP yang lebih spesifik dan fokus pada layanan publik untuk masyarakat disabilitas diperlukan. Sejauh ini, kebijakan dan inisiatif yang ada tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat disabilitas, dan kebutuhan akan tenaga kerja khusus yang terlatih belum sepenuhnya dipenuhi.

Terlepas dari fakta bahwa survei tentang kepuasan masyarakat telah dilakukan, tampaknya tidak ada rincian tentang tindakan khusus yang telah diambil berdasarkan temuan survei tersebut. Selain itu, informasi tentang evaluasi atau pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas layanan yang diberikan juga tidak diberikan dengan jelas, yang menimbulkan keraguan tentang keberlanjutan dan efektivitas upaya yang dibuat. Singkatnya, meskipun upaya untuk menyediakan layanan yang inklusif sudah ada, untuk menjamin keberlanjutan dan keefektifan inisiatif ini, diperlukan perhatian yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa layanan ini memberikan kualitas terbaik bagi masyarakat disabilitas.

Dalam literatur lain yang penulis baca, ada salah satu contoh instansi yang telah memiliki pelayanan yang ramah disabilitas yang mana telah disesuaikan dengan peraturan - peraturan khusus untuk melayani masyarakat disabilitas. Instansi tersebut ialah Pengadilan Negeri Stabat. Pengadilan Negeri Stabat adalah sebuah pengadilan yang berada di Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pengadilan Negeri Stabat merupakan bagian dari pengadilan di Indonesia yang berada di tingkat pertama dari peradilan umum. Pengadilan Negeri ini berperan dalam menangani berbagai perkara hukum yang masuk di wilayah hukumnya, seperti perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Sebagai salah satu bagian dari pelayanan publik, tentu saja Pengadilan Negeri Stabat ini telah menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk menggunakan layanan ini termasuk fasilitas khusus untuk masyarakat penyandang disabilitas. Fasilitas khusus masyarakat disabilitas yang tersedia di Pengadilan Negeri Stabat ini antara lain alat kursi roda, kursi tunggu untuk prioritas, tempat parkir khusus, jalur khusus disabilitas, toilet khusus disabilitas, dan *website* yang akan memudahkan masyarakat disabilitas mengakses informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Stabat ini. *Website* tersebut dapat diakses melalui <https://www.pn-stabat.go.id/>

Pengadilan Negeri Stabat telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas yang tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020. Pedoman ini diberikan secara langsung oleh pusat sehingga Pengadilan Negeri Stabat mengerti mengenai bagaimana pelayanan khusus yang harus diberikan kepada masyarakat penyandang disabilitas. Dalam pedoman tersebut, terdapat beberapa poin penting yang tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat penyandang disabilitas antara lain:

1. Fasilitas fisik yang memungkinkan akses ke gedung pengadilan, termasuk fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti akses untuk kursi roda, penyeimbang untuk kursi roda, dan fasilitas lift;
2. Penyediaan layanan dukungan bagi penyandang disabilitas, seperti penerjemah bahasa isyarat, peningkatan akses informasi melalui metode alternatif (misalnya Braille), dan dukungan lainnya;
3. Penyediaan prosedur yang memastikan partisipasi penuh dan setara bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, termasuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan;
4. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Dari beberapa poin penting di atas dapat kita lihat bersama bahwa adanya suatu kebijakan ataupun pedoman khusus mengenai pelayanan publik yang ramah disabilitas memiliki peran penting untuk kelancaran dan kemudahan akses pelayanan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap instansi pelayanan publik bisa menghadirkan fasilitas yang inklusif dan disertai dengan pedoman pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat disabilitas.

KESIMPULAN

Pembangunan layanan publik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha ini mencakup pengembangan daerah yang berkelanjutan dengan menyediakan layanan yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penyandang disabilitas, sehingga Kabupaten Blitar diharapkan menjadi daerah yang lebih bersahabat bagi mereka.

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas. Mereka telah menyediakan fasilitas khusus, memberikan pelatihan bagi staf, dan mengimplementasikan sistem pengaduan yang inklusif. Program Si Jaran Ijo dari Dispendukcapil dianggap sebagai langkah signifikan untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan bagi individu dengan kebutuhan khusus. Namun, masih terdapat tantangan seperti kurangnya tenaga terlatih, kebutuhan akan SOP yang lebih spesifik untuk layanan publik disabilitas, dan kurangnya tindakan berbasis survei kepuasan masyarakat. Selain itu, evaluasi dan pemantauan kualitas layanan perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.

Mengingat situasi ini, setiap lembaga yang bertanggung jawab atas layanan publik seharusnya berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar dapat memulai dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat disabilitas. Kerja sama yang baik dengan pemerintahan Kabupaten Blitar sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Diharapkan pemerintah Kabupaten Blitar akan mendukung dan memfasilitasi semua inisiatif layanan publik yang ramah disabilitas, sehingga Kabupaten Blitar menjadi tempat di mana setiap orang dapat menikmati layanan publik yang ada.

REFERENSI

1. Ariyanti, D., & Setyowati, L. (2020). Analisis Pelayanan Publik Ramah Disabilitas di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 24(1), 23-35.
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2023). <https://blitarkab.bps.go.id/>
3. Mayarni, Nur Laila Meilani, dan Zulkarnaini. (2018). Kualitas Pelayanan Publik bagi Kaum Difabel. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol 9(1): 11-1
4. Nugroho, H. A., & Asih, P. T. (2019). Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Ramah Disabilitas di Kantor Desa Sukarasa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 85-94.
5. Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2022). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Focus*, 4(2), 225. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
6. Pemerintahan Kabupaten Blitar. (2021). www.blitarkab.go.id/visi-dan-misi-kabupaten-blitar-2021-2024/
7. Pengadilan Negeri Stabat. (2022). Sarana & Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas. Pengadilan Negeri Stabat. <https://www.pn-stabat.go.id/publik/layanan-disabilitas/2022-02-16-08-38-09.html>
8. Prabandari, Y., & Prastiana, Y. (2018). Pelayanan Publik Ramah Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Pematang. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 7(2), 173-188.
9. Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 180-192.
10. Sari, N. R. D. I. (2022). Inovasi Pelayanan “Si Jaran Ijo” (Jemput Bola Rentan Adminkur Iso Jujuk Omah) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. *ejournal.unesa.ac.id*. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p909-922>

11. Wahyuni, A. D., & Listyandini, N. P. (2020). Analisis Pelayanan Publik Ramah Disabilitas di Kantor Kecamatan Margoyoso Kota Pati. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 49-60.
12. Wulandari, D., & Saefulhakim, A. (2021). Peningkatan Pelayanan Publik Ramah Disabilitas di Kelurahan Labuhan Deli, Medan. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 25(1), 1-15.



Tersedia secara online pada
<https://jurnalpradah.com/>



Strategi Pengembangan Perkotaan Kademangan Sebagai Pusat Agropolitan

Kevie Desderius¹, Degihon Daud Martua Hutabarat², Gloria Aprillianti
Suryaretnaningtyas³

Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Malang, Malang, Indonesia^{1,2,3}
desderiuskevie@gmail.com

Abstract

Agriculture serves as the main commodity developed to support the economy in agrarian countries. In the context of regional development in an agrarian nation, one of the concepts employed is agropolitan development. Blitar Regency is located on the southern coast and has significant potential in agriculture, livestock, fisheries, plantations, and tourism. One urban area in Blitar Regency is Kademangan, which has become a center for livestock and agriculture within its strategic economic zone. Notable commodities include livestock, cocoa, and tobacco. Given the economic potential in Kademangan, a suitable development approach is urban development based on agropolitan principles. Therefore, this study will discuss strategies for developing Kademangan as an agropolitan center. The agropolitan concept is based on the economic potential of the region. The research employs descriptive analysis and SWOT analysis methods. The identified issues can be addressed by maximizing existing potential, as indicated by the SWOT analysis results, which place it in quadrant 1, signifying a progressive situation with significant opportunities and strengths in planning.

Keywords: Urban; Agropolitan; Strategy; Kademangan; Economy.

Abstrak

Pertanian menjadi komoditas utama yang dikembangkan dan menopang perekonomian pada negara yang bersifat agraris. Dalam lingkup kewilayahan sebagai negara agraris, maka pengembangan wilayah dikembangkan dengan sektor pertanian salah satu konsepnya melalui pengembangan agropolitan. Kabupaten Blitar adalah sebuah kabupaten yang berada di pesisir pantai selatan yang memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pariwisata. Salah satu perkotaan yang ada di Kabupaten Blitar adalah Perkotaan Kademangan yang dalam bagian kawasan strategis aspek ekonomi, Perkotaan Kademangan menjadi salah satu sentra peternakan dan pertanian. Beberapa komoditas unggulan yang dimiliki yaitu sentra peternakan, sentra kakao, dan sentra tembakau. Dengan memperhatikan potensi perekonomian yang ada di Perkotaan Kademangan salah satu konsep pengembangan yang sesuai ada berbasis pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat agropolitan. Oleh karena itu peneliti akan membahas mengenai strategi pengembangan Perkotaan Kademangan sebagai sebuah pusat agropolitan. Konsep Agropolitan didasarkan kepada potensi perekonomian yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam penelitian digunakan metode analisis deskriptif dan analisis SWOT. Permasalahan yang ada dapat diatasi dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki hal ini didasarkan kepada hasil analisis SWOT yang menunjukkan berada pada kuadran 1 yang berarti progresif memiliki peluang disertai kekuatan yang besar dalam perencanaan.

Kata Kunci: Perkotaan ; Agropolitan ; Strategi ; Kademangan ; Ekonomi.

JURNAL PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DAERAH

Dipublikasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar,
Indonesia

Alamat: Jalan Semeru No. 40,
Kota Blitar – Provinsi Jawa Timur 66117
Telepon: (0342) 808165
Fax: (0342) 806275
E-mail: jurnalpradah@blitarkab.go.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berciri agraris dengan karakteristik sebesar 40% mata pencaharian penduduk adalah petani. Kondisi tersebut didukung dengan geografi Indonesia yang dilewati oleh barisan pegunungan subur dan posisi yang berada pada iklim tropis (Ayun, Kurniawan, & Saputro, 2020). Dengan kondisi sebagai negara agraris, maka sektor pertanian menjadi sektor yang strategis dalam kerangka perekonomian nasional. Sektor pertanian menjadi penopang utama bagi sektor perekonomian yang lain, sehingga pengembangan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan sektor ini (Selfia & Munawir, 2020). Berbasis pada pengembangan wilayah dengan sektor pertanian, maka salah satu konsep yang bisa diterapkan adalah konsep agropolitan. Konsep agropolitan merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah kawasan yang berfokus pada sektor pertanian (Wungo, et al., 2022).

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengembangkan pembangunan khususnya pada wilayah perdesaan dengan tujuan terciptanya kemandirian pembangunan yang didasarkan pada potensi lokal yang dimiliki. Pengembangan kawasan agropolitan didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat (Mutaqin & Haidir, 2021). Kawasan Agropolitan dikembangkan dengan tujuan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya mempercepat pengembangan wilayah dan keterkaitan desa kota. Dengan pengembangan agropolitan maka pemerintah melakukan upaya seoptimal mungkin dalam mendorong penciptaan kesejahteraan masyarakat perdesaan (Annisa & Santoso, 2019). Pengembangan kawasan agropolitan dirancang sebagai langkah untuk mendorong pengembangan kawasan pertanian terdesentralisasi, berkelanjutan, berbasis rakyat dan memiliki daya saing melalui sinergi berbagai potensi yang ada di masyarakat dan dukungan pemerintah (Talumewo, Egam, & Tarore, 2023).

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang berada pada wilayah pesisir pantai selatan Jawa Timur dengan berbagai potensi unggulan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pariwisata. Penataan ruang wilayah di Kabupaten Blitar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar berdasarkan RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031 mengamanatkan terciptanya ruang wilayah Kabupaten Blitar menjadi kawasan agroindustri dan pariwisata yang berbasiskan pada keharmonisan lingkungan serta upaya memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut salah satu langkah yang diambil adalah pengembangan sistem perkotaan dengan membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang pada setiap sub wilayah pengembangan di Kabupaten Blitar.

Kabupaten Blitar sebagai daerah yang menjadi sentra peternakan yang telah berkembang sejak akhir 1970-an dan berkembang hingga saat ini. Berdasarkan data yang ada populasi peternakan ayam layer di Kabupaten Blitar mencapai 22 juta ekor. Dengan kondisi populasi tersebut, Kabupaten Blitar menjadi penyumbang produksi nasional untuk telur sekitar 30% (Kholisdinuka, 2021). Salah satu daerah yang menjadi sentra peternakan ayam adalah Perkotaan Kademangan. Perkotaan Kademangan adalah salah satu wilayah perkotaan yang dikembangkan di Kabupaten Blitar berada pada wilayah bagian selatan Sungai Brantas. Perkotaan Kademangan juga memiliki potensi pada bidang pertanian dan perkebunan seperti adanya Kawasan Kampung Coklat sebagai sentra perkebunan coklat. Kampung Coklat menjadi salah satu daya tarik unggulan Kabupaten Blitar dan sentra budidaya kakao yang ada di Perkotaan Kademangan (Saiful, 2024).

Perkotaan Kademangan menjadi salah satu kawasan yang dirintis untuk menjadi sentra tembakau di Kabupaten Blitar. Dalam mendukung upaya tersebut, maka pengembangan sebagai sentra tembakau dilakukan dengan kerjasama dengan dunia industri dan pemerintah daerah melakukan dukungan penuh (Rofiq, 2021). Berbagai kondisi pertanian dan peternakan yang ada menjadi potensi dalam pengembangan sebagai kawasan agropolitan pada Perkotaan Kademangan. Akan tetapi dalam upaya pengembangan kawasan agropolitan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian. Dalam bidang peternakan ayam kondisi harga telur yang tidak stabil, harga pakan dan obat-obatan yang mahal sehingga mendorong banyak peternak yang alih profesi (Prasetyo, 2024).

Berdasarkan kondisi yang ada pada Perkotaan Kademangan yaitu potensi yang dimiliki dan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor pertanian dan peternakan, maka upaya untuk mengembangkan sebagai Agropolitan penting dan mendesak. Dalam mewujudkan Perkotaan Kademangan sebagai kawasan agropolitan maka diperlukan perumusan strategi pengembangan. Oleh karena itu, penelitian

dilakukan dengan tujuan merumuskan strategi pengembangan yang didasarkan pada potensi dan permasalahan untuk mewujudkan Perkotaan Kademangan sebagai Agropolitan.

TINJAUAN LITERATUR

1. Definisi Agropolitan

Menurut pemikiran Friedmann dan Douglass (1976), konsep agropolitan terdiri dari distrik-distrik agropolitan dan distrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per Km². (Baruwadi & Akib, 2017). Agropolitan merupakan pendekatan konsep yang berasal dari negara barat dengan istilah *agro* merujuk pada pertanian dan istilah *politan* merujuk pada kota, sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang bertumbuh dan berkembang karena adanya sistem dan usaha agribisnis yang berjalan dan mampu mendorong terjadinya kegiatan pembangunan pertanian untuk wilayah sekitarnya (Kaley, Setyawan, & Gai, 2024). Dalam pendapat yang lain kawasan agropolitan didefinisikan sebagai satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan tata kelola sumber daya alam tertentu yang dilakukan dengan keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan pada satuan permukiman dan sistem agrobisnis (Hay & Aulia, 2019). Berdasarkan uraian dari beberapa ahli yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa agropolitan adalah sebagai sebuah kawasan yang memiliki komoditas pertanian dan sumber daya alam tertentu yang dikembangkan menjadi sebuah sektor unggulan untuk basis kota dengan dukungan integrasi antara sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

2. Komponen Agropolitan

Pengembangan agropolitan terdiri atas beberapa komponen pembentuk kawasan agropolitan. Dalam standar yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2014, bahwa pengembangan kawasan agropolitan dapat terjadi apabila adanya dukungan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai untuk bisnis agribisnis pertanian. Komponen ini termasuk jalan, sarana irigasi, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi untuk pengembangan agribisnis, fasilitas pengolahan produk pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya (Talumewo, Egam, & Tarore, 2023). Sedangkan dalam pendapat yang lain, bahwa komponen dasar dalam sistem kawasan agropolitan terdiri atas *area hinterland*, Kota Tani dan infrastruktur serta suprastruktur pembantu kawasan. Area *Hinterland* dalam pengembangannya bertumpu pada Kota Tani yang dihubungkan dengan aksesibilitas transportasi dan jaringan jalan serta dukungan sarana-prasarana seperti saluran irigasi, listrik, telepon dan lain sebagainya. Kawasan Kota Tani berfokus pada zona pengelolaan dan pelayanan kebutuhan agribisnis dan lokasi pemasaran produk (Patiung, Wisnujati, Hanafies, Wanto, & Ernawati, 2021). Pengembangan kawasan agropolitan didukung dengan sarana prasarana yang dapat dikelompokkan kedalam sub-sistem agribisnis hulu, sub-sistem pengolahan hasil, sub-sistem usahatani, subsistem pengolahan hasil serta pada sub-sistem pemasaran hasil (Halmahera & Sriyanto, 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian “Strategi Pengembangan Perkotaan Kademangan Sebagai Pusat Agropolitan” akan dijabarkan sebagai berikut.

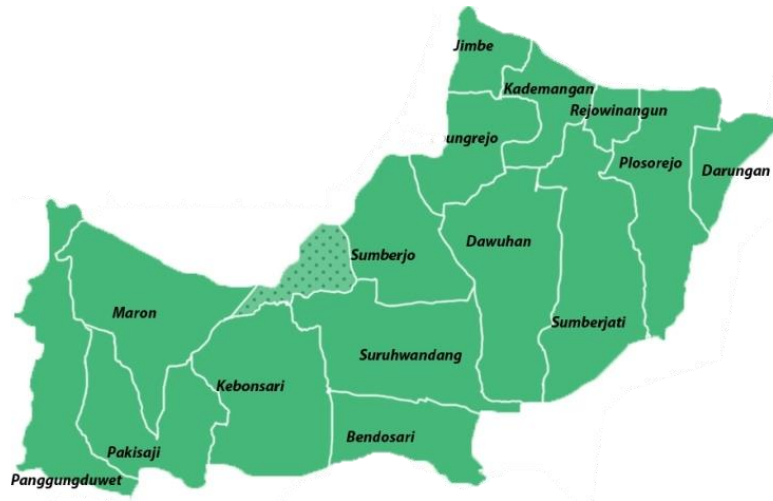
A. Lokasi Penelitian

Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan Ibu Kota Kabupaten adalah Kecamatan Kanigoro. Posisi Kabupaten Blitar terletak sebelah Selatan Khatulistiwa, tepatnya 111°40'-112°10' Bujur Timur dan 7°58'-8°9'51" Lintang Selatan. Letak Kabupaten Blitar berada di sebelah barat daya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya, dengan jarak kurang lebih 160 Km. Kabupaten Blitar berbatasan langsung dengan 3 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan di Perkotaan Kademangan yang berada di Kecamatan Kademangan. Lokasi penelitian ini dipilih karena beberapa pertimbangan strategis antara lain :

1. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar, dalam bagian kawasan strategis aspek ekonomi, Perkotaan Kademangan menjadi salah satu sentra peternakan dan pertanian.
2. Dari segi aksesibilitas, adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan di pesisir selatan Kabupaten Blitar dimana salah satu jalan penghubung antara pesisir selatan dengan pusat kota baik di Kota Blitar dan Ibu

Kota Kabupaten Blitar di Perkotaan Kanigoro adalah melalui jalan utama di Perkotaan Kademangan, yaitu Jalan Raya Trisula.

3. Potensi komoditas unggulan sektor pertanian dan peternakan di Perkotaan Kademangan, antara lain peternakan ayam, pertanian kakao, pertanian tembakau, dan komoditas lainnya.
4. Pemasaran produksi komoditas dekat dengan Akses Jalan Nasional Tulungagung – Blitar karena Perkotaan Kademangan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulungagung.



Gambar 1. Peta Perkotaan Kademangan

Sumber: Website Desa Pakisaji, Kecamatan Kademangan

B. Jenis dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*). Metode penelitian metode campuran, atau metode kombinasi, atau metode gabungan, adalah metode penelitian yang menggabungkan dua metode yang ada, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Menurut Parjaman dan Akhmad, metode campuran adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan perpaduan teknik, metode, cara pandang, konsep dan bahasa metode penelitian kuantitatif dan kualitatif pada penelitian yang dilakukan (Waruwu, 2023). Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pertama dengan observasi lapangan, atau survei primer dan dilanjutkan dengan studi kepustakaan dalam melengkapi informasi ;
2. Kedua, rumusan masalah khususnya melakukan identifikasi permasalahan dan potensi pada aspek perekonomian Perkotaan Kademangan terkait pertanian, peternakan, dan hortikultura ;
3. Ketiga, mengumpulkan data tambahan, baik primer maupun sekunder ;
4. Keempat, menentukan metode pemanfaatan dan pengolahan data yang tepat berdasarkan potensi dan permasalahan yang sudah terumuskan ;
5. Kelima, mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya.
6. Keenam, mengidentifikasi solusi bagi Perkotaan Kademangan dan menyimpulkan analisis yang telah dilakukan.

Bagan tahapan alur pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diperhatikan dan ditunjukkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Bagan Tahapan Penelitian

Sumber : Ilustrasi Peneliti, 2024

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian penting dari tahapan penelitian. Teknik pengumpulan data terkait dengan usaha secara sistematis dengan prosedur secara standar guna mendapatkan ukuran tentang variable dan jawaban atas pertanyaan penelitian (Fadilla & Wulandari, 2023). Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Survei Lapangan
Survei lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan observasi langsung terhadap objek penelitian guna memahami kondisi dan potensi pada daerah penelitian. Dalam kegiatan survei lapangan peneliti melakukan observasi pada wilayah Perkotaan Kademangan dengan fokus untuk melihat berbagai permasalahan dan potensi dalam pengembangan agropolitan, baik dalam aspek sosial, ekonomi dan sarana-prasarana.
- 2) Pendataan Badan / Instansi
Pendataan Badan / Instansi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data dari instansi terkait untuk mencari data kuantitatif dan data kualitatif baik berupa data statistik maupun dalam bentuk peta yang dikumpulkan pada berbagai instansi / dinas seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Ketahanan dan Pangan (DKP). Data yang dikumpulkan seperti Dokumen Kabupaten Blitar Dalam Angka, Kecamatan Kademangan Dalam Angka, Laporan Sektor Bidang Penataan Ruang dan Pertanian, Dokumen Kebijakan Sektor Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Pertanian Daerah.
- 3) Studi Literatur
Studi Literatur yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh peneliti melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen yang dikumpulkan melalui studi literatur antara lain penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema terkait agropolitan di lokasi lain, penelitian terdahulu terkait pengembangan pertanian di Kabupaten Blitar, penelitian terdahulu tentang Pembangunan dan potensi masalah di Perkotaan Kademangan.
- 4) Teknik Wawancara
Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dan informasi terhadap masyarakat setempat untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat.

D. Analisis

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini, dilakukan untuk kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang ada, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bersifat kualitatif berupa penjelasan verbalisasi dari data yang telah dijangkau menggunakan wawancara dan observasi lapangan.

2. Analisis SWOT

SWOT yaitu teknik analisis yang mengkaji 4 aspek sebagai berikut, yaitu Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (keuntungan), dan Threat (ancaman) dalam suatu area. Analisis SWOT ditentukan berdasarkan hasil pembobotan dan rating dengan indikator dari hasil data primer dan sekunder. Pembobotan berasal dari total masing-masing aspek (0,25) dibagi dengan jumlah faktor yang ada. Sedangkan rating merupakan nilai dari faktor yang ada, yakni berkisar antara 1 sampai dengan 5 berdasarkan kepentingannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Perkotaan Kademangan

Kecamatan Kademangan merupakan satu dari dua puluh dua kecamatan yang membagi habis wilayah administrasi Kabupaten Blitar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Utara : Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
- Sebelah Timur : Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bakung dan Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar.

Kecamatan Kademangan dengan luas wilayah 105,11 Km² terbagi menjadi 15 desa/kelurahan. Desa Dawuhan merupakan desa/kelurahan terluas di antara 15 desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kademangan. Adapun penggunaan lahan di Kecamatan Kademangan seluas 9.645 Ha sebanyak 8,63 persen-nya digunakan untuk sawah dengan persentase sawah irigasi 8,06 persen dan sawah tadah hujan sebanyak 0,57 %. Kemudian untuk penggunaan lahan bukan sawah sebanyak 43,9 persen dimana tegal/kebun sebanyak 34,2 % dan Hutan Rakyat sebanyak 9,74 %. Sedangkan sisa luas penggunaan lahan lainnya dan bukan pertanian dilihat dari penggunaan seperti penggembalaan/ padang rumput, tambak, kolam, perkebunan dan lainnya sebesar 56,5 %.

Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, data lahan sawah di Kecamatan Kademangan tidak banyak mengalami perubahan. Luas lahan sawah yang ada dibedakan menjadi sawah yang berpengairan teknis, berpengairan semi teknis, berpengairan sederhana, irigasi desa, tadah hujan, pasang surut dan lebak/polder. Untuk lahan bukan sawah dibedakan menjadi lahan pekarangan, bangunan dan halaman, tambak, hutan Negara, hutan rakyat, rawa, ladang, tegal, perkebunan (Kecamatan Kademangan Dalam Angka, 2020). Menurut data monografi kecamatan luas daratan wilayah Kecamatan Kademangan memiliki luas yaitu 105,11 Ha, apabila dilihat dari penggunaan lahannya tampak bahwa 9% merupakan lahan sawah dan 91% bukan lahan sawah (Kecamatan Kademangan Dalam Angka, 2019). Kegiatan peternakan di Kecamatan Kademangan didominasi oleh aktivitas peternakan unggas dengan jenis komoditas paling banyak adalah ayam petelur.

2. Potensi dan Permasalahan Lokasi Perkotaan Kademangan

Perkotaan Kademangan sebagai salah satu perkotaan yang dikembangkan di Kabupaten Blitar memiliki berbagai potensi dan permasalahan dalam pengembangannya. Berikut adalah potensi dan permasalahan dalam pengembangan Perkotaan Kademangan Kabupaten Blitar:

1. Potensi Perkotaan Kademangan

- a. Kecamatan Kademangan sebagai pusat pelayanan Kota di wilayah sekitarnya berdasarkan kebijakan pengembangan perkotaan di RTRW Kabupaten Blitar;
- b. Kecamatan Kademangan memiliki dukungan kemudahan akses dengan dilalui oleh Jalan Nasional Tulungagung – Blitar, Jalan Strategis Kabupaten yaitu Jalan Trisula Kademangan – Gawang, dan berbagai dukungan infrastruktur daerah guna pendorong pertumbuhan perekonomian;
- c. Komoditas sektor peternakan unggulan di Kecamatan Kademangan yaitu peternakan unggas ayam petelur dan ayam pedaging, serta terdapat beberapa peternakan yang sedang berkembang seperti peternakan sapi, kambing dan babi;
- d. Komoditas sektor pertanian dan Perkebunan yang unggulan di Kecamatan Kademangan yaitu tebu, tembakau dan kakao dan berbagai komoditas lainnya yang sedang berkembang;

2. Permasalahan Perkotaan Kademangan

- a. Curah hujan pada Kecamatan Kademangan tergolong rendah kurang memungkinkan untuk irigasi sawah dan juga dapat berpotensi timbulnya bencana kekeringan ;
- b. Banyak potensi yang belum dikelola dengan baik dan dieksplorasi lebih mendalam ;
- c. Wilayah selatan Kecamatan Kademangan mengalami kesulitan air terutama saat musim kemarau ;
- d. Beberapa infrastruktur daerah di Kecamatan Kademangan mengalami kerusakan, seperti banyak jalan yang rusak, minimnya lampu penerangan jalan, dan ada daerah yang masih kesulitan untuk akses jaringan internet yang memadai ;

Dengan kondisi potensi dan permasalahan tersebut, maka Perkotaan Kademangan memerlukan suatu perencanaan untuk mengatur dan memanfaatkan potensi yang ada khususnya perekonomian pada aspek pertanian dan peternakan. Perencanaan pengembangan ruang yang sesuai dengan komoditas yang potensial yaitu pengembangan sebagai pusat agropolitan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalkan dampak permasalahan yang ada.

3. Karakteristik Pengembangan Agropolitan Perkotaan Kademangan

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan dan memperhatikan kondisi perekonomian komoditas pertanian dan peternakan yang dimiliki oleh Perkotaan Kademangan, maka dirumuskan karakteristik pengembangan agropolitan pada Perkotaan Kademangan. Perumusan karakteristik disampaikan berdasarkan komponen utama agropolitan sebagaimana telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka. Berikut adalah rumusan karakteristik agropolitan pada Perkotaan Kademangan:

1. Pusat Agropolitan

Kawasan pusat yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, penyedia jasa pendukung pertanian, dan pusat industri pertanian. Berdasarkan kondisi yang ada, maka pengembangan Pusat Agropolitan yang ada di Perkotaan Kademangan di tempatkan pada lokasi yang strategis guna mendukung berbagai fungsi agropolitan, dimana dapat ditempatkan pada ibukota kecamatan yaitu di Desa Suruhwadang dengan adanya Pusat Pemerintahan Kecamatan Kademangan.

2. Unit Kawasan Pengembangan

a. Produksi Pertanian

Kawasan produksi pertanian yang ada pada Perkotaan Kademangan dapat ditempatkan pada kawasan bagian bawah di Perkotaan Kademangan yaitu di sekitar Desa Sumberjati karena pada kawasan ini kondisi eksistingnya ada dukungan lahan persawahan dan pertanian yang luas dan kemudahan untuk mendapatkan akses air untuk pertanian.

b. Produksi Peternakan

Kawasan produksi peternakan yang ada pada Perkotaan Kademangan dapat ditempatkan pada kawasan bagian atas di Perkotaan Kademangan yaitu di sekitar Desa Suruhwadang karena pada kawasan ini kondisi eksistingnya terdapat pemusatan kegiatan peternakan ayam petelur dan ayam pedaging serta industri pendukung telah berkembang pesat.

c. Pusat Pemasaran

Kawasan pusat pemasaran yang ada pada Perkotaan Kademangan dapat ditempatkan pada kawasan yang dilalui akses jaringan jalan nasional di Perkotaan Kademangan yaitu di sekitar Kelurahan Kademangan karena berbagai aktivitas pemasaran perdagangan dan jasa telah berkembang pada kawasan ini.

3. Sektor Unggulan

Berdasarkan kondisi perekonomian yang ada di Perkotaan Kademangan dengan memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan sektoral pertanian, peternakan dan perkebunan, sehingga komoditas yang secara eksisting menjadi unggulan di Perkotaan Kademangan adalah peternakan ayam petelur, perkebunan kakao, dan pertanian tebu serta adanya potensi untuk berkembang menjadi unggulan yaitu pertanian tembakau dan peternakan ayam pedaging.

4. Infrastruktur

Berdasarkan kondisi infrastruktur yang ada di Perkotaan Kademangan diketahui bahwa telah adanya dukungan kemudahan aksesibilitas berupa jaringan jalan yang menjadi simpul konektivitas dalam mendukung pengembangan agropolitan serta berbagai infrastruktur lainnya seperti dukungan irigasi, pengembangan sumber mata air yang dapat dimanfaatkan masyarakat, dan berbagai sarana prasarana pusat pertanian dan pusat peternakan.

5. Keterlibatan Masyarakat

Berdasarkan kondisi aktivitas sosial masyarakat diketahui bahwa mayoritas masyarakat pada Perkotaan Kademangan beraktivitas sosial dan perekonomian pada bidang pertanian dan peternakan serta perkebunan. Dukungan keterlibatan mayoritas masyarakat pada bidang perekonomian tersebut akan memudahkan dalam upaya pengembangan sebagai kawasan agropolitan. Dukungan yang lain dengan adanya SMK Negeri 1 Kademangan yang memiliki kejuruan pada bidang pengembangan peternakan dan pertanian maka akan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pengembangan Perkotaan Kademangan.

6. Konservasi Alam dan Lingkungan

Berdasarkan potensi permasalahan yang ada pada Perkotaan Kademangan, maka upaya mengoptimalkan potensi perekonomian pertanian dan peternakan yang dilakukan harus menerapkan prinsip keberlanjutan dan prinsip perlindungan lingkungan, guna meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan lingkungan akibat pengembangan Agropolitan Perkotaan Kademangan.

7. Keterkaitan Kota dan Pedesaan

Keterkaitan antara kota dan pedesaan melalui pergerakan barang, modal, dan manusia, yang dapat ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Kondisi kemudahan dan keterkaitan ini dilihat berdasarkan kondisi lokasi strategis Perkotaan Kademangan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulungagung dengan akses utama jaringan jalan nasional, menjadi lokasi penghubung dengan pengembangan Jalur Lintas Selatan dengan adanya jaringan jalan strategis yang melalui Perkotaan Kademangan. Posisi Perkotaan Kademangan juga berdekatan dengan Kota Blitar sehingga akan memudahkan dalam pergerakan barang, modal dan manusia.

4. Isu Strategis Pengembangan Agropolitan Perkotaan Kademangan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Tabel 1: Isu Strategis Perkotaan Kademangan Kabupaten Blitar

No	S	W	O	T
1	Kecamatan Kademangan Sebagai pusat pelayanan Kota di wilayah sekitarnya	Curah hujan yang rendah kurang memungkinkan untuk irigasi sawah dan juga dapat berpotensi timbulnya bencana kekeringan.	Kabupaten Blitar berpotensi menjadi PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dengan ini akan menjadikan Kabupaten Blitar memiliki kemajuan dalam bidang ekonomi, transportasi, dan sarana prasarana	Banyak potensi yang belum dikelola dengan baik dan dieksplorasi lebih mendalam
2	Jalan sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian serta kemajuan infrastruktur daerah	Kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas pada bidang pertanian dan peternakan serta minimnya keterlibatan pemuda	Jalan berpotensi menjadi penghubung kegiatan perekonomian nasional	Kesulitan air pada musim kemarau khususnya bagian Selatan
3	Komoditas Ayam Petelur menjadi komoditas unggulan	Banyak potensi yang belum dikelola dengan baik dan dieksplorasi lebih mendalam	Tebu menjadi komoditas unggulan yang progresif terhadap perekonomian daerah.	Komoditas tanaman sayur dan buah memiliki potensi pengembangan yang lambat dan non-progressive
4	Kemudahan akses internet membuka peluang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Ketersediaan air bersih belum merata dan saat musim kemarau terjadi kesulitan air	Produksi peternakan telur Kabupaten Blitar menjadi salah satu komoditas unggulan daerah	Usia produktif yang tidak disertai dengan pendidikan berkualitas berpotensi meningkatkan kemiskinan dan pengangguran
5	Komoditas tebu menjadi hasil perkebunan unggulan dengan rata-rata produksi sebesar 4279.97 ton/tahun.			
6	Komoditas Pepaya, Melinjo, Jambu Air memiliki perkembangan lebih cepat dan komoditas mangga menjadi komoditas unggulan			

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2023

5. Analisis SWOT Agropolitan Perkotaan Kademangan

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Unsur – unsur SWOT terdiri dari kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*). Berdasarkan hasil analisa SWOT yang didapat dari analisa IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) dan EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*) diatas selanjutnya akan dilakukan penjumlahan bobot dan

nilai dari analisis IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) dan EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*) untuk merumuskan isu strategis dan juga untuk menentukan tujuan penetaan BWP yang sesuai dengan potensi yang ada, maka dilakukan klasifikasi terkait kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari hasil pembobotan analisa EFAS dan IFAS. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut

1) Analisis Faktor Internal S-W

Pada penelitian yang dilakukan digunakan metode analisis kondisi internal guna menilai kekuatan dan kelemahan yang ada pada Perkotaan Kademangan pada aspek pengembangan Agropolitan. Tabel Analisis Faktor Internal S-W atau disingkat IFAS dibuat dengan menetapkan bobot dan derajat kepentingan pada setiap factor yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setiap factor yang muncul diberikan penilaian bobot dari 0,00 (tidak penting) hingga 1,00 (sangat penting). Penilaian bobot terbesar diberikan pada factor yang memiliki dampak terbesar dalam pengembangan Agropolitan Perkotaan Kademangan. Peringkat kepentingan diberikan dari nilai 1 (tidak ada pengaruh) sampai dengan nilai 4 (pengaruh kuat).

Tabel 2: Nilai Komponen Internal Kekuatan (S – *Strengths*) pada Perkotaan Kademangan Kabupaten Blitar

Faktor		Bobot	Kepentingan	Nilai
Komponen Kekuatan (<i>Strenght / S</i>)	Kemudahan dan dukungan aksesibilitas berupa jalan nasional memiliki potensi sebagai penghubung kegiatan perekonomian nasional dan adanya jaringan jalan strategis kabupaten yang melalui Perkotaan Kademangan	0,85	4	3,40
	Komoditas Ayam Petelur sebagai komoditas unggulan dan memiliki potensi perkembangan yang cepat	0,95	4	3,80
	Komoditas tebu dengan perkembangan cepat yang memiliki potensi pada sektor Perkebunan	0,90	4	3,60
	Adanya aktivitas UKM dan UMKM sebagai penunjang pemasaran produk perekonomian Masyarakat	0,60	3	1,80
	Adanya sentra Perkebunan kakao yang sudah terkenal sebagai daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Blitar, yaitu Kampung Coklat	0,75	3	2,25
	Adanya potensi pengembangan Perkebunan tembakau yang sudah mulai di rintis di Perkotaan Kademangan	0,55	2	1,10
	Adanya potensi dukungan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui SMKN 1 Kademangan yang memiliki jurusan pada bidang peternakan dan pertanian	0,80	3	2,40
Total Komponen Internal Kekuatan				18,35

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2023

Tabel 3: Nilai Komponen Internal Kelemahan (W – *Weaknesses*) pada Perkotaan Kademangan Kabupaten Blitar

Faktor		Bobot	Kepentingan	Nilai
Komponen Kelemahan (<i>Weaknesses / W</i>)	Jalan strategis yang ada pada Perkotaan Kademangan banyak yang mengalami kerusakan dan banyak akses jaringan jalan yang tidak dilengkapi dengan lampu penerangan jalan	0,85	-4	-3,40
	Pengairan perkebunan masih bergantung pada iklim dan cuaca dikarenakan sulitnya akses air pada beberapa wilayah di Perkotaan Kademangan	0,90	-4	-3,60
	Kurangnya eksplorasi dan belum maksimalnya pengelolaan berbagai komoditas pertanian dan peternakan yang ada di Perkotaan Kademangan	0,75	-3	-2,25
	Kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas pada bidang pertanian dan peternakan serta minimnya keterlibatan pemuda	0,80	-3	-2,40
Total Komponen Internal Kelemahan				11,65

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2023

2) Analisis Faktor Eksternal O-T

Pada penelitian yang dilakukan digunakan metode analisis kondisi eksternal guna menilai peluang dan ancaman dari eksternal yang akan mengganggu pengembangan Perkotaan Kademangan pada aspek agropolitan. Tabel Analisis Faktor Eksternal O-T atau disingkat EFAS dibuat dengan menetapkan bobot dan derajat kepentingan pada setiap factor yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penetapan setiap factor yang muncul diberikann penilaian darin 0,00 (tidak penting) sampai 1,00 (sangat penting). Penilaian bobot terbesar diberikan pada factor yang memiliki dampak terbesar dalam pengembangan Agropolitan Perkotaan Kademangan. Peringkat kepentingan diberikan dari nilai 1 (tidak ada pengaruh) sampai dengan nilai 4 (pengaruh kuat).

Tabel 4: Nilai Komponen Eksternal Peluang (O – Opportunities) pada Perkotaan Kademangan Kabupaten Blitar

Faktor		Bobot	Kepentingan	Nilai
Komponen Peluang (opportunities / O)	Potensi menjadi PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi, transportasi dan sarana prasarana	0,90	4	3,60
	Jalan nasional berpotensi menjadi penghubung kegiatan perekonomian nasional.	0,95	3	2,85
	Adanya Stasiun Barang di Kota Blitar, Terminal Tipe A di Kota Blitar dan Terminal Barang di Kota Blitar yang berdekatan dengan Perkotaan Kademangan membantu konektivitas barang dan jasa dari Agropolitan Kademangan ke berbagai daerah lainnya	0,85	3	2,55
	Adanya beberapa Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri di Blitar Raya yang memiliki jurusan dan kajian berkaitan dengan pengembangan pertanian dan peternakan akan membantu pengembangan agropolitan	0,70	2	1,40
	Tebu menjadi komoditas unggulan yang progresif terhadap perekonomian daerah.	0,75	2	1,50
	Produksi peternakan telur Kabupaten Blitar menjadi salah satu komoditas unggulan daerah	0,75	2	1,50
Total Komponen Eksternal Peluang				13,40

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2023

Tabel 5: Nilai Komponen Eksternal Tantangan (T – Threats) pada Perkotaan Kademangan Kabupaten Blitar

Faktor		Bobot	Kepentingan	Nilai
Komponen Tantangan (threats / T)	Banyak potensi yang belum dikelola dengan baik dan dieksplorasi lebih mendalam	0,80	-4	-3,20
	Kesulitan air pada musim kemarau khususnya bagian Selatan	0,95	-4	-3,80
	Komoditas tanaman sayur dan buah memiliki potensi pengembangan yang lambat dan non-progresive	0,75	-3	-2,25
	Usia produktif yang tidak disertai dengan pendidikan berkualitas berpotensi meningkatkan kemiskinan dan pengangguran	0,70	-3	-2,10
Total Komponen Eksternal Tantangan				-11,35

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2023

3) Analisis EFAS IFAS Perkotaan Kademangan

Berdasarkan hasil analisis faktor internal, dapat dilihat bahwa nilai skor kekuatan adalah sebesar 18,35 lebih besar dari nilai skor kelemahan yaitu sebesar -11,65. Total keseluruhan analisis internal adalah 6,70 dengan begitu nilai analisis internal menunjukkan posisi koordinat pada diagram nilai X. Sedangkan berdasarkan hasil analisis factor eksternal dapat dilihat bahwa nilai skor peluang adalah 13,40 lebih besar dari nilai skor ancaman yaitu -11,35. Total keseluruhan analisis eksternal adalah 2,05 dengan begitu nilai analisis eksternal menunjukkan posisi koordinat pada diagram nilai Y.

Tabel 6: Nilai EFAS - IFAS Perkotaan Kademangan Kabupaten Blitar

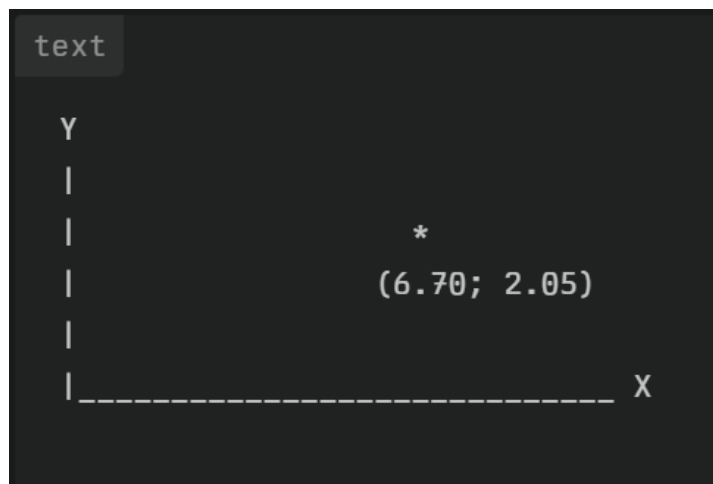
Nilai	Hasil			
	S	W	O	T
Total	18,35	-11,65	13,40	-11,35

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2023

Tabel 7: Nilai Kuadran SWOT Perkotaan Kademangan Kabupaten Blitar

Nilai	X	Y
Koordinat	6,70	2,05

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2023

**Gambar 3. Posisi Koordinat SWOT Perkotaan Kademangan**

Sumber: Hasil Ilustrasi dengan Bantuan AI perplexity.ai

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil bahwa untuk kondisi eksternal dan internal Kecamatan Kademangan berada pada kuadran 1. Hasil analisis SWOT yang menempati kuadran 1 memiliki arti bahwa posisi tersebut menunjukkan sebuah kondisi yang kuat dan berpeluang. Sehingga rekomendasi yang diberikan pada kondisi ini adalah dengan pendekatan “progresif” (Samsudin & Waluyo, 2021). Jadi hasil arahan rumusan strategis yang diberikan terkait pengembangan Agropolitan Perkotaan Kademangan adalah pendekatan progresif pada Strategi S – O.

6. Rumusan Strategi Pengembangan Agropolitan Perkotaan Kademangan

Berdasarkan hasil analisis posisioning SWOT yang telah dilakukan dan dibahas pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa kondisi Perkotaan Kademangan dalam mengembangkan agropolitan berada pada posisi kuadran 1, sehingga rumusan strategi yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Memperluas Distribusi dan Pemasaran

Dalam mengembangkan Agropolitan di Perkotaan Kademangan maka strategi pertama yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan potensi dan kekuatan yang dimiliki adalah dengan memperluas distribusi dan pemasaran. Upaya memperluas distribusi dan pemasaran dalam pengembangan agropolitan bertujuan untuk menciptakan sistem agribisnis yang lebih berkelanjutan, meningkatkan pendapatan petani, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Hal ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi berbasis pertanian yang lebih kompetitif dan efisien

2. Optimalisasi Fasilitas Transportasi untuk Pemasaran

Dalam mengembangkan Agropolitan di Perkotaan Kademangan maka strategi kedua yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan potensi dan kekuatan yang dimiliki adalah dengan optimalisasi fasilitas transportasi untuk pemasaran. Adanya Stasiun Barang, Terminal Tipe A dan Terminal Barang di Kota Blitar yang dekat dengan Perkotaan Kademangan harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan mengoptimalkan fasilitas transportasi, pengembangan agropolitan dapat meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk pertanian. Hal ini juga dapat mempercepat gerak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

3. Mempertahankan dan Meningkatkan Kapasitas Produksi
 Dalam mengembangkan Agropolitan di Perkotaan Kademangan maka strategi ketiga yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan potensi dan kekuatan yang dimiliki adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan kapasitas produksi. Upaya yang dapat dilakukan seperti intensifikasi pertanian, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kelembagaan, pengembangan agroindustri, pengelolaan sumber daya dan optimalisasi pasar. Dengan mengintegrasikan berbagai upaya tersebut, pengembangan agropolitan dapat mempertahankan dan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan memajukan ekonomi berbasis pertanian.
4. Peningkatan Pangsa Pasar Melalui Intervensi Kebijakan dan Inovasi Swasta
 Dalam mengembangkan Agropolitan di Perkotaan Kademangan maka strategi keempat yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan potensi dan kekuatan yang dimiliki adalah dengan peningkatan pangsa pasar melalui intervensi kebijakan dan inovasi swasta. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti pengembangan komoditas unggulan melalui diversifikasi produk, pengembangan sistem pemasaran, pengembangan promosi dan informasi produk, koordinasi dan integrasi dengan berbagai pemangku kebijakan, serta melalui peningkatan kapasitas masyarakat.
5. Memberikan dukungan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 Dalam mengembangkan Agropolitan di Perkotaan Kademangan maka strategi kelima yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan potensi dan kekuatan yang dimiliki adalah dengan memberikan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi profesi, pemberdayaan kelembagaan, inovasi teknologi, pendanaan dan investasi serta monitoring dan evaluasi.

KESIMPULAN

Kondisi potensi dan permasalahan yang ada di Perkotaan Kademangan mendorong perlunya konsep pengembangan kawasan perkotaan berbasis agropolitan. Konsep Agropolitan didasarkan kepada potensi perekonomian yang dimiliki oleh daerah tersebut. Permasalahan yang ada dapat diatasi dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki hal ini didasarkan kepada hasil analisis SWOT yang menunjukkan berada pada kuadran 1 yang berarti progresif memiliki peluang disertai kekuatan yang besar dalam perencanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Blitar dan jajaran instansi terkait yang memandu dalam kemudahan akses data guna pemenuhan kebutuhan data penelitian.
2. Bappedalitbang Kabupaten Blitar yang telah memfasilitasi untuk naskah ini bisa terbit pada Jurnal Pradah Kabupaten Blitar.
3. Masyarakat Kecamatan Kademangan dan Pemerintah Kecamatan Kademangan yang membantu dan mendukung proses penelitian.
4. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang membantu melakukan dukungan dan pembimbingan.

REFERENSI

1. Annisa, C. I., & Santoso, E. B. (2019). Arahana Pengembangan Kawasan Agropolitan Berdasarkan Komoditas Unggulan Prioritas Tanaman Pangan Kabupaten Bojonegoro. *JURNAL TEKNIK ITS*, C175 - C181.
2. Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). PERKEMBANGAN KONVERSI LAHAN PERTANIAN DI BAGIAN NEGARA AGRARIS. *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, 38-44.
3. Baruwadi, M., & Akib, F. H. (2017). *Agropolitan Jagung*. Gorontalo: Ideas Publishing.
4. Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). LITERATURE REVIEW ANALISIS DATA KUALITATIF: TAHAP PENGUMPULAN DATA. *MITITA Jurnal Penelitian*, 34 - 46.
5. Halmahera, M., & Sriyanto, S. (2023). Evaluasi Sarana-Prasarana Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Baros Kabupaten Serang. *Geo Image (Spatial-Ecological-Regional)*, 162-175.

6. Hay, K., & Aulia, B. U. (2019). Analisis Lokasi Pengembangan Sub Sistem Agropolitan Berbasis Komoditas Pala di Kabupaten Fakfak. *JURNAL TEKNIK ITS*, C169 - C174.
7. Kaley, M. I., Setyawan, A., & Gai, A. M. (2024). PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN BERBASIS HORTIKULTURA MELALUI MULTI ATTRIBUTE DECISION MAKING (STUDI KASUS : KECAMATAN PONCOKUSUMO). Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITN Malang (<https://eprints.itn.ac.id/>).
8. Kholisdinuka, A. (2021, Februari 15). Asal Muasal Blitar Dikenal Sebagai Sentra Peternakan Ayam Petelur. Retrieved from Detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5374357/asal-muasal-blitar-dikenal-sebagai-sentra-peternakan-ayam-petelur>
9. Mutaqin, Z., & Haidir, H. (2021). Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Pangan Pada Kawasan Agropolitan Di Kota Pagar Alam. *JURNAL TEKNO GLOBAL*, 33 - 40.
10. Patiung, M., Wisnujati, N. S., Hanafies, S. R., Wanto, H. S., & Ernawati, E. (2021). Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 86 - 101.
11. Prasetyo, A. (2024, Agustus 15). Sadar Potensi Lingkungan, Kades Suruhwadang Kecamatan Kademangan Ini Geluti Bisnis Telur Ayam. Retrieved from <https://blitarkawentar.jawapos.com/>: <https://blitarkawentar.jawapos.com/lifestyle/2274978464/sadar-potensi-lingkungan-kades-suruhwadang-kecamatan-kademangan-ini-geluti-bisnis-telur-ayam>
12. Rofiq, A. (2021, November 21). Dorong Peningkatan Produksi Tembakau di Kabupaten Blitar, Bupati Rini: Pemetaan Potensi Harus Dimaksimalkan. Retrieved from <https://jatimtimes.com/>: <https://jatimtimes.com/baca/254571/20211121/113800/privacy>
13. Saiful, E. H. (2024, September 16). Melihat Budi Daya Kakao di Kampung Coklat: Pilih Pupuk Organik, Paparan Matahari Secukupnya. Retrieved from [Jawapos.com](https://www.jawapos.com/): <https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/015093554/melihat-budi-daya-kakao-di-kampung-coklat-pilih-pupuk-organik-paparan-matahari-secukupnya>
14. Samsudin, M., & Waluyo, M. (2021). Analisis Strategi Promosi Produk Kopi Tarik untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada Divisi Promosi dengan Metode SWOT dan BCG di PT. XYZ. *Juminten : Jurnal Manajemen Industri dan Teknologi*, 144-155.
15. Selfia, Y., & Munawir, M. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN KENDAL BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN. *Jurnal Planologi Dan Sipil (JPS)*, 115-125.
16. Talumewo, R. M., Egam, P. P., & Tarore, R. C. (2023). ANALISIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KAWASAN AGROPOLITAN DI LANGOWAN. *Jurnal Spasial*, 110 - 120.
17. Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 2896 - 2910.
18. Wungo, G. L., Widjajanti, R., Susanti, R., Chafid, M., Napitupulu, C., Salsabila, D., & Liring, T. (2022). PENGENALAN KONSEP AGROPOLITAN DI KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR. *JURNAL PASOPATI*, 157-161.



Tersedia secara online pada
<https://jurnalpradah.com/>



Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Hasti Aringga Suminar¹, Nana Fadjar Prijantoro², Aris Purwowidi Yanto³

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember ¹
 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Jember ^{2, 3}
hastisuminar@gmail.com

Abstract

Agriculture is one of the leading sectors in East Java which still has obstacles in achieving stability and sustainability. The purpose of this study is to identify which factors have a significant influence on East Java's regional economic growth (GRDP). The research method used is panel data regression analysis involving 18 regencies and cities in East Java with a research period of 2017-2022. The best model of this research is the random effect model. The results showed that agricultural, forestry (PKP) income and the percentage of informal agricultural workers had a positive and significant impact on East Java's GRDP. Farmer exchange rates have a negative and significant effect on East Java's GRDP, while food crop productivity (PROD) has an insignificant negative effect. Thus it is necessary to have conservation agriculture, agroforestry, standardization of the quality of the agricultural sector, technological innovation and investment, institutions, digital agriculture, agricultural input subsidies, and market interventions to create food security and sustainability in the agricultural sector.

Keywords: agriculture, farmer exchange rates, regional income, productivity.

Abstrak

Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Jawa Timur yang masih memiliki hambatan dalam mencapai kestabilan dan keberlanjutannya. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur (PDRB). Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi data panel yang melibatkan 18 kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan periode penelitian tahun 2017-2022. Model terbaik penelitian ini adalah random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pertanian, kehutanan (PKP) dan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian berdampak positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Timur. Nilai tukar petani memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Timur, sedangkan produktivitas tanaman pangan (PROD) memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Dengan demikian perlu adanya pertanian konservasi, agroforestri, standarisasi kualitas sektor pertanian, inovasi teknologi dan investasi, kelembagaan, pertanian digital, subsidi input pertanian, dan intervensi pasar guna menciptakan ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian.

Kata Kunci: pertanian, nilai tukar petani, pendapatan regional, produktivitas

PENDAHULUAN

Produksi pertanian meningkat lebih dari tiga kali lipat antara tahun 1960 dan 2015, sebagian berkat teknologi Revolusi Hijau yang meningkatkan produktivitas dan perluasan yang signifikan dalam penggunaan tanah, air, dan sumber daya alam lainnya untuk tujuan pertanian. Periode yang sama menyaksikan proses industrialisasi dan globalisasi pangan dan pertanian yang luar biasa. Namun demikian, kelaparan dan kekurangan gizi yang terus-menerus dan meluas tetap menjadi tantangan besar di banyak bagian dunia. Memperluas produksi pangan dan pertumbuhan ekonomi seringkali berdampak besar pada lingkungan alam. Hampir setengah dari hutan yang pernah menutupi bumi kini hilang. Sumber air tanah berkurang dengan cepat. Keanekaragaman hayati telah sangat terkikis. Setiap tahun, pembakaran bahan bakar fosil melepaskan miliaran ton gas rumah kaca ke atmosfer, yang bertanggung jawab atas pemanasan global dan perubahan iklim. Krisis ini membuat beberapa negara agraria menjalankan beberapa program untuk menciptakan keberlanjutan pertanian dengan tetap melindungi kelestarian lingkungan. Sebab, sektor pertanian adalah satu sektor unggulan yang mampu menciptakan ketahanan pangan dunia dan berdampak pada perekonomian nasional negara produsen.

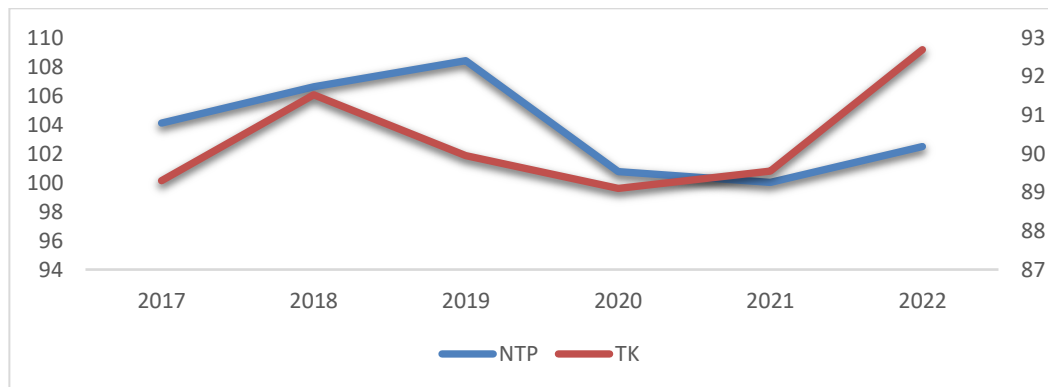
Indonesia memiliki sektor unggulan yaitu pertanian yang menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar nasional dan sektor yang mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian juga menjadi salah satu penunjang bagi sektor lainnya. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2021) menjelaskan bahwa sektor pertanian pada tahun 2020 berada pada urutan ketiga dalam menyumbang perekonomian Jawa Timur, yakni 11,90 persen. Meskipun demikian, dalam prakteknya masih banyak kendala yang dialami oleh petani di berbagai macam komoditas yang mereka olah. Kendala yang sering terlihat yaitu perubahan musim yang tidak pasti, teknik budidaya yang kurang presisi, rantai niaga yang merugikan petani, alih fungsi lahan, modal pengelolaan lahan pertanian (Supriyadi, 2021). Selain itu, salah satu alasan sektor pertanian Indonesia sulit untuk berkembang yaitu adanya ketergantungan impor, krisis regenerasi petani muda, kebijakan pertanian. Namun, program dan kebijakan yang telah digulirkan masih belum sepenuhnya berjalan secara terpadu, efisien dan efektif (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI, n.d.).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Jawa Timur merupakan penghasil beras terbesar dengan produksi 13,13 juta ton beras atau 16,1% dari total produksi beras nasional. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pemasok pangan terbesar bagi masyarakat Indonesia. Pasokan pangan tersebut dihasilkan dari sektor pertanian maju di setiap kota kabupaten di wilayah tersebut. Peningkatan produktivitas sektor pertanian khususnya tanaman pangan menyebabkan peningkatan pendapatan petani yang membantu petani keluar dari belenggu kemiskinan. Hal ini juga didukung dengan ketersediaan lahan untuk dikelola, sebab dengan ketersediaan lahan tanam semakin banyak selain mampu menjaga ketahanan pangan juga dapat membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Namun, isu yang berkembang di sektor pertanian terkait degradasi lahan. Degradasi lahan, melalui praktik pertanian yang tidak tepat, dapat menyebabkan penurunan sementara atau permanen dalam kapasitas produksi lahan. Di Indonesia, beberapa penyebab umum degradasi lahan, antara lain kegiatan pembukaan lahan, praktik pertanian yang buruk yang menyebabkan penipisan unsur hara tanah, irigasi yang tidak tepat, pencemaran tanah, dan penurunan kualitas badan air (Leimona et al., 2015; Rajagukguk, 2021).

Perencanaan pembangunan yang baik harus mencakup strategi komprehensif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di sektor pertanian di Jawa Timur. Ini mencakup kebijakan tata ruang yang melindungi lahan pertanian, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian, pengembangan teknologi dan penyuluhan yang lebih efektif, stabilisasi harga komoditas, serta peningkatan akses kredit dan pendanaan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, pertanian di Jawa Timur dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur.

Sektor pertanian di Jawa Timur pada tahun 2022 masih memberikan kontribusi cukup besar yaitu 11,11 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur atau terbesar ketiga setelah industri pengolahan (30,60 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18,67 persen) (BPS Provinsi Jawa Timur, 2023). Selain itu, berdasarkan data hasil olah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas Agustus 2022) pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor pertanian juga besar, yaitu mencapai 31,31 persen (Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur, 2022).

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja agenda pembangunan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa rata-rata NTP Jawa Timur tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,47 persen dibanding tahun 2021 yaitu dari 100,02 menjadi 102,49 (Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur, 2022). Kenaikan tersebut disebabkan karena kenaikan indeks harga yang diterima petani (6,52 persen) lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (3,95 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2022, secara umum lebih tinggi dibanding tahun 2021.



Gambar 1 Nilai Tukar Petani dan Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada penelitian ini juga mempertimbangkan variabel tenaga kerja sektor pertanian dalam perannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian merupakan syarat penting untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang merupakan bagian dari PDB dari sektor pertanian (Kementerian Pertanian, 2020; Syauqy & Pratomo, 2018). Peningkatan jumlah tenaga kerja terampil berdampak kecil terhadap PDB riil, dan peningkatan keterampilan di sektor pertanian saja tidak memiliki dampak yang nyata di tingkat nasional (Cheong et al., 2013; Ibrahim & Mazwan, 2020). Pertanian mempekerjakan sebagian besar pekerja tidak terampil, dan akibatnya, hasil di sebagian besar industri pertanian turun.

Selain itu kemajuan teknologi mesin di sektor pertanian mendorong upah tenaga kerja pertanian dan akibatnya mendorong pertumbuhan PDB. Tata kelola anggaran sebagai salah satu instrumen pelaksanaan pembangunan yang perlu direncanakan karena berdampak pada sumber daya pertanian dan proses sosial ekonomi di pedesaan. Faktor kelembagaan dan rantai pasok yang perlu mendapat perhatian penting karena menghubungkan petani, pemasok, pemerintah, swasta dan konsumen (FAO United nations Rome, 2017).

Visi Kementerian Pertanian RI (Kementan) dalam pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan sektor pertanian yang mandiri, maju, dan sejahtera dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. (Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/Rc.020/M/8/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, 2021) menjelaskan visi yang dimaksud yaitu meliputi: (1) mencapai kesejahteraan petani melalui perlindungan dan pemberdayaan petani; (2) mewujudkan ketahanan pangan dengan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, memenuhi konsumsi masyarakat; dan (3) meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian melalui peningkatan daya saing dan peningkatan produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.

Beberapa studi empiris juga telah menjelaskan bagaimana sektor pertanian berpengaruh pada keberlangsungan perekonomian baik nasional maupun regional dengan melibatkan variabel pendukung. (Utari et al. (2020) menjelaskan variabel produktivitas dan variabel luas panen secara individual berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Masalah tanah sangat sentral dalam keputusan investasi di bidang pertanian. Isu penguasaan dan pemilihan tanah berpotensi menimbulkan konflik agraria yang merupakan risiko investasi yang berakibat investasi swasta di sektor hulu pertanian masih terbatas (Pasaribu et al., 2021). (Yuli Arma Andika (2021) menjelaskan secara simultan variabel tenaga kerja, variabel luas lahan, variabel modal, variabel pupuk, dan variabel kartu bertani berpengaruh signifikan dan berhubungan positif untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman. (Paramithasari et al. (2021) menunjukkan nilai *Location Quotient* (LQ) sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur pada saat sebelum pandemi Covid-19 adalah 0,77 yang menandakan bahwa sektor pertanian tergolong sektor non basis saat Covid-19 mewabah. Hal ini terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian yang kurang memihak sisi pertanian padahal Jawa Timur termasuk salah satu wilayah yang memiliki produksi pertanian terbesar. Hasil analisis (Ibrahim & Mazwan (2020) menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Jawa Timur

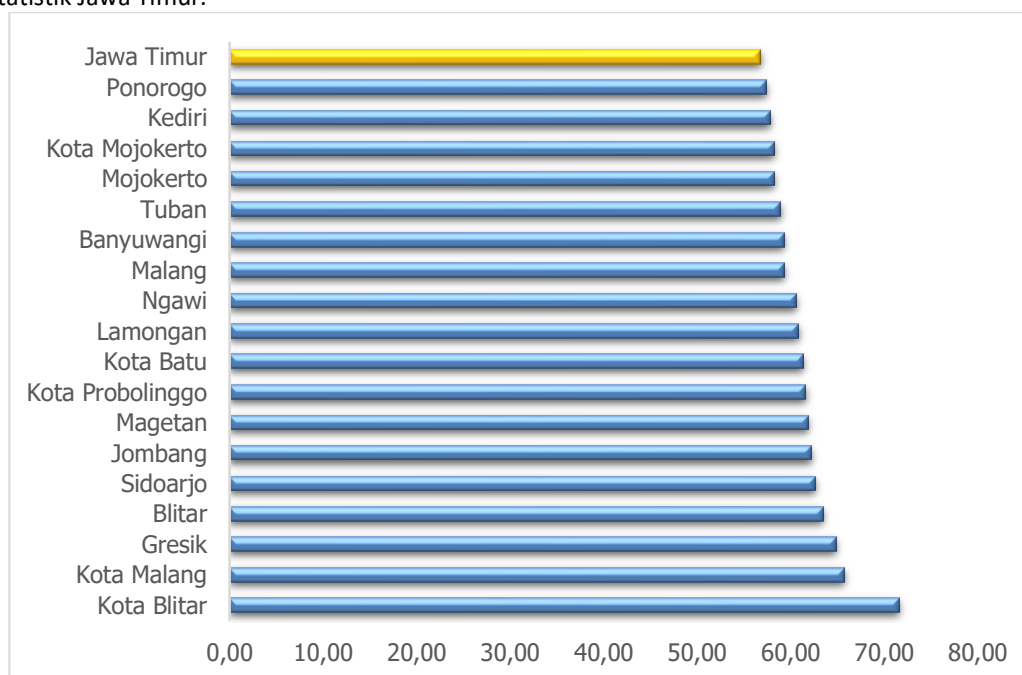
didominasi oleh tiga sektor ekonomi utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan/ perbaikan. Pola transformasi struktural pertanian di Provinsi Jawa Timur berada pada sektor jasa informal (sektor pertanian menuju sektor industri), sedangkan transformasi struktural penduduk dan lapangan kerja di provinsi ini masih pada sektor primer atau sektor pertanian (Meilia Fadlina et al., 2013).

Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Penetapan kenaikan dan penurunan nilai tukar beras petani adalah produktivitas, harga gabah, harga barang konsumsi, dan harga pupuk, nilai tukar petani atas konsumsi pangan dan nonpangan, dan biaya produksi. (Riyadh (2015) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi NTP di Sumatera Utara adalah: produktivitas, lahan, biaya tenaga kerja, harga komoditas, dan harga pupuk. Skema syariah dapat digunakan sebagai alternatif baru untuk membantu sektor pertanian bebas bunga dan bagi hasil (Keumala & Zainuddin, 2018). (Meilia Fadlina et al. (2013) menjelaskan teknis perencanaan dan pelaksanaan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah, perguruan tinggi, praktisi dan petani. Selain itu, juga perlu faktor pendukung, diantaranya potensi SDA, dukungan sosial kemasyarakatan, dan pendukung lainnya seperti media massa.

Berdasarkan studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi faktor apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Jawa timur, sehingga dapat diketahui perencanaan pembangunan yang mendorong keberlanjutan sektor pertanian Jawa Timur.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan *cross section* 18 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dengan *time series* tahun 2017-2022. Pemilihan 18 kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan tingkat produktivitas tertinggi di atas nilai produktivitas Provinsi Jawa Timur untuk tanaman pangan khususnya komoditas padi (Gambar 2). Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.



Gambar 2 Produktivitas Tanaman Pangan (padi) Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023

Spesifikasi model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\log PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log PKP_{it} + \beta_2 NTP_{it} + \beta_3 TK_{it} + \beta_4 Prod_{it} + e_i$$

Log PDRB adalah nilai logaritma produk domestik regional bruto Kabupaten Kota Jawa Timur atas dasar harga berlaku; log PKP adalah nilai logaritma dari pendapatan pertanian, kehutanan, dan perikanan kabupaten dan kota di Jawa Timur atas harga berlaku; NTP adalah nilai tukar petani; TK adalah persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian Jawa Timur; Prod adalah produktivitas tanaman pangan (padi); e : error term; it: cross section dan time series: β_0 adalah konstanta; $\beta_{1,2,3,4}$: parameter slop.

Terdapat tiga model yang akan dilakukan untuk pemodelan regresi data panel pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yaitu *Common Effect Model* (CEM) atau juga dikenal dengan *Panel Least Squares* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya memilih model terbaik dari ke-3 model tersebut menggunakan Uji Chow untuk mencari model terbaik antara PLS dengan FEM, Uji Hausman mencari model terbaik antara REM dengan FEM, dan Uji *Lagrange Multiplier* untuk mencari model terbaik antara REM dengan PLS. Dalam analisis tersebut pengolahan data menggunakan aplikasi Eviews 8.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari sektor pertanian dalam dinamika perekonomian regional Jawa Timur. Hasil analisis yang pertama yaitu uji statistik deskriptif yang menjelaskan gambaran dari variabel penelitian yang terdiri dari nilai minimal, nilai maksimal dan penyebaran data. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 1, nilai minimal PDRB 5782.400 yaitu yang dimiliki Kota Blitar tahun 2017, sedangkan PDRB maksimum yaitu 245222.5 dimiliki Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Variabel PKP memiliki nilai maksimum 26183210 yaitu dimiliki Kabupaten Banyuwangi tahun 2022, sedangkan nilai minimum PKP 37964.05 dimiliki oleh Kota Mojokerto tahun 2017.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	PDRB	PKP	NTP	TK	PROD
Mean	56870.26	7709350.	103.7305	90.35167	60.43278
Median	40161.70	6730060.	103.2838	89.75000	60.12500
Maximum	245222.5	26183210	108.4127	92.69000	71.63000
Minimum	5782.400	37964.05	100.0133	89.10000	46.35000
Std. Dev.	51172.79	6336190.	3.028705	1.316930	4.532470

Nilai minimal nilai tukar petani 100.0133 yaitu yang dimiliki Kota Mojokerto tahun 2021, sedangkan nilai tukar petani maksimum yaitu 108.4127 dimiliki Kabupaten Kediri tahun 2019. Variabel TK memiliki nilai maksimum 92.69 yaitu dimiliki Kabupaten Kediri tahun 2022, sedangkan nilai minimum TK 89.1 dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo tahun 2020. Produktivitas tanaman pangan (padi) memiliki nilai maksimum 71.63 yaitu dimiliki oleh Kota Blitar tahun 2022, sedangkan nilai minimum produktivitas adalah 46.35 dimiliki Kota Blitar tahun 2017. Hasil selanjutnya terkait persebaran data yang menunjukkan hasil bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai reratanya. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada mean menandakan bahwa tidak terjadi penyimpangan data pada data penelitian ini.

B. Hasil Analisis Estimasi Data Panel

Analisis selanjutnya adalah estimasi data panel yang terdiri dari *Panel Least Squares*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Tabel 2 menunjukkan hasil estimasi *Panel Least Square* (PLS). Berdasarkan hasil estimasi PLS bahwa pendapatan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan regional bruto Jawa timur yang dibuktikan dengan nilai koefisiensi positif dan nilai probabilitasnya < 0.05 . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar pendapatan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan maka akan meningkatkan PDRB Jawa Timur secara signifikan.

Nilai tukar petani pada estimasi PLS menunjukkan pengaruh negatif terhadap PDRB Jawa Timur, namun pengaruhnya tidak signifikan yang dibuktikan dengan nilai probabilitas > 0.05 . Hasil tersebut mengindikasikan bahwa nilai tukar petani yang semakin kecil akan berpengaruh pada peningkatan PDRB Jawa Timur, namun tidak signifikan. Persentase tenaga kerja informal pada sektor pertanian dan produktivitas tanaman pangan (padi) pada estimasi PLS yaitu memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan PDRB Jawa Timur yang dibuktikan dengan nilai koefisiensi positif, namun dampaknya tidak kuat sebab nilai probabilitasnya > 0.05 .

Tabel 2 Hasil Estimasi *Panel Least Squares*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGPKP	0.313512	0.044681	7.016630	0.0000
NTP	-0.014050	0.026336	-0.533481	0.5949
TK	0.073150	0.060572	1.207655	0.2299
PROD	0.027754	0.017407	1.594419	0.1139
C	-1.025105	5.660534	-0.181097	0.8566
R-squared	0.336960	Mean dependent var		10.53515
Adjusted R-squared	0.311211	S.D. dependent var		0.967656
F-statistic	13.08627	Durbin-Watson stat		0.149950
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) pada Tabel 3, variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB Jawa Timur yaitu pendapatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. Pendapatan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB Jawa timur dibuktikan dengan nilai koefisiensi positif dan nilai probabilitasnya $0.02 < \alpha 0.05$. seperti halnya variabel persentase tenaga kerja informal pada sektor pertanian yang memiliki nilai koefisien positif dengan nilai probabilitas $0.01 < \alpha 0.05$. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar pendapatan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan persentase tenaga kerja informal pada sektor pertanian maka akan meningkatkan PDRB Jawa Timur secara signifikan. Nilai tukar petani pada estimasi FEM menunjukkan pengaruh negatif terhadap PDRB Jawa Timur, namun pengaruhnya tidak signifikan yang dibuktikan dengan nilai probabilitas > 0.05 yang mengindikasikan bahwa nilai tukar petani yang semakin kecil akan berpengaruh pada peningkatan PDRB Jawa timur, namun tidak signifikan. Produktivitas tanaman pangan (padi) pada estimasi FEM yaitu memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan PDRB Jawa Timur yang dibuktikan dengan nilai koefisiensi negatif, namun dampaknya tidak besar sebab nilai probabilitasnya > 0.05 .

Tabel 3 Hasil Fixed effect model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGPKP	1.448220	0.641609	2.257168	0.0265
NTP	-0.008522	0.009681	-0.880323	0.3811
TK	0.056714	0.023556	2.407664	0.0182
PROD	-0.004471	0.007105	-0.629293	0.5308
C	-15.28989	8.951854	-1.708013	0.0912
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.951566	Mean dependent var		10.53515
Adjusted R-squared	0.939739	S.D. dependent var		0.967656
F-statistic	80.45769	Durbin-Watson stat		1.474908
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil estimasi selanjutnya dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM) yang ditunjukkan pada Tabel 4. Berdasarkan hasil estimasi REM bahwa PDRB Jawa Timur dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan pertanian, kehutanan, dan perikanan; nilai tukar petani; dan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. Berdasarkan hasil estimasi REM bahwa pendapatan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB Jawa Timur yang dibuktikan dengan nilai koefisiensi positif dan nilai probabilitasnya < 0.05 . Nilai tukar petani pada estimasi REM menunjukkan pengaruh negatif terhadap PDRB Jawa Timur dan signifikan yang dibuktikan dengan nilai probabilitas < 0.05 . Hasil tersebut mengindikasikan bahwa nilai tukar petani yang semakin kecil akan berpengaruh besar pada peningkatan PDRB Jawa Timur. Persentase tenaga kerja informal pada sektor pertanian yang memiliki nilai koefisien positif dengan nilai probabilitas $0.00 < \alpha 0.05$. Produktivitas tanaman pangan (padi) pada estimasi REM yaitu memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap perkembangan PDRB Jawa Timur yang dibuktikan dengan nilai koefisiensi positif dengan nilai probabilitasnya > 0.05 .

Tabel 4 Hasil Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGPKP	0.336194	0.108025	3.112193	0.0024
NTP	-0.018290	0.007881	-2.320858	0.0223
TK	0.082801	0.018171	4.556801	0.0000
PROD	-0.000657	0.006848	-0.095971	0.9237
C	-0.082592	2.246310	-0.036768	0.9707
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.804593	0.9198
Idiosyncratic random			0.237541	0.0802

C. Hasil Analisis Pemilihan Model Terbaik

Uji selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik diantara PLS, FEM, dan REM dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Tabel 5 merupakan hasil uji Chow yaitu memilih model terbaik antara PLS dan FEM. Hasil uji Chow menjelaskan Hipotesis bahwa apabila probability chi-square $< 0,05$ maka yang dipilih adalah *model fixed*; dan apabila probability chi-square $> 0,05$ maka yang dipilih adalah model PLS. Nilai probabilitas chi-square pada uji Chow menunjukkan angka $0.000 < 0.05$, sehingga model terbaik adalah FEM.

Tabel 5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	64.194198	(17,86)	0.0000
Cross-section Chi-square	282.596345	17	0.0000

Uji Hausman disajikan pada Tabel 6 yang menjelaskan hasil terbaik antara model FEM dan REM. Uji Hausman memiliki hipotesis dalam penelitian sebagai berikut: Apabila probability chi-square random $< 0,05$ maka yang dipilih adalah model fixed; dan apabila probability chi-square random $> 0,05$ maka yang dipilih adalah model REM. Dengan demikian uji Hausman menunjukkan bahwa model REM adalah model terbaik yang dibuktikan dengan Cross-section random 1.000 yaitu > 0.05 .

Tabel 6 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000
* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.			

Pemilihan model terbaik antara REM dan PLS yaitu uji Lagrange Multiplier yang ditunjukkan pada tabel 7. Uji Lagrange Multiplier pada penelitian ini berdasarkan pendekatan Breusch-Pagan. Hipotesis yang digunakan adalah H_0 adalah Pooled Least Square (PLS) dan H_a : *Random Effect Model* (REM) nilai cross section Breusch-Pagan sebesar 0.0000, sehingga jika nilai *cross section* Breusch-Pagan < 0.005 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa model yang tepat yaitu *Random Effect Model*.

Tabel 7 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	214.3075 (0.0000)	2.405139 (0.1209)	216.7126 (0.0000)

Dengan demikian, berdasarkan pada hasil pemilihan model penelitian maka REM adalah model terbaik dalam penelitian ini. Berdasarkan model REM, semua variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB Jatim kecuali produktivitas tanaman pangan (padi). Sektor pertanian yang lebih produktif dapat memacu pembangunan ekonomi yang lebih luas, mengurangi pertumbuhan penduduk, meningkatkan peluang pendapatan non-pertanian bagi rumah tangga pedesaan, dan meningkatkan kapasitas dan kelembagaan tata kelola lahan. Namun, demikian penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh produktivitas pertanian belum menjadi faktor utama yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi regional. Produktivitas juga dapat memberikan pengaruh negatif sebagaimana nilai koefisiensi pada hasil estimasi REM. Pertumbuhan produktivitas pertanian juga dapat dikaitkan dengan laju deforestasi yang lebih tinggi, misalnya dengan meningkatkan biaya program konservasi hutan atau dengan merangsang migrasi masuk dan investasi infrastruktur jalan di daerah pedesaan sehingga secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan ekonomi regional karena adanya biaya tambahan untuk perluasan lahan (Kubitza et al., 2018). Meskipun demikian, variabel luas panen secara individual dan variabel produktivitas berpengaruh signifikan terhadap produksi padi (Utari et al., 2020).

Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian

Dalam praktiknya, para pembuat kebijakan di Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen untuk mengurangi jejak lingkungan pertanian, termasuk regulasi langsung, insentif yang menciptakan atau mengoreksi pasar, dan solusi sukarela dan informatif. Pembuat kebijakan menerapkan instrumen hukum dan peraturan, tetapi mungkin menargetkan negara bagian perkebunan dan pertanian yang cukup besar (Leimona et al., 2015). Beberapa program pemerintah yang perlu implementasi dan kontrol yang kuat supaya memberikan manfaat besar dalam keberlanjutan sektor pertanian nasional yaitu Intervensi pasar yang tidak hanya menjamin kestabilan harga jual komoditas pertanian tetapi juga menjamin ketersediaan pasar untuk menampung produksi pertanian dalam negeri dan mempromosikan komoditas Indonesia ke negara asing serta memberi bea masuk tinggi untuk impor barang pertanian yang sama di dalam negeri sehingga mampu melindungi hasil produksi dalam negeri. Standardisasi kualitas sektor pertanian juga diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas produksi, sehingga perlu tambahan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi penyuluh pertanian yang efektif untuk petani selain itu juga revitalisasi Bulog, kampus dan industri sektor pertanian dalam penetapan standar dan pelatihan kepada produsen agar produknya dapat memenuhi standar tersebut (Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015; Quincieu, 2015). Program lain yaitu subsidi input pertanian yang disalurkan secara adil dan merata kepada petani, diversifikasi pangan lokal, sarana dan prasarana yang memadai seperti irigasi dan bantuan mesin produksi serta kredit petani yang tidak memberatkan.



Gambar 3 Skema Perencanaan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Pertanian

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Pertanian digital juga menjadi terobosan baru karena memanfaatkan teknologi informasi dalam aktivitas pertanian termasuk membantu pemangku kebijakan dalam menetapkan program kerja (Quincieu, 2015; World Bank, 2020). Hal ini juga membantu meningkatkan produktivitas *on-farm* (melalui peningkatan efisiensi teknis dan alokatif), *off-farm* (profitabilitas, ekuitas, dan kelestarian lingkungan dari sistem pertanian pangan). Manfaat penerapan pertanian digital bagi petani juga membantu petani dalam pengambilan keputusan dan mitigasi petani yang lebih baik melalui penyediaan data cuaca, agronomi dan ternak yang lebih akurat, tepat waktu, dan spesifik lokasi; dan penyelarasan keputusan produksi yang lebih baik dengan kondisi pasar yang lebih luas, peluang perdagangan (World Bank, 2020).

Ada kesadaran luas bahwa adopsi dan adaptasi sistem dan praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian konservasi, agroforestri, sistem tanaman-ternak-energi terpadu dan pengelolaan hama terpadu, memerlukan inovasi teknologi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan (Litbang) (World Bank, 2020). Investasi juga diperlukan untuk mengimplementasikan dan mendukung bentuk organisasi R&D baru yang lebih dekat dengan kebutuhan petani, seperti yang disoroti misalnya melalui pengalaman sekolah lapangan petani. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, lingkungan pendukung kelembagaan sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dari sistem pertanian berkelanjutan dan untuk mendukung promosi dan penerapannya (FAO United nations Rome, 2017; Simmons et al., 2005).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur. Hasil analisis menunjukkan model REM adalah model terbaik pada penelitian ini. Hasil estimasi REM menunjukkan bahwa pendapatan pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB Jawa timur. Nilai tukar petani menunjukkan pengaruh negatif terhadap PDRB Jawa Timur dan signifikan. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Timur. Produktivitas tanaman pangan (padi) yaitu memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perkembangan PDRB Jawa Timur. Pemerintah di Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen untuk mengurangi jejak lingkungan pertanian, termasuk regulasi langsung, insentif yang menciptakan atau mengoreksi pasar, dan solusi sukarela dan informatif.

Berdasarkan hasil analisis maka perlu implementasi dengan melibatkan berbagai pihak dari petani, tengkulak, industri, swasta, pemerintah desa, pemerintah daerah dalam pengelolaan dan distribusi produk pertanian dengan struktur kelembagaan yang terorganisir dan terkontrol serta adanya evaluasi dalam implementasi program kerja. Rekomendasi program kerja dalam pembangunan ekonomi regional berbasis pertanian yang disarankan berdasarkan penelitian ini pertanian konservasi, agroforestri, standardisasi kualitas sektor pertanian, inovasi teknologi dan investasi, kelembagaan, pertanian digital, subsidi input pertanian, dan intervensi pasar. Limitasi penelitian ini hanya secara kuantitatif dengan data sekunder, sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penelitian kualitatif yang melibatkan berbagai pihak yaitu petani, pemerintah, swasta dan pihak lainnya yang berkepentingan guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal guna menciptakan ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian.

REFERENSI

1. Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur. (2022). *Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Timur 2022*.
2. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI. (n.d.). Permasalahan Dan Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian. https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PERMASALAHAN_DAN_UPAYA_PENINGKATAN_PRODUKTIVITAS_PERTANIAN20140821143024.Pdf.
3. BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2023*. <https://jatim.bps.go.id>
4. Cheong, D., Jansen, M., & Peters, R. (2013). Trade, Productivity, and Employment Linkages in Indonesian Agriculture. *International Labour Office and United Nations Conference on Trade and Development*.
5. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. (2015). *Road Map dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur*.
6. FAO United nations Rome. (2017). *The future of food and agriculture, Trends and challenges*.

7. Ibrahim, J. T., & Mazwan, M. Z. (2020). Structural Transformation of Agricultural Sector in East Java Indonesia. *SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS)*, 7(3). www.internationaljournalsssrg.org
8. Kementerian Pertanian. (2020). Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian. *Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian*, 68(1), 122.
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/rc.020/M/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, (2021).
10. Keumala, C. M., & Zainuddin, Z. (2018). Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 129–149.
11. Kubitza, C., Krishna, V. V., Urban, K., Alamsyah, Z., & Qaim, M. (2018). Land Property Rights, Agricultural Intensification, and Deforestation in Indonesia. *Ecological Economics*, 147, 312–321. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.021>
12. Leimona, B., Amaruzaman, S., Arifin, B., Yasmin, F., Hasan, F., Agusta, H., Sprang, P., Jaffee, S., & Frias, J. (2015). *Indonesia's "Green Agriculture" Strategies and Policies: Closing the Gap between Aspirations and Application* (ICRAF Occasional Paper No. 23).
13. Meilia Fadlina, I., Supriyono, B., & Soeaidy, S. (2013). Perencanaan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu) Sustainable Development of Agrocultural (Studies on Organic Agricultural Development in Batu City). *J-PAL*, 4(1).
14. Paramithasari, I., Widayanti, S., Yuliati, N., & Wijayati, D. (2021). Agricultural Sector Performance In East Java Province During The Covid-19 Pandemic. *Ziraa'ah*, 46(3), 428–440.
15. Pasaribu, D. ;, Murwani, A. ;, & Setiawan, I. (2021). Foreign Direct Investment in Indonesia's Agriculture Standard-Nutzungsbedingungen. *Policy Paper, No. 35, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Jakarta*. <http://hdl.handle.net/10419/249415>
16. Quincieu, E. (2015). Summary of Indonesia's Agriculture, Natural Resources, and Environment Sector Assessment. *ADB PAPERS ON INDONESIA No 8*. www.adb.org;
17. Rajagukguk, W. (2021). Agriculture and regional economic growth in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 258. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125806037>
18. Riyadh, M. I. (2015). Analysis of Farmers Term of Trade of Crops Commodities in North Sumatra. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 17–32.
19. Simmons, P., Winters, P., & Patrick, I. (2005). An analysis of contract farming in East Java, Bali, and Lombok, Indonesia. *Agricultural Economics*, 33, 513–525.
20. Supriyadi. (2021). *6 Masalah Menahun Pertanian di Indonesia yang Tak Kunjung Selesai Sumber*. <https://tanjungmeru.kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/547>
21. Syauqy, M. F., & Pratomo, D. S. (2018). Analisis Terhadap Berkurangnya Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Pedesaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5193>
22. Utari, D. T., Yuliana, T., & Pasca Hendradewa, A. (2020). A Panel Data Analysis of Rice Production in Ngawi Regency, East Java. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 474.
23. World Bank. (2020). *Indonesia Agro-Value Chain Assessment Background Paper 2 Issues and Options in Promoting Digital Agriculture*.
24. Yuli Arma Andika. (2021). Determinants of Production of Agricultural Commodities of Food Crops in Bojonegoro Regency (Case Study of Farmers Accessing Tani Card and Non Accessing Tani Card). *East Java Economic Journal*, 5(1), 58–74. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v5i1.60>.



Tersedia secara online pada
<https://jurnalpradah.com/>



Si Delman

Solusi Digital untuk Pelayanan Publik yang Efisien di Desa

Suwarno¹

Pemerintah Desa Tulungrejo, Kabupaten Blitar, Indonesia¹
warnosu3@gmail.com

Abstract

The government paradigm continues to evolve with the changing times. This shift demands an improvement in the quality of public services provided to the community. This is a consequence of the transformation of the government's role from territorial authority to public servant. Through in-depth interviews with the residents of Tulungrejo Village, Gandusari District, Blitar Regency, this demand is seen as an obligation for the village government to fulfill. In the digital era, the community, as beneficiaries of public services, increasingly expects to receive the needed services quickly, accurately, and efficiently, including those in rural areas. Technological advancements have compelled rural communities to seek all government services directly from their village office. This reality demands that village governments continually transform and innovate to meet the challenges of providing excellent services to their communities. Si Delman, as a system that integrates various existing services, strives to address this challenge. Although data indicates an improvement in service quality through the implementation of this system, the real challenge lies in the mindset of the village officials themselves. The focus is on shifting their perspective as public servants to continuously enhance their competencies in information and communication technology, solely to provide optimal services to the community.

Keywords: Government paradigm, Public services, Community, Si Delman, Village government

Abstrak

Paradigma Pemerintah terus berubah seiring perkembangan zaman. Perubahan ini menuntut pula peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari beralihnya pengertian Pemerintah yang awalnya sebagai penguasa wilayah kini menjadi pelayan publik atau masyarakat. Melalui wawancara mendalam kepada masyarakat Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, tuntutan ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah Desa. Di era digital masyarakat sebagai penerima manfaat layanan publik terus berharap dapat mendapat layanan yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan efisien. Tidak terkecuali masyarakat desa. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak tuntutan masyarakat desa untuk mendapatkan semua layanan pemerintah cukup dari kantor desa. Kenyataan ini yang menuntut Pemerintah Desa untuk terus bertransformasi dan berinovasi dalam menjawab tantangan dalam menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat desa. Si Delman sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan yang telah ada berupaya menjawab tantangan ini. Meskipun data menunjukkan peningkatan kualitas layanan melalui implementasi sistem ini namun, tantangan yang sebenarnya adalah pada mindset perangkat desa itu sendiri. Bagaimana membuka pola pikir perangkat desa sebagai pelayan masyarakat di desa untuk terus

meningkatkan kompetensi diri baik di bidang teknologi informasi maupun komunikasi, semata-mata sebagai upaya menghadirkan pelayanan maksimal kepada Masyarakat

Kata Kunci: Paradigma pemerintah, Layanan publik, Masyarakat, Si Delman, Pemerintah desa

PENDAHULUAN

Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, digitalisasi layanan masyarakat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Digitalisasi tidak hanya menyediakan hiburan dan kenyamanan, tetapi juga menjadi alat penting dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Di era ini pelayanan publik berbasis digitalisasi seolah telah menjadi hal yang wajib diterapkan oleh instansi pemerintahan.

Hal ini tidak lepas perubahan paradigma tentang Pemerintah. K.J.S. Edralin pada tahun 1947 menuliskan dimana istilah *government* telah digantikan dengan terminologi *governance*. Pergantian ini secara khusus menggambarkan perubahan peran pemerintah dari pemberi pelayanan (*provider*) kepada *enabler* atau fasilitator dan perubahan kepemilikan dari milik negara menjadi milik rakyat.

Kondisi ini menempatkan publik bukan hanya sebagai objek dari layanan namun juga sebagai subjek yang harus menjadi perhatian. Publik yang didefinisikan sebagai “any group of people who share interest concerns” (Zawawi, 2000) yang dapat diartikan sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan dan perhatian yang sama. Hal ini senada disampaikan Moore (1981) bahwa publik adalah sekelompok orang dengan kepentingan sama serta memiliki pendapat terhadap suatu isu yang menimbulkan pertentangan kontroversial.

Paradigma ini menuntut pemerintah untuk senantiasa berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Barzelay, Paradigma Birokrasi yang sentralistik telah terbina begitu lama dan mendalam dan bahkan menjadi kepribadian beberapa aparat kunci di instansi pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan reformasi administrasi publik, meninggalkan kelemahan paradigma lama dan mempelajari, memahami serta mengadopsi paradigma baru.

Begitu pula yang terjadi dalam paradigma pemerintahan di level desa. Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat paling bawah Pemerintah Desa kerap terbentur dengan tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya. Pemerintah Desa diminta mampu menyelesaikan semua kebutuhan layanan warga.

Di sisi lain dalam mengikuti perkembangan teknologi seringkali Pemerintah Desa tertinggal dan kesulitan. Meskipun baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seolah-olah meluncurkan digitalisasi layanan dalam bentuk aplikasi mobile maupun berbasis website, nyatanya diperlukan suatu sistem yang mengintegrasikan layanan-layanan tersebut. Padahal harusnya Inovasi digital di desa memiliki potensi untuk meningkatkan akses terhadap informasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan (Sutrisno, E. 2020)

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Pemerintah Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemerintah Desa memiliki arti sebagai pemerintah terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Sedangkan menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa sendiri adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sedangkan Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Inovasi

Menurut KBBI Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau juga bisa diartikan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya meliputi gagasan, metode, atau alat. Sedangkan menurut Everett M. Rogers (2015) melalui bukunya yang berjudul *Diffusion of Innovation* mengkaji hampir 4000 publikasi difusi untuk merivisi teori tentang proses keputusan inovasi sebelumnya. Rogers mendefinisikan Inovasi sebagai gagasan, praktik, atau objek yang dipandang baru oleh individu atau unit adopsi lain.

Sedangkan Karakteristik Inovasi menurut Rogers adalah:

1. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif
Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.
2. *Compatibility* atau Kesesuaian Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
3. *Complexity* atau Kerumitan Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
4. *Triability* atau Kemungkinan dicoba Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase "uji publik" dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.
5. *Observability* atau Kemudahan diamati Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Inovasi Layanan Publik Sistem Desa Dalam Genggaman (Si Delman)

Si Delman atau Sistem Desa Dalam Genggaman merupakan digitalisasi layanan berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses atau menunggalkan berbagai aplikasi yang telah dibangun. Sistem ini dapat diakses di situs www.tulungrejo-blitar.desa.id. Website ini mewadahi berbagai layanan lintas sektor yang diperlukan terutama oleh masyarakat desa seperti, layanan BPJS Kesehatan, Cek Bantuan Sosial, Pengurusan Nikah, Peta Desa, Pasar Online, Administrasi Kependudukan dll. Sistem ini bersifat terbuka dimana masyarakat dapat mengusulkan tambahan fitur yang diperlukan sehingga fleksibilitasnya tinggi. Hal ini mengingat pemenuhan layanan dasar di desa, seperti akses terhadap air bersih, pendidikan, dan kesehatan, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Widyastuti, S., & Handayani, A., 2020).

Tujuan adanya Si Delman diantaranya:

- a) Meningkatkan Aksesibilitas
- b) Meningkatkan Efisiensi
- c) Meningkatkan Transparansi
- d) Meningkatkan Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat
- e) Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat
- f) Mendorong Inovasi
- g) Meningkatkan Efisiensi Anggaran

Sedangkan manfaat Si Delman yaitu:

- a) Masyarakat dapat mengakses layanan yang tidak terbatas jam kerja dan tempat layanan
- b) Menjadi alternatif masyarakat dalam mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
- c) masyarakat dapat mengusulkan fitur tambahan yang dibutuhkan secara gratis.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi untuk mengeksplorasi dan menganalisis optimalisasi layanan desa melalui inovasi Si Delman. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan dampak dari implementasi inovasi layanan publik ini.

Pengamatan ini dilaksanakan di Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, yang dipilih karena telah mengimplementasikan inovasi Si Delman dalam layanan desa. Lokasi ini menyediakan kasus yang relevan untuk mengeksplorasi berbagai aspek implementasi dan dampaknya. Subjek penelitian meliputi:

1. Pemerintah Desa: Kepala desa, perangkat desa, dan staf administrasi yang terlibat dalam penerapan inovasi. Subjek ini dipilih karena pada pelaksanaan teknisnya Pemerintah Desa dalam hal ini Perangkat Desa yang mengampu Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelayan publik merupakan subjek utama sebagai operator dari sistem ini.
3. Masyarakat Desa: Warga yang menjadi pengguna layanan publik yang dipengaruhi oleh inovasi Si Delman. Subjek ini dipilih karena masyarakat desa merupakan objek layanan atau penerima manfaat dari layanan yang disediakan. Selain itu Inovasi di tingkat desa tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Setiawan, A, 2019)

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam
Dilakukan dengan pemangku kepentingan utama seperti kepala desa, perangkat desa, dan staf administrasi untuk mendapatkan wawasan tentang proses implementasi, tantangan yang dihadapi, dan dampak teknologi digital. Wawancara juga dilakukan dengan masyarakat untuk mengevaluasi bagaimana teknologi mempengaruhi akses dan kualitas layanan.
2. Pencatatan
Peneliti melakukan pencatatan kuantitas pemohon layanan selama satu pekan sebelum dan sesudah inovasi ini diterapkan. Pencatatan ini meliputi jenis layanan yang diminta serta selesai atau tidaknya layanan yang diminta di kantor desa.
4. Survey kepuasan
Selain melakukan mengumpulkan data kuantitatif perbandingan jumlah layanan yang dapat diselesaikan setelah dan sebelum implementasi si delman, Survey juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran rinci kepuasan masyarakat setelah dan sebelum adanya sistem ini.

Metode Analisis

Kuantitas pemohon atau pemerlu layanan harus diketahui untuk dapat mengukur dampak dari implementasi inovasi. Sementara data kualitas inovasi layanan didapatkan dari mengetahui seberapa inovasi ini diperlukan serta dapat menyelesaikan kebutuhan masyarakat akan layanan pemerintah cukup di kantor Desa.

Sedangkan analisa hasil wawancara kepada pemangku kepentingan dapat dijadikan gambaran bagaimana inovasi dapat dengan lancar diterapkan di Desa, sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas layanan desa. Analisa ini diperkuat dengan survey kepuasan masyarakat yang bertujuan membandingkan tingkat kepuasan sebelum dan sesudah diimplementasikannya sistem ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pengamatan dan pendataan yang dilakukan didapatkan data sebagai berikut :

**Tabel 1: Data Pemohon Layanan Publik Desa Tulungrejo 8 s.d. 12 Januari 2024
(sebelum Implementasi Si Delman)**

Hari, Tanggal	Jenis Layanan								Total Pemohon	Ket	
	Adminduk	BPJS	Bansos	Pendaftaran Puskesmas	UMKM	Nikah	Pertanahan	Lain-lain		Selesai	Tidak Selesai
Senin, 8 Januari 2024	6	1	1	0	3	0	1	0	12	7	5
Selasa, 9 Januari 2024	3	3	2	1	0	1	0	0	10	4	6
Rabu, 10 Januari 2024	1	2	0	2	2	1	1	0	9	3	6
Kamis, 11 Januari 2024	8	2	1	0	2	2	0	1	16	10	6
Jumat, 12 Januari 2024	2	0	1	0	0	0	0	0	3	2	1
Total Pemohon	20	8	5	3	7	4	2	1	50	26	24

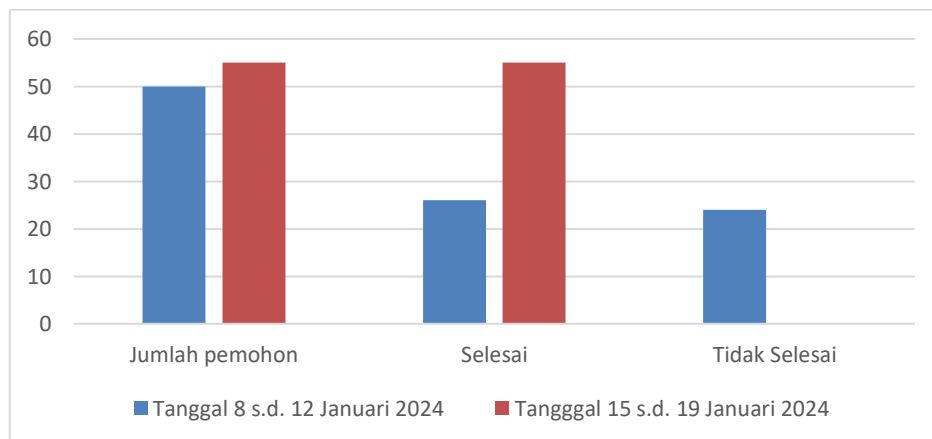
Sumber: Pemerintah Desa Tulungrejo, 2024

**Tabel 2: Data Pemohon Layanan Publik Desa Tulungrejo 15 s.d. 19 Januari 2024
(Setelah Implementasi Si Delman)**

Hari, Tanggal	Jenis Layanan								Total Pemohon	Ket	
	Adminduk	BPJS	Bansos	Pendaftaran Puskesmas	UMKM	Nikah	Pertanahan	Lain-lain		Selesai	Tidak Selesai
Senin, 15 Januari 2024	8	4	0	1	2	0	0	0	15	15	0
Selasa, 16 Januari 2024	5	2	1	1	1	0	0	2	12	12	0
Rabu, 17 Januari 2024	4	3	2	1	0	0	0	1	11	11	0
Kamis, 18 Januari 2024	6	2	0	0	1	1	0	1	11	11	0
Jumat, 19 Januari 2024	3	1	0	1	1	0	0	0	6	6	0
Total Pemohon	26	12	3	4	5	1	0	4	55	55	0

Sumber: Pemerintah Desa Tulungrejo, 2024

Dari data data diatas dapat diamati jumlah pemohon dan jenis layanan yang diminta oleh masyarakat Desa Tulungrejo ke Kantor Desa dalam rentang waktu 2 pekan atau 5 hari kerja.



Gambar 1. Perbandingan Data Sebelum dan Sesudah Implementasi Si Delman

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Diketahui pula kuantitas permohonan layanan yang diminta masyarakat dapat diselesaikan atau tidak. Secara normatif layanan yang tidak dapat diselesaikan, petugas akan mengarahkan masyarakat agar menuju ke kantor atau dinas teknis penyedia layanan tersebut.

Inovasi layanan Sistem Desa Dalam Genggaman merupakan digitalisasi layanan berbasis website yang memiliki fitur diantaranya pelayanan cetak adminduk, BPJS, Cek Bansos, Antrian Online Puskesmas dll. Inovasi ini memungkinkan menunggalkan layanan dari berbagai dinas teknis atau lembaga lain dalam satu tempat dan satu sistem.

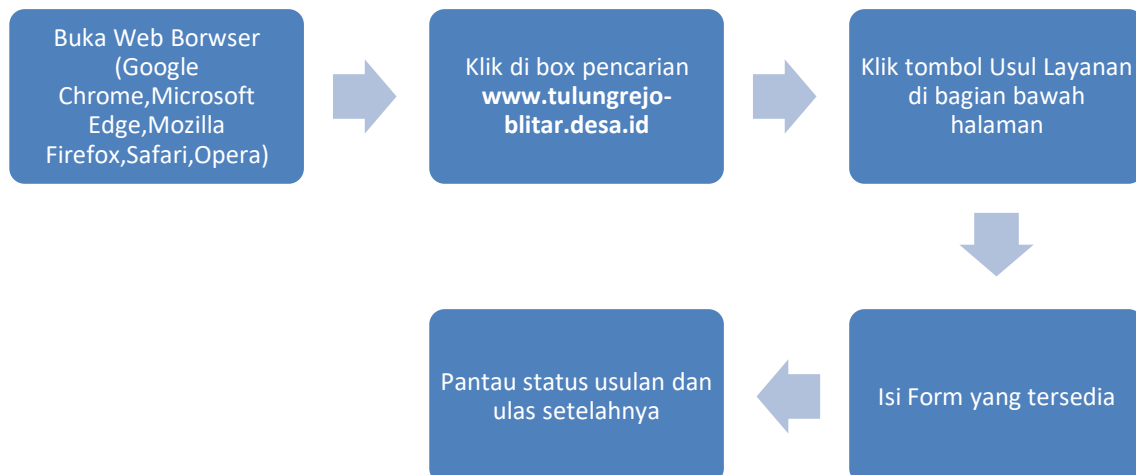


Gambar 2. Tampilan Dashboard Si Delman

Dari hasil pencatatan dan wawancara diperoleh hasil bahwa pelayanan yang awalnya tidak dapat diselesaikan di desa setelah implementasi inovasi ini kini dapat diselesaikan cukup di kantor desa bahkan di rumah pemohon. Masyarakat dapat mengakses layanan Si DELMAN melalui web browser dengan cara:



Sedangkan untuk mengusulkan penambahan fitur masyarakat dapat dilakukan dengan cara:



KESIMPULAN

Di era digital ini masyarakat semakin menuntut efektifitas layanan. Masyarakat menuntut semua layanan pemerintah yang diperlukan harus diselesaikan di Kantor Desa. Sementara itu sistem digitalisasi layanan yang diluncurkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat cenderung berdiri sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. Si Delman atau Sistem Desa Dalam genggaman merupakan sistem yang dibangun dalam rangka mendesimisasi digitalisasi layanan yang telah ada sekaligus menunggalkan berbagai layanan yang telah diluncurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sistem ini dibangun dan diterapkan di desa Tulungrejo kecamatan andusari Kabupaten Blitar. Dengan Sistem ini masyarakat desa dapat memperoleh barenaka ragam layanan dari berbagai Stakeholder cukup dari gawai yang mereka genggam.

Inovasi ini telah memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pemerlu layanan publik. Dengan inovasi ini masyarakat dapat mendapatkan berbagai layanan yang awalnya harus bepergian ke kantor dinas teknis terkait, kini hanya perlu ke kantor desa atau dari rumah. Inovasi ini terbukti dapat mengurangi jumlah layanan yang tidak dapat diselesaikan di desa. Di sisi lain dengan hadirnya inovasi ini Pemanngku kepentingan di tingkat desa dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Edralin, K. J. S. (1947). The changing concept of government
2. Stockwell, S. (2000). "Public Relations in Government" Dalam Johnston, J. &Zawawi, C. (eds) Public Relations: Theory and Practice. Sydney: Allen & Unwin
3. Johnston, J. & Zawawi, C. (2000). „What is Public Relations?“ Dalam Johnston, J & Zawawi, C (eds). Public Relations: Theory and Practice. Sydney: Allen & Unwin
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244.
6. Rogers, E. M. (2015). Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 101.
8. Setiawan, A. (2019). Pengembangan inovasi berbasis komunitas di desa. *Jurnal Inovasi dan Kebijakan*, 5(1), 32-45.
9. Sutrisno, E. (2022). Digitalisasi desa: Peluang dan tantangan dalam pembangunan masyarakat. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 10(1), 55-70.
10. Widyastuti, S., & Handayani, A. (2020). Evaluasi layanan publik di desa: Pendekatan partisipatif untuk pembangunan yang berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(4), 305-320



Tersedia secara online pada
<https://jurnalpradah.com/>



Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Air Sendang Bulus Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Rony Pujo Santoso¹, Bambang Triono², Yusuf Adam Hilman³, Irvan Nur Ridho⁴

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo ¹²³⁴
545471adamongis@gmail.com

Abstract

Sendang Bulus is a natural tourist attraction that was formed because of a naturally formed water source which then formed a place called spring. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques in this research include observation, interviews and documentation. From the results of data analysis carried out by researchers in Pager Village, it can be concluded that the Pager Village government has allocated funds in the APBDes for the development of tourist attractions in Sendang Bulus, with the aim of increasing regional income and supporting economic growth. The government plans to build a cultural education gallery this year, in accordance with the master plan set by the Ministry of Tourism and the Ministry of Villages. The government aims to improve the community's economy, especially in Sendang Bulus and Pager Villages, by improving infrastructure and accessibility. This development is expected to increase income, create jobs and improve the overall welfare of society.

Keywords: Tourist Attractions, Policy, Development

Abstrak

Sendang Bulus merupakan wisata alam yang terbentuk karena adanya sumber air yang terbentuk secara alami yang kemudian membentuk suatu tempat yang di sebut sendang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisis data yang dilakukan peneliti di Desa Pager dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah Desa Pager telah mengalokasikan dana dalam APBDes untuk pengembangan tempat wisata di Sendang Bulus, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berencana membangun galeri pendidikan budaya pada tahun ini, sesuai dengan rencana induk yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Desa. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Desa Sendang Bulus dan Pager, dengan meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Daya Tarik Wisata, Kebijakan, Pembangunan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati yang kaya, serta warisan sejarah dan budaya yang berharga. Kekayaan sumber daya alam ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat. Pengelolaan yang tepat akan menghindari pemborosan material dan memastikan penggunaan yang efisien. Pariwisata merupakan salah satu cara pemanfaatan sumber daya alam yang dapat memberikan nilai ekonomi tinggi bagi daerah yang mengelola sumber daya alam tersebut sebagai tujuan wisata, menarik pengunjung baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Majid, 2020). Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, termasuk hutan hujan tropis, gunung berapi yang menjulang tinggi, dan pantai yang indah. Indonesia ialah negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, termasuk potensi wisata yang beragam. Salah satu potensi wisata yang menjanjikan adalah wisata air, seperti danau, sungai, dan mata air.

Pemerintah Indonesia sedang fokus mengembangkan sektor pariwisata untuk mendukung peningkatan ekonomi nasional. Dengan luasnya sebagai negara kepulauan dari Sabang hingga Merauke, Indonesia mempunyai peluang pariwisata yang sangat besar. Sektor ini tidak hanya berkontribusi langsung terhadap pendapatan daerah tempat objek wisata berada, tetapi juga merupakan fenomena yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan budaya menjadi perhatian serius bagi para ahli dan perencana pembangunan. (Bahiyah & Hidayat, 2018). Pariwisata mencakup segala hal terkait perjalanan dan pengalaman rekreasi di luar wilayah tempat tinggal, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Indonesia kaya akan kebudayaan, seni, dan keindahan alamnya yang menjadi daya tarik utama dalam industri ini. Maka suatu Negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada, akan memperoleh pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. Indonesia mempunyai kekayaan kebudayaan dan kesenian masyarakat dan keindahan alamnya yang menjadi daya tarik tersendiri. Dengan kondisi tersebut (Klau et al., 2023).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) aktif memperluas peluang pariwisata di Indonesia dengan meningkatkan jumlah event pariwisata yang diselenggarakan dan didukungnya. Kemenparekraf juga intens dalam promosi pariwisata di luar negeri, seperti kehadiran dalam INACRAFT di China, Internasional Muslim Travel Mart di Malaysia, serta partisipasi dalam ajang ITB Berlin. Mereka juga aktif mengembangkan segmen pariwisata khusus seperti spa, golf, diving, dan kapal pesiar. Tujuan dari kegiatan promosi ini adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan domestik (wisnus). Media massa dianggap sebagai sarana utama untuk menyebarkan informasi mengenai destinasi pariwisata, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui tempat-tempat wisata yang sebelumnya mungkin tidak diketahui (Putranto, 2021).

Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Biasanya, pariwisata memberikan pengalaman hiburan kepada pengunjung atau membangkitkan minat untuk menjelajahi tempat-tempat baru, yang mendorong orang untuk menghabiskan uang dan melakukan perjalanan ke lokasi yang jauh (Sylvia, 2017).

Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada Pasal 1 –5 dijelaskan:

- 1) Wisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan mendatangi tempat tertentu untuk tujuan, pengembangan pribadi, rekreasi, atau mempelajari keragaman daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Wisatawan merupakan sekumpulan orang yang melakukan wisata.
- 3) Pariwisata merupakan kegiatan berbagai macam wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Pemerintah desa masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
- 4) Kepariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat setempat, wisatawan sesama wisatawan, Pemerintah desa, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- 5) Daya Tarik Wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keindahan keunikan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan sumber daya buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (GINTNG et al., 2020).

Pengembangan pariwisata berfungsi untuk memanfaatkan dan mengembangkan obyek serta daya tarik wisata yang meliputi kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, keberagaman tradisi dan seni budaya, serta warisan sejarah (Maje & Ratnaningsih, 2019). Sesuai dengan UU No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata dan Regulasinya, sumber daya alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, sejarah, dan kekayaan seni budaya Indonesia menjadi modal utama dalam upaya pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata. (Suni & Badollahi, 2019)

Pengembangan desa wisata akan berhasil apabila seluruh potensi desa, seperti sumber daya manusia dan kekayaan alamnya, dioptimalkan dengan sinergi yang maksimal. Dukungan penuh dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakatnya sangat penting dalam upaya ini. Pengembangan desa wisata bisa menciptakan peluang baru untuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan perdagangan produk lokal, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi local (Sukmadi et al., 2020). Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa Wisata, setiap desa di Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan potensi secara mandiri sesuai dengan kebutuhan lokal, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut (Suranny, 2020).

Objek wisata yaitu salah satu bagian terpenting dari industri pariwisata yang dapat menjadi alasan pengunjung melakukan perjalanan ke tempat wisata. Objek wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, laut, pantai, sungai, maupun berupa objek wisata bangunan seperti situs peninggalan sejarah, museum, dan sebagainya. Objek wisata menggambarkan kondisi alam dimana sumber daya wisata telah dibangun dan dikembangkan menjadi daya tarik dan dijadikan sebagai tempat yang di kunjungi wisatawan (Acmad Gani, 2020).

Desa Pager, yang terletak di wilayah Ponorogo selatan, mempunyai potensi alam meliputi objek dan daya tarik wisata, salah satunya Sendang Bulus. Sendang Bulus adalah wisata alam yang terbentuk karena adanya sumber air yang terbentuk secara alami yang kemudian membentuk suatu tempat yang di sebut Sedang. Dengan identiknya hewan bulus yang ada di sendang tersebut dengan itu masyarakat setempat menyebutnya dengan Sendang Bulus. Wisata ini cukup terkenal di wilayah Ponoogo, terutama di wilayah Ponorogo selatan. Selain tempat yang mudah ditempuh dengan sepeda motor, Sedang Bulus menempati area yang luas di tanah Desa.

Sendang Bulus merupakan bagian dari sejarah Desa Pager. Dari hasil semedi Raden Beku Pringgo Kusumo, munculah mata air yang jernih. Raden Beku Pringgo Kusumo adalah saudara dari Raden Beku Pringgoloyo, dan keduanya merupakan putra Demang Gading, abdi Pangeran Diponegoro. Sendang Bulus memiliki nilai historis yang erat kaitannya dengan pendirian Desa Pager, karena tempat ini merupakan lokasi pemeliharaan hewan kesayangan Raden Beku Pringgo Kusumo, pendiri Desa Pager. Bulus, atau kura-kura air tawar, ialah salah satu hewan kesayangan Raden Beku Pringgo Kusumo, selain ikan gabus (kutuk). Keberadaan hewan-hewan ini tidak hanya menambah daya tarik Sendang Bulus, tetapi juga memberikan nuansa sejarah dan budaya yang khas, menjadikannya sebuah destinasi wisata yang unik dan bermakna bagi masyarakat setempat serta para pengunjung.

Sendang Bulus menjadi sebuah ikon wisata yang berada di Desa Pager. Selain sarana penangkaran bulus dan pemeliharaan ikan, kini di sendang tersebut dijadikan wisata keluarga. Daya tarik utama dari wisata sendang bulus adalah adanya spesies kura-kura langka bulus tempurung lunak atau di sebut dengan (*Amyda Cartilaginea*) yang menjadi habitatnya di Sendang Bulus. Jumlah pengunjung Sendang Bulus saat ini mengalami penurunan. Pada tahun 2021-2022 saat hari libur lebih dari 500 - 1000 pengunjung di tiap bulannya. Pada tahun 2023-2024 saat hari libur lebih dari 300 pengunjung di tiap bulanya. Dan jumlah tersebut akan melambung pada saat libur sekolah dan tahun baru.

Sendang bulus sendiri di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut dituliskan dalam Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sendang Wiro Prenggo Tahun 2021 Pasal 1, Ayat 12, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya Disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pager guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pager. Salah satunya usaha wisata yang sudah berjalan di Desa Pager di bawah pengelolaan BUMDes Sendang Wiro Prenggo adalah Sendang Bulus

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan Sendang Bulus sebagai obyek wisata masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya infrastruktur pendukung, minimnya promosi, serta kurangnya pengelolaan yang berkelanjutan menjadi beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan pariwisata di Desa Pager.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Kebijakan pengembangan yang dapat meningkatkan potensi obyek wisata Sendang Bulus di Desa Pager. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi lokal, serta melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat, diharapkan penelitian ini mampu memberi kontribusi nyata dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing di Desa Pager serta sekitarnya.

A. Pengembangan

Pengembangan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik dari tempat-tempat tersebut agar lebih menarik bagi wisatawan, baik lokal maupun internasional. Ini dapat melibatkan investasi dalam infrastruktur, promosi, pelestarian lingkungan, dan pengembangan layanan pendukung seperti akomodasi, transportasi, dan tempat makan.

B. Kebijakan

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino:

Mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang menghadapi hambatan dan peluang untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang jelas, karena kebijakan harus menunjukkan tindakan yang nyata daripada sekadar usulan (Masula et al., 2017).

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena kebijakan harus mencerminkan tindakan yang sebenarnya dilakukan daripada sekadar usulan dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan suatu masalah.

Menurut James E. Anderson, sebagaimana dikutip oleh Islamy, kebijakan merupakan "Sekumpulan tindakan yang bertujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu." (Islamy, 1997)

1. Teori Implementasi Kebijakan

a. Teori George C. Edward

Menurut Edward III dalam Subarsono, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel:

- 1) Komunikasi, adalah keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dengan tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran, sehingga mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasi tidak akan efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia dan finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, sangat penting. Pelaksana dengan disposisi yang baik akan menjalankan kebijakan sesuai keinginan pembuat kebijakan. Jika sikap atau perspektif pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan, implementasi menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan. Aspek-aspek seperti Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi perlu diperhatikan. Struktur organisasi yang terlalu panjang dapat melemahkan pengawasan dan menciptakan prosedur birokrasi yang rumit, sehingga aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel (Haerul et al., 2016).

Menurut Edward III dalam (Subarsono 2005), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel:

1. Komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain. Dalam komunikasi terdapat lima unsur yaitu (i) sumber, berarti sebagai pihak yang mengirimkan atau menyampaikan pesan, (ii) pesan, berarti pernyataan yang disampaikan pengirim kepada penerima, (iii) media, sebagai alat untuk memindahkan pesan, (iv) penerima, ialah pihak yang menjadi sasaran, dan terakhir (v) efek, berarti perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah menerima pesan. Tujuan adanya komunikasi yaitu menciptakan kesepahaman dalam pengambilan keputusan secara Bersama untuk mencapai suatu tujuan. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum-forum diskusi atau musyawarah desa, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan warga.
2. Sumber daya, adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Sumberdaya dianggap memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan untuk membantu dan mengembangkan komponen yang bermanfaat bagi kehidupan. Sumberdaya juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya seperti sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya kewenangan, dan sumberdaya fasilitas dapat termasuk dalam kategori sumberdaya. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia terdiri dari insentif yang diberikan kepada masyarakat dan sumberdaya kewenangan, yang merupakan keputusan yang dibuat oleh lembaga dalam menerapkan kebijakan. Terakhir, sumberdaya fasilitas, yang merupakan alat yang digunakan untuk menerapkan kebijakan. Sumberdaya sangat penting, karena dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal, kebijakan pengembangan obyek wisata Sendang Bulus dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa serta menarik minat wisatawan untuk berkunjung.
3. Kapasitas pelaksana kebijakan untuk menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan, atau dikenal sebagai disposisi. Berpengaruh pada implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata, implementor harus jujur, komunikatif, dan demokratis. Implementor yang baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan keputusan pembuat kebijakan. Dengan disposisi yang positif dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata Sendang Bulus dapat berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga tujuan pengembangan dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat. Pengangkatan birokrasi dan insentif adalah dua indikator keberhasilan disposisi. Salah satu cara untuk mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik adalah dengan memberikan insentif.
4. Struktur birokrasi mempunyai tugas mengimplementasi suatu kebijakan. Dalam struktur birokrasi, perlu dua indikator penting yang diperhatikan seperti penerapan SOP atau *Standard Operasional Prosedur* yang memerlukan standar yang baik dalam pengelolaannya dan Fragmentasi. SOP adalah langkah dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar dapat berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. SOP diperlukan agar sebuah kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa dilakukannya kesalahan. Sedangkan fragmentasi merupakan tanggungjawab dari suatu kebijakan terhadap bidang yang berkaitan melalui koordinasi dan komunikasi.

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, peneliti dapat mengukur dan mengevaluasi efektivitas serta relevansi kebijakan pemerintah desa terhadap pengembangan obyek wisata Sendang Bulus di Desa Pager.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Borg dan Gall menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi alamiah. Dalam penelitian kualitatif, observasi atau penelitian sangat penting dalam proses pengumpulan data, di mana peneliti itu sendiri menjadi instrumen utama.

Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah tanpa direkayasa oleh peneliti. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan bermakna. Berdasarkan penjelasan tersebut, metode kualitatif adalah metode yang memandang kenyataan sesuai dengan hasil wawancara tanpa adanya rekayasa dari peneliti (Han & Goleman, Daniel, Boyatzis, Richard; Mckee, 2019)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana data berupa kata-kata tertulis dari wawancara dengan berbagai pihak. Fokus penelitian adalah pada pengembangan objek wisata Sendang Bulus di Desa Pager. Pendekatan kualitatif deskriptif ini dipilih untuk menggambarkan pengembangan yang terjadi di lokasi wisata tersebut.

Lokasi penelitian yakni tempat yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Desa Pager kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Pager tersebut karena Pemerintah Desa Pager saat ini sedang melakukan pengembangan pada Sendang Bulus, salah satunya membangun sebuah galeri edukasi budaya. Yang di dalamnya itu nanti digunakan sebagai ruang informasi atau ruang promosi baik secara online maupun offline.

Informan adalah sumber data langsung yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang sedang diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang masalah yang sedang diteliti. Informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Informan dalam wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Setyarini	Kepala Desa
2	Hadi suryanto	Sekertaris Desa
3	Agus Prasetyo	Kepala Seksi Pelayanan
4	Basuki	Masyarakat
5	Handika	Pengunjung

Alasan Pemilihan nasrasumber tersebut karena informan merupakan perangkat desa dan terlibat secara langsung dalam sendang bulus secara memahami lingkup sendang bulus Desa Pager. Dalam membantu wawancara ini, peneliti mengunakan hp sebagai alat perekam, buku catatan dan bolpoin dalam membantu peneliti memperoleh data pada saat proses wawancara.

Pengumpulan data sangat penting untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian dan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut dijelaskan sebagai:

1. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk penelitian. Menurut Mania (2008) observasi dilakukan untuk memahami peristiwa yang terjadi secara langsung. Selama observasi peneliti harus aktif memperhatikan kejadian yang terjadi mendengarkan informasi yang disampaikan oleh informan mengajukan pertanyaan yang relevan serta mempelajari dokumen-dokumen yang tersedia. Observasi ini berjalan selama beberapa waktu di lokasi yang menjadi sasaran peneliti. Sasaran observasi dalam penelitian ini yaitu petugas unit-unit di sendang bulus. Dengan dilakukannya observasi, peneliti dapat melihat segala bentuk aktifitas yang kemungkinan terjadi di tempat observasi agar nanti dapat memperoleh hasil data. Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata air sendang bulus desa pager. Setelah memperoleh data dari observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait (narasumber) dilanjutkan dengan peneliti juga pihak unit-unit di Desa Pager mencari solusi yang akan dilakukan untuk bisa mengatasi masalah yang muncul.
2. Wawancara adalah proses percakapan yang terstruktur dan terorganisir yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatn data langsung dari lapangan tempat penelitian berlangsung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi aktual dari narasumber secara langsung setelah melakukan observasi. Dalam wawancara semi-terstruktur peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Hasil dari wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan kemampuannya dalam menggali informasi lebih mendalam dari informan (Habibah, 2014).

3. Teknik dokumentasi adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berupa tulisan, dokumen angka, atau gambar yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang terstruktur dan mendetail yang kemudian dapat dianalisis untuk mendukung temuan penelitian. Dokumentasi sering mencakup berbagai jenis sumber informasi, termasuk arsip, laporan, artikel, foto, dan rekaman audiovisual, yang semuanya memberikan konteks dan bukti tambahan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian, dokumentasi mencakup pengambilan foto sebagai bukti atau pendukung dari hasil penelitian. Jenis dokumentasi dapat berupa gambaran visual atau teks yang direkam untuk keperluan analisis lebih lanjut. Penggunaan teknik dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber secara komprehensif dan mendukung pengembangan penelitian dengan data yang konkret dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data ini di peroleh peneliti dari informan yaitu Kepala Desa Pager, Sekertaris, Kepala Seksi Pelayanan, Masyarakat, Pengunjung. Yang membutuhkan sesuai dengan kebijakan menurut George C. Edward III. Sebagai langkah peneliti dalam melakukan penelitian ini, data yang disajikan adalah sebagai berikut :

Berikut adalah transkrip hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Desa Pager Kecamatan Bungkal

Komunikasi

"Partisipasinya sangat antusias sekali dan terlibat baik secara musyawarah ataupun pengembangannya ataupun pemanfaatannya karena selalu melibatkan masyarakat langsung. Adapun juga masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata yaitu yang pertama terkait masalah pemandu wisata yang bekerjasama atau yang di adakan oleh balai besar desa yang ada di jogja saja yang baru-baru ini mengadakan pelatihan pemandu wisata." (Hadi Suryanto Sebagai Sekertaris Desa)

"Dalam mengatasi regulasi dan izin terkait pengembangan sendang bulus pemerintah desa selalu berkordinasi dengan pemerintah yang bersangkutan, kalo hubungan pengamananya dengan polsek dan Polres kalo hubunganya dengan kebudayaan dengan pariwisata kalo hubunganya dengan pemerintahan nanti ke dinas pemberdayaan pemerintah desa tingkat kabupaten. Selalu bersinergi dengan pemerintah yang di atas." (Hadi Suryanto Sebagai Sekertaris Desa)

"Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek wisata mendukung sekali karena masyarakat yang sebagaian sudah merasakan manfaat atau dampaknya, secara otomatis akan membawa dampak secara meluas kepada seluruh masyarakat Desa Pager." (Agus Prasetyo Sebagai Kepala Seksi Pelayanan)

"Dengan teknologi digital dalam mempromosikan wisata Sendang Bulus di wilayah Sendang Bulus atau di lokasi Sendang Bulus itu sudah ada lokasi ruangan edukasi, ruang edukasi disitu segala perangkat guna untuk promosi sudah tersedia baik secara offline atau online. Dan juga selalu bekerja sama dengan dinas pariwisata dan sudah menjadi keuntungan yang sangat besar karena Desa Pager sudah masuk kategori desa wisata tingkat nasional." (Hadi Suryanto Sebagai Sekertaris Desa)

"Mengupload di berbagai media sosial, dan karena Desa Pager sudah mempunyai website resmi yang bekerja sama dengan Kominfo. Keberadaan website resmi Desa Pager yang terintegrasi dengan program Kominfo juga menjadi nilai tambah dalam upaya promosi wisata. Integrasi ini memungkinkan informasi wisata Desa Pager disajikan secara terpusat dan otomatis diakses melalui media digital, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkini dan lengkap. Dan secara otomatis dengan adanya program ini sangat terbantu dan tidak kesulitan di dalam mengakses wisata tersebut." (Agus Prasetyo sebagai Kepala Seksi Pelayanan)

"Pemerintah desa sangat mensupport kami yang terlibat dalam pengelolaan wisata di Sendang Bulus. Dukungan ini terutama terlihat dalam upaya mereka mencari dan menyediakan berbagai program untuk pengembangan wisata Sendang Bulus. Melalui program yang mereka luncurkan, pemerintah desa berupaya meningkatkan daya tarik wisata Sendang Bulus, memperbaiki fasilitas, serta mengadakan berbagai kegiatan yang dapat menarik lebih banyak pengunjung. Kedepannya kami berharap pemerintah desa, pusat atau provinsi harapannya dapat membantu kami dalam pengembangan wisata Sendang Bulus. Kami percaya dengan adanya bantuan dari pemerintah desa, pusat, maupun provinsi, wisata ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi." (Basuki Sebagai Masyarakat)

"Pelayanan yang diberikan oleh pengelola wisata dan masyarakat sekitar di Sendang Bulus cukup baik karena pengelola dan masyarakat sekitar menyambut pengunjung dengan ramah dan profesional. Disana dilengkapi penunjuk arah yang sangat memudahkan bagi pengunjung dalam mencari jalan, terutama bagi yang pertama kali datang ke Sendang Bulus. Harapannya untuk pengembangan Sendang Bulus ke depannya, saya berharap pemerintah desa dapat terus mengembangkan sarana prasarana yang ada di Sendang Bulus agar ke depannya Sendang Bulus dapat menarik lebih banyak lagi pengunjungnya yang datang." (Handika Sebagai Pengunjung)

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah desa dalam pengembangan obyek wisata Sendang Bulus sangat kuat. Masyarakat terlibat aktif baik dalam musyawarah, pengembangan, maupun pemanfaatan obyek wisata. Pemerintah desa juga berperan penting dalam mengatasi regulasi dan izin, serta bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk pengembangan wisata. Teknologi digital dimanfaatkan secara optimal untuk mempromosikan Sendang Bulus, termasuk melalui media sosial dan website resmi desa yang terintegrasi dengan Kominfo. Dukungan pemerintah desa terhadap pengelola wisata terlihat jelas, terutama dalam menyediakan program-program untuk pengembangan wisata. Masyarakat, pengelola wisata, dan pengunjung menilai bahwa fasilitas dan pelayanan di Sendang Bulus sudah baik, namun mereka berharap ada pengembangan lebih lanjut untuk menarik lebih banyak pengunjung. Keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menunjukkan potensi besar bagi pengembangan wisata Sendang Bulus ke depan.

Sumber Daya

"Kebijakan desa yang diambil oleh pemerintah desa itu selalu menganggarkan di setiap tahunnya pada program rencana kerja pemerintahan desa maupun anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) setiap tahun pasti ada pengembangan obyek wisata di Sendang Bulus. Rencananya yang akan dibangun untuk tahun yang terdekat yaitu tahun ini akan membangun sebuah galeri edukasi budaya yang akan segera dibangun di tahun 2024. Adapun rencana pengembangannya akan menyesuaikan dengan master plan yang telah ditetapkan sebelumnya. Master plan sudah punya yang sudah dibuatkan oleh kementerian pariwisata maupun oleh kementerian desa. Dengan adanya pengembangan wisata itu otomatis menambah pendapatan masyarakat Desa Pager, maka ekonomi lokal akan meningkat." (Setyarini Sebagai Kepala Desa)

"Pemerintah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas ke wilayah tersebut, sehingga, diharapkan perekonomian masyarakat di wilayah Sendang Bulus dan Desa Pager dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan." (Setyarini Sebagai Kepala Desa)

"Hambatannya banyak sekali, terutama kaitannya dengan tumpang tindihnya kebijakan yang diambil. Karena semua yang dianggarkan untuk kegiatan di Sendang Bulus secara otomatis belum tentu semuanya akan terealisasi atau dilaksanakan mengacu sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan APBDes tahun yang berjalan. Hambatannya yang kedua karena biasanya menjadi musim pancaroba yang berubah-ubah maka antisipasinya selalu mengadakan penambahan volume air yang ada di sendang dengan luasan yang cukup besar itu menjadi hambatan yang utama. Namun semuanya itu sudah teratasi dengan dimunculkannya sumur patok baru atau sumur patok desa." (Hadi Suryanto Sebagai Sekertaris Desa)

"Pengembangan wisata Sendang Bulus telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang, banyak peluang usaha baru yang

tercipta, seperti warung makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, serta layanan wisata lainnya. Selain itu, pendapatan masyarakat juga meningkat karena adanya permintaan akan produk lokal dan jasa terkait pariwisata. Pengembangan Sendang Bulus membuka banyak peluang kerja dan usaha bagi masyarakat terutama masyarakat Desa Pager. Selain itu, membawa peningkatan pada infrastruktur, seperti jalan, sanitasi, dan lainnya.” (Basuki Sebagai Masyarakat)

“Menurut pendapat saya mengenai fasilitas dan infrastruktur yang ada di obyek wisata Sendang Bulus, ada sebagian yang tidak dirawat dengan baik, seperti permainan anak yang gratis seperti ayunan, perosotan, dll. Namun, selain itu, fasilitas yang ada di Sendang Bulus telah dirawat dengan baik, termasuk pendopo, mushola, toilet/kamar mandi, dan fasilitas lainnya. Dan untuk biaya masuk dalam wisata Sendang Bulus sendiri dinilai masih cukup murah karena masuk ke wisata hanya membayar parkir untuk motor sebesar Rp 5.000 dan untuk mobil sebesar Rp 10.000. Harga-harga fasilitas di obyek wisata juga sangat memadai, seperti naik bebek air hanya Rp 20.000 dan anak-anak yang ingin berenang cukup membayar Rp 10.000. Bermain istana bola sepuasnya juga hanya Rp 10.000.” (Handika Sebagai Pengunjung)

Dari Penjelasan di atas bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan wisata Sendang Bulus berfokus pada alokasi anggaran tahunan melalui APBDes untuk mendukung berbagai proyek, seperti pembangunan galeri edukasi budaya yang direncanakan pada tahun 2024. Pengembangan wisata ini dilakukan berdasarkan master plan yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal Desa Pager. Pemerintah desa juga berupaya memperbaiki infrastruktur dan aksesibilitas di kawasan Sendang Bulus, dengan harapan pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin signifikan. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti tumpang tindih anggaran dan perubahan cuaca, yang mengakibatkan tantangan dalam pengelolaan sumber air di kawasan tersebut. Dari sudut pandang masyarakat, pengembangan wisata Sendang Bulus telah membuka banyak peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata. Infrastruktur di sekitar kawasan wisata juga mengalami perbaikan, meskipun masih ada fasilitas yang kurang terawat. Dari perspektif pengunjung, fasilitas di Sendang Bulus umumnya memadai dan terjangkau, dengan biaya masuk yang murah dan harga fasilitas yang wajar. Meskipun ada beberapa fasilitas anak yang kurang terawat, namun secara keseluruhan, wisata Sendang Bulus dinilai cukup baik dan layak dikunjungi.

Disposisi

“Dampaknya adalah secara otomatis terhadap peningkatan pendapatan yang diperoleh dari masing-masing masyarakat yang ada di Sendang Bulus secara otomatis akan meningkatkan pendapatan masing-masing keluarga ataupun pendapatan per kapita. Dengan adanya pendapatan per kapita itu, pendapatan secara menyeluruh pendapatan desa akan meningkat.” (Hadi Suryanto Sebagai Sekertaris Desa)

“Peran pemerintah desa sangat mendukung bahkan selalu berkolaborasi dengan pengelola wisata yang ada karena di dalam kegiatan obyek wisata ini adalah bagian dari pengelolaan peran pemerintah desa.” (Agus Prasetyo Sebagai Kepala Seksi Pelayanan)

“Peluangnya secara otomatis karena selalu ada pengembangan baik obyeknya itu sekaligus akan membawa dampak peluang untuk pengembangan wisata ataupun wisatawan yang akan ke Sendang Bulus.” (Hadi Suryanto Sebagai Sekertaris Desa)

“Ya jelas itu terutama bagi masyarakat untuk peningkatan ekonomi walaupun itu tidak signifikan ekonomi meningkat, tetapi itu memang menambah untuk peningkatan ekonomi masyarakat terutama bagi masyarakat Pager. Kami yakin bahwa Sendang Bulus akan menjadi tujuan wisata yang menarik dan bermanfaat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Pager.” (Basuki Sebagai Masyarakat)

“Yang membuat saya tertarik untuk mengunjungi obyek wisata Sendang Bulus adalah karena tempatnya yang masih asri. Terdapat daya tarik tersendiri dengan adanya kura-kura yang bisa

dilihat disana secara langsung, yang belum tentu bisa kita lihat di tempat lain. Kita juga bisa memberi makan ikan-ikan yang ada disana. Selain itu, wisata Sendang Bulus ini memiliki keindahan alam yang masih alami, membuat pengunjung merasa nyaman dan terhibur. Di Sendang Bulus ini juga menawarkan berbagai jenis makanan khas, seperti pecel puli, tiwul goreng, dan banyak makanan khas lainnya.” (Handika Sebagai Pengunjung)

“Kebersihan di Sendang Bulus cukup baik karena sudah ada petugas yang sering mengelilingi area untuk mengambil sampah-sampah daun kering atau sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung. Selama berkunjung, saya merasa aman karena tidak pernah ada masalah.” (Handika Sebagai Pengunjung)

Dari penjelasan di atas bahwa pengembangan wisata Sendang Bulus di Desa Pager telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal, meskipun tidak selalu signifikan. Pendapatan per kapita dan pendapatan desa secara keseluruhan mengalami peningkatan berkat adanya kegiatan pariwisata di kawasan tersebut. Pemerintah desa berperan aktif dalam mendukung dan berkolaborasi dengan pengelola wisata untuk memastikan keberhasilan pengembangan obyek wisata Sendang Bulus. Pengembangan yang terus dilakukan tidak hanya meningkatkan potensi ekonomi, tetapi juga memperluas peluang bagi wisatawan untuk datang ke Sendang Bulus, yang pada gilirannya memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat setempat. Daya tarik utama bagi pengunjung adalah keasrian dan keindahan alam Sendang Bulus, serta keberadaan kura-kura dan ikan-ikan yang bisa dilihat dan diberi makan secara langsung. Selain itu, pengunjung juga menikmati makanan khas daerah yang menjadi bagian dari pengalaman wisata. Kebersihan di kawasan wisata dinilai cukup baik, dengan petugas yang rutin menjaga kebersihan area. Pengunjung juga merasa aman selama berwisata di Sendang Bulus, yang menambah kenyamanan dan kesan positif mereka terhadap tempat tersebut.

Secara keseluruhan, disposisi ini merupakan dokumen arahan yang memetakan peran masing-masing pihak (Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pokdarwis) dalam mengembangkan potensi obyek wisata Sendang Bulus secara terpadu. Dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, diharapkan sinergi antara ketiga pihak tersebut dapat mempercepat pengembangan obyek wisata yang lebih baik dan berkelanjutan

Struktur Birokrasi

“Dalam pengelolaannya sendang bulus yang bagaimana pokdarwis itu merupakan bagian daripada BUMDes, BUMDes bertanggung jawab kepada pemerintah desa dan selalu melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya.” (Agus Prasety Sebagai Kepala Seksi Pelayanan)

“Peran pemerintah sangat maksimal karena satu-satunya aset wisata yang dimiliki oleh desa setiap tahun selalu dianggarkan untuk pengembangan wisata Sendang Bulus melalui APBDDes desa. Dan pemerintah juga melakukan evaluasi kinerjanya yang selalu berpedoman pada rencana. Dan pemerintah juga melakukan evaluasi kinerjanya yang selalu berpedoman pada rencana, kegiatan yang terjadi di saat itu di evaluasi mana kala ada yang kurang sesuai, disesuaikan dengan RAP perubahan ataupun kegiatan perubahan dan di sesuaikan dengan keadaan yang semestinya.” (Hadi Suryanto Sebagai Sekretaris Desa)

“Akibat dari pengembangan obyek wisata ini pemerintah desa menciptakan banyak program-program seperti pelestarian lingkungan yang berkaitan langsung dengan pariwisata. Ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Desa Pager.” (Basuki Sebagai Masyarakat)

Dari penjelasan di atas bahwa pengelolaan wisata Sendang Bulus melibatkan sinergi antara BUMDes, Pokdarwis, dan masyarakat. BUMDes bertanggung jawab kepada pemerintah desa dalam pengelolaan wisata, dengan melibatkan masyarakat dalam semua tahapan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Pemerintah desa berperan maksimal dalam mendukung pengembangan wisata Sendang Bulus, dengan alokasi anggaran tahunan melalui APBDDes. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan rencana, serta disesuaikan jika diperlukan melalui revisi anggaran. Pengembangan wisata ini juga berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan Desa

Pager. Program-program pelestarian lingkungan yang dibuat oleh pemerintah desa turut mendukung keberlanjutan pariwisata dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam di sekitar mereka.

- **Komunikasi**

Kebijakan Pemerintah desa Pager dalam pengembangan obyek wisata air Sendang Bulus Desa Pager yakni mengalokasikan dana melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) untuk pengembangan obyek wisata Sendang Bulus. Selain itu Kebijakan dalam pengembangan obyek wisata Sendang Bulus pemerintah desa bersama BUMDes pada tahun 2024 yakni dengan pembangunan galeri edukasi budaya. Pembangunan galeri edukasi tentang wisata sejarah, budaya, serta sebagai tempat pameran. Kebijakan Pemerintah Desa Pager dalam pengembangan obyek wisata Sendang Bulus dirumuskan melalui musyawarah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui musyawarah desa, informasi mengenai alokasi dana dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) disampaikan secara transparan. Selain itu, keputusan untuk membangun galeri edukasi budaya pada tahun 2024 juga merupakan hasil dari musyawarah bersama antara pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan melibatkan masyarakat

Dalam meningkatkan kesuksesan suatu kebijakan/progam pemerintah perlu mengandeng masyarakat dalam ikut serta dalam pengembangan wisata Sendang Bulus yakni dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek wisata sangat antusias dan aktif. Mereka tidak hanya dilibatkan dalam diskusi atau musyawarah, tetapi juga dalam pengembangan dan pemanfaatan obyek wisata. Partisipasi ini penting karena menunjukkan adanya rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberhasilan obyek wisata tersebut.

Tingkat partisipasi yang tinggi ini juga diakui membawa dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat yang telah merasakan manfaat langsung dari pengembangan wisata menjadi lebih termotivasi untuk terus mendukung dan berpartisipasi. Manfaat tersebut, seperti peningkatan ekonomi dan kesempatan kerja, dirasakan tidak hanya oleh individu yang terlibat langsung, tetapi juga menyebar ke seluruh masyarakat Desa Pager. Ini menciptakan efek positif yang lebih luas, di mana partisipasi masyarakat tidak hanya berdampak pada pengembangan wisata tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi desa secara keseluruhan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pengembangan wisata menjadi lebih berkelanjutan karena didukung oleh komunitas lokal yang memiliki kepentingan dan manfaat dari keberhasilan wisata tersebut.

Partisipasi ini juga dapat menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan pengembangan wisata ke depannya. Pemerintah dalam meningkatkan wisata Sendang Bulus juga meningkatkan teknologi digital digunakan secara maksimal dalam mempromosikan wisata Sendang Bulus, baik melalui media online maupun offline. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan informasi tentang wisata Sendang Bulus dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional, bahkan global.

- **Sumber daya**

Mata air Sendang Bulus adalah daya tarik utama yang menyajikan keindahan alami, sering dianggap memiliki nilai sejarah dan spiritual. Kejernihan airnya dan suasana sekitarnya yang asri, dikelilingi pepohonan, memberikan suasana alami dan tenang bagi para pengunjung. Pengelolaan obyek wisata ini dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta melibatkan masyarakat lokal. Mereka berperan penting dalam berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sehari-hari, menjadi pemandu wisata, hingga mengelola usaha kecil seperti warung makan atau penjualan cenderamata, yang juga meningkatkan ekonomi lokal. Fasilitas penunjang seperti area parkir, toilet umum, dan tempat istirahat penting untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung. Selain itu, pada tahun 2024, rencananya akan dibangun galeri edukasi budaya, yang berfungsi sebagai tempat pameran sejarah, budaya lokal, dan tradisi, untuk menambah daya tarik wisata serta memberikan nilai edukatif. Sendang Bulus memiliki cerita legenda dan nilai budaya yang melekat pada masyarakat lokal. Cerita ini memperkaya pengalaman wisata pengunjung, memberikan dimensi sejarah dan budaya yang membuat tempat ini lebih dari sekadar obyek wisata alam.

Dalam pengembangan wisata alam Sendang Bulus mempunyai hambatan salah satu hambatan utama yang disebutkan adalah adanya tumpang tindih kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh berbagai pihak sering kali tidak sinkron, yang mengakibatkan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak selalu dapat direalisasikan sepenuhnya. Faktor alam, terutama perubahan musim atau pancaroba, juga menjadi hambatan dalam pengembangan wisata Sendang Bulus. Perubahan musim yang tidak menentu mempengaruhi volume air di Sendang, yang merupakan salah satu daya tarik utama wisata tersebut. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya tambahan, seperti penambahan volume air, yang tentunya memerlukan biaya dan usaha ekstra. Meskipun terdapat hambatan-hambatan tersebut, pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Salah satu solusi yang disebutkan adalah pembuatan sumur patok baru atau sumur patok desa, yang membantu menjaga ketersediaan air di sendang.

Sumber daya manusia (SDM) di Desa Pager memiliki peran penting dalam pengembangan berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata, terutama untuk mengelola obyek wisata Sendang Bulus. SDM di desa ini sebagian besar terdiri dari masyarakat lokal yang terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pertanian, UMKM, dan pariwisata. Melalui pembinaan dan pelatihan rutin, seperti pelatihan bagi pengelola wisata yang juga merupakan bagian dari pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kemampuan mereka terus ditingkatkan. Program-program pelatihan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengelolaan manajemen yang baik, kewirausahaan, serta pelayanan wisata yang berkualitas. Hal ini diharapkan mampu memajukan potensi desa dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, anggaran difokuskan pada pembangunan galeri edukasi yang bertujuan untuk menjadi pusat kegiatan budaya dan kesenian di desa pager. Galeri ini akan berbentuk rumah joglo yang rencananya akan dibangun pada bulan September, dengan target penyelesaian dalam waktu satu bulan. Setelah selesai, galeri ini akan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi budaya bagi masyarakat. Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini adalah sebesar Rp 303.000.000,00 yang sepenuhnya berasal dari dana desa.

Pada tahun 2023, pengembangan infrastruktur obyek wisata Sendang Bulus mendapat bantuan dari DPRD pusat melalui program Jalin Kesra, yang merupakan program penyaluran aspirasi masyarakat. Bantuan tersebut sebesar Rp 70.000.000,00 dan difokuskan untuk mendukung pengembangan infrastruktur wisata di Sendang Bulus.

Seluruh pendapatan dari hasil parkir dikelola oleh Pokdarwis dan disetorkan kepada BUMDes. Setiap tahun, BUMDes mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut. Pendapatan ini kemudian dihitung dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pelayanan karcis, yang dimasukkan ke dalam kas Pokdarwis untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan wisata.

- **Disposisi**

Pemerintah desa berperan aktif dalam mendukung pengelolaan wisata Sendang Bulus. Dukungan ini mencakup upaya dalam mencari dan menyediakan program-program yang mendukung pengembangan wisata. Pemerintah desa tidak hanya memberikan dukungan finansial tetapi juga meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan daya tarik wisata, memperbaiki fasilitas, dan mengadakan kegiatan menarik. Program-program yang diluncurkan bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata Sendang Bulus.

Pemerintah desa berupaya memperbaiki fasilitas wisata sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. Perbaikan fasilitas adalah aspek penting dalam memastikan kenyamanan dan kepuasan pengunjung. Harapan masyarakat agar dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah desa, tetapi juga dari pemerintah pusat dan provinsi. Masyarakat yakin bahwa dengan adanya dukungan dari pemerintah desa, pusat, dan provinsi, wisata Sendang Bulus dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Harapan untuk dukungan dari berbagai tingkat pemerintahan menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, pusat, dan provinsi. Sinergi antara berbagai pihak dianggap krusial untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pengembangan wisata. Dengan dukungan dari semua level pemerintahan, diharapkan pengembangan wisata Sendang Bulus dapat berlangsung lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pemerintah desa bertanggung jawab dalam membuat kebijakan yang mendukung pengembangan obyek wisata Sendang Bulus. Mereka akan menyusun kebijakan yang mencakup regulasi, anggaran, dan sumber daya untuk memastikan keberlanjutan pengembangan wisata. Selain itu, Pemerintah desa juga akan berperan dalam melibatkan masyarakat setempat untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, yang merupakan elemen penting dalam mendukung daya tarik wisata Sendang Bulus.

BUMDes adalah lembaga ekonomi yang berperan dalam mengelola aset-aset desa yang berpotensi untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata. Dalam disposisi ini, BUMDes akan mengoptimalkan aset desa, misalnya dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan. Mereka juga dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi kreatif berbasis lokal, seperti cinderamata, kuliner khas, atau kegiatan berbasis pengalaman wisata, yang dapat meningkatkan pemasukan desa sekaligus menarik wisatawan. Selain itu, BUMDes juga berperan mencari kemitraan dengan pihak luar, seperti pemerintah daerah, investor, atau sponsor, untuk mendapatkan bantuan promosi dan pendanaan yang lebih besar. dalam hal ini BUMDes desa pager melakukan usaha untuk memajukan sumber ekonomi masyarakat desa melalui obyek wisata sendang bulus

Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang bertugas mengelola langsung kegiatan pariwisata di Obyek Wisata Sendang Bulus. Dalam disposisi ini, Pokdarwis berperan aktif dalam mengelola operasional kegiatan wisata, seperti pelayanan pengunjung, pemeliharaan fasilitas, dan penyediaan informasi edukatif kepada wisatawan. Mereka juga akan melakukan program-program yang berkaitan dengan sejarah, budaya, serta konservasi alam di sekitar Sendang Bulus. Selain itu, Pokdarwis juga bertanggung jawab dalam melakukan promosi aktif, baik melalui media sosial, kegiatan budaya, maupun acara-acara pariwisata untuk menarik lebih banyak pengunjung.

• Struktur Birokrasi

Pemerintah desa dalam meningkatkan pengembangan wisata berkolaborasi dengan BUMDes dan pokdarwis yang merupakan lembaga untuk mengelola usaha-usaha yang dapat meningkatkan pendapatan desa. Dengan Pokdarwis sebagai bagian dari BUMDes, pengelolaan wisata menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi dengan sistem ekonomi desa. BUMDes, yang melibatkan Pokdarwis, bertanggung jawab kepada pemerintah desa. Ini menunjukkan adanya mekanisme akuntabilitas di mana kegiatan dan pengelolaan wisata harus sejalan dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Tanggung jawab ini mencakup koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan pengelolaan wisata sesuai dengan kebijakan desa. Menyebutkan bahwa masyarakat terlibat dalam perencanaan menggarisbawahi pendekatan inklusif dalam pengelolaan wisata. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diperhitungkan. Selain perencanaan, masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan dan pengawasan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai aktor aktif dalam proses pengelolaan wisata.

Penjelasan Struktur birokrasi pengembangan obyek wisata Sendang Bulus:

1. Kepala Desa: Bertindak sebagai pengambil kebijakan tertinggi dan pemimpin utama dalam pengembangan obyek wisata. Kepala Desa memberikan arahan kepada Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BUMDes, dan Pokdarwis untuk bekerja sesuai peran masing-masing.
2. Sekretaris Desa: Berperan dalam koordinasi administratif dan memastikan bahwa seluruh kegiatan pengembangan obyek wisata berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sekretaris Desa juga bertindak sebagai penghubung antara tim internal desa dan pengurus obyek wisata.
3. Kaur Keuangan: Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan terkait pendanaan wisata, termasuk mengawasi anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan obyek wisata dan memastikan laporan keuangan dibuat dengan transparan.
4. BUMDes: Mengelola aspek ekonomi dari obyek wisata, seperti pengelolaan fasilitas wisata, usaha ekonomi kreatif, serta mencari kemitraan untuk pengembangan lebih lanjut. Mereka memiliki peran penting dalam memaksimalkan potensi ekonomi dari obyek wisata tersebut.
5. Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata): Mengelola operasional harian obyek wisata, seperti pelayanan pengunjung, pengelolaan lingkungan, serta promosi wisata. Pokdarwis juga aktif dalam menjaga keberlangsungan program-program wisata yang ada.

Struktur organisasi ini membantu pembagian tugas yang jelas antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan Obyek Wisata Sendang Bulus, memastikan kolaborasi yang efektif untuk pengembangan wisata yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa kebijakan Pemerintah Desa Pager dalam pengembangan Obyek Wisata Sendang Bulus mencerminkan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini melibatkan alokasi dana yang transparan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) serta pengembangan fasilitas wisata, seperti galeri edukasi budaya, yang rencananya akan dibangun pada tahun 2024. Partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi elemen kunci dalam keberhasilan pengelolaan wisata ini, di mana mereka tidak hanya dilibatkan dalam proses perencanaan dan musyawarah, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pengembangan.

Peran BUMDes dan Pokdarwis sebagai pengelola wisata turut memperkuat struktur birokrasi yang terintegrasi, dengan pemerintah desa memegang peran strategis dalam pengambilan kebijakan, koordinasi administratif, dan pengelolaan keuangan. Tantangan seperti tumpang tindih kebijakan dan hambatan alam diatasi melalui solusi inovatif, seperti pembangunan sumur patok untuk menjaga ketersediaan air di sendang. Pemerintah desa juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas promosi wisata ke tingkat nasional dan global.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara berbagai pihak, peningkatan fasilitas, dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu mendukung pengembangan wisata Sendang Bulus secara berkelanjutan, memberikan dampak positif pada ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pager

Pemerintah Desa Pager dalam meningkatkan pengembangan wisata Sendang Bulus dengan kebijakan mengalokasikan dana melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pengembangan obyek wisata Sendang Bulus. Salah satu rencana di tahun 2024 dalam pengembangan wisata adalah pembangunan galeri edukasi budaya. Pengembangan yang akan dilakukan sudah mengacu pada master plan yang telah disusun sebelumnya oleh Kementerian Pariwisata danKementerian Desa. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengembangan wisata. Dengan adanya pengembangan wisata, pendapatan masyarakat Desa Pager akan meningkat. Dengan kata lain, pengembangan wisata diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat setempat.

Pemerintah berusaha meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas ke wilayah Sendang Bulus. Peningkatan infrastruktur dapat mencakup perbaikan jalan, fasilitas umum, dan sarana transportasi. Aksesibilitas merujuk pada kemudahan bagi masyarakat dan wisatawan untuk mencapai lokasi tersebut. Teknologi digital digunakan secara maksimal dalam mempromosikan wisata Sendang Bulus, baik melalui media online maupun offline. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan informasi tentang wisata Sendang Bulus dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional, bahkan global. Di lokasi Sendang Bulus, telah tersedia ruangan edukasi yang dilengkapi dengan perangkat yang mendukung promosi wisata. Desa Pager menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kominfo dalam upaya mempromosikan wisata. Kerjasama ini membawa keuntungan besar karena memungkinkan Desa Pager untuk memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang lebih luas dalam mempromosikan wisatanya.

Desa Pager juga telah masuk dalam kategori desa wisata tingkat nasional, yang menandakan bahwa usaha promosi yang dilakukan telah mencapai hasil yang signifikan dan diakui di tingkat nasional. Dukungan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa dan pengelola wisata dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata. Kolaborasi ini memungkinkan pembagian tugas dan sumber daya yang lebih baik, serta penanganan masalah secara lebih efektif. Dengan adanya dukungan aktif dari pemerintah desa, kualitas obyek wisata dapat meningkat. Hal ini termasuk perbaikan fasilitas, penyediaan layanan yang lebih baik, dan pengembangan kegiatan yang dapat menarik lebih banyak pengunjung.

REFERENSI

1. Acmad Gani, M. A. (2020). Analisis Kepuasan Wisatawan Terhadap Objek Wisata Bahari di Kota Makassar. *Journal of Management Science (JMS)*, 1(2), 309–324. <https://doi.org/10.52103/jms.v1i2.293>
2. Bahiyah, C., & Hidayat, W. R. (2018). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 95–103.
3. Ginting, A. H., Wardana, D., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211–219. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.874>
4. Habibah, N. (2014). Wawancara Dalam Penelitian. *Repository Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 6.
5. Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
6. Islamy, M. I. (1997). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, 114–115.
7. Klau, W. W., Fanggidae, A. H. J., Salean, D. Y., & Fanggidae, R. P. C. (2023). Strategi Pengembangan Objek Wisata dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan : Studi Pada Objek Wisata Fulan Fehan. *Jurnal Studi Perhotelan Dan Pariwisata*, 1(2), 53–61. <https://doi.org/10.35912/jspp.v1i2.2214>
8. Maje, Y. O., & Ratnaningsih, Y. (2019). Struktur Dan Komposisi Vegetasi Di Kawasan Hutan Rakyat Dusun Murpayung Desa Sigar Penjalin Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Silva Samalas*, 2(2), 109. <https://doi.org/10.33394/jss.v2i2.3663>
9. Majid, kanzul fikri. (2020). *Strategi pengembangan obyek daya tarik wisata di desa sembalun lawang kecamatan sembalun kabupaten lombok timur*. 50.
10. Mania, S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220–233. <https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n2a7>
11. Masula, I. C., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2017). KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus Strategi Pengembangan Wisata Pantai Puger Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1), 680–689. <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1239>
12. Putranto, A. B. (2021). *Pengembangan Obyek Wisata Air Sendang Bulus Sebagai Daya Tarik Wisata Kabupaten Ponorogo Jawa Timur*. 1–8.
13. Sukmadi, S., Kasim, F., Simatupang, V., Goeltom, A. D. L., & Saftara, I. (2020). Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Kearifan Lokal pada Desa Wisata Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.34013/mp.v1i1.356>
14. Suni, M., & Badollahi, M. Z. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Kabupaten Barru, Sulawesi-Selatan. *Jurnal Kepariwisata Dan Hospitalitas*, 3(2), 109–119.
15. Suranny, L. E. (2020). Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.212>
16. Sylvia, R. (2017). Analisis Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Tumpang Dua Di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 11(2), 253–259.



Tersedia secara online pada

<https://jurnalpradah.com/>

Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar

Yuni Purwita Sari ¹

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar¹

yunipurwitasari@gmail.com

Abstract

Regional innovation is interpreted as all forms of renewal in the implementation of regional government, to improve the performance of regional government. Regional innovation is directed to accelerate the realization of community welfare through improving public services, empowerment, and community participation and increasing regional competitiveness. This study aims to identify the implementation of regional innovation in Blitar Regency and formulate strategies for developing the regional innovation ecosystem of Blitar Regency. This research is a qualitative study with a case study approach. Data collection in this study was carried out through literature studies and Focus Group Discussions (FGD). Data analysis was carried out using case-oriented analysis methods and SWOT analysis. The results of this study indicate that the implementation of regional innovation in Blitar Regency is quite good, as evidenced by the existence of a mentality, system, and network in the implementation of regional innovation. However, regarding the targets in the Regional Medium Term Development Plan of Blitar Regency, evaluative and strategic steps are needed to optimize the implementation of regional innovation. The strategy for implementing regional innovation in the situation of Blitar Regency is the Turn Around Strategy, which is a strategy to make improvements/improvements to existing conditions. This strategy can be done by fixing/reducing the internal weaknesses of Blitar Regency to be able to seize existing opportunities, namely by: 1) preparing regulations related to rewards and punishments to encourage a culture of innovation so that they can be motivated to participate in various innovation competitions at a higher level, as well as to obtain incentives from the central government; 2) Strengthening the capacity of human resources of the apparatus related to regional innovation, not only at the staff level but also at the Leadership level to strengthen commitment to the implementation of regional innovation, so that they can obtain maximum results in innovation competitions and obtain incentives.

Keywords: regional innovation, development strategy, Blitar Regency.

Abstrak

Inovasi daerah dimaknai sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar dan merumuskan strategi dalam pengembangan ekosistem inovasi daerah Kabupaten Blitar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur

dan *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis data dilakukan dengan metode analisis berorientasi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi daerah di Kabupaten Blitar sudah cukup baik, terbukti dari sudah adanya mentalitas, sistem dan jejaring dalam implementasi inovasi daerah. Namun demikian, berkenaan dengan target dalam RPJMD Kabupaten Blitar, diperlukan Langkah evaluatif dan strategis dalam mengoptimalkan implementasi inovasi daerah. Strategi implementasi inovasi daerah yang sesuai dengan situasi Kabupaten Blitar yaitu *Turn Around Strategy*, yaitu strategi untuk melakukan pembenahan/ perbaikan terhadap kondisi yang ada sekarang. Strategi ini dapat dilakukan dengan membenahi/mengurangi kelemahan internal Kabupaten Blitar untuk dapat meraih peluang yang ada, yaitu dengan: 1) menyusun regulasi terkait *reward and punishment* untuk mendorong budaya inovasi sehingga dapat termotivasi untuk mengikuti berbagai kompetisi inovasi di tingkat yang lebih tinggi, serta untuk memperoleh insentif dari pemerintah pusat; 2) Penguatan kapasitas SDM aparatur terkait inovasi daerah, tidak hanya pada level staf tetapi juga pada level Pimpinan untuk menguatkan komitmen atas implementasi inovasi daerah, sehingga dapat memperoleh hasil maksimal dalam kompetisi inovasi serta memperoleh insentif.

Kata Kunci: inovasi daerah, strategi pengembangan, Kabupaten Blitar.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia berasaskan otonomi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ada dua tujuan pokok dari implementasi otonomi daerah. Pertama, secara administratif, diharapkan pemerintah daerah dapat bertransformasi lebih efektif dan efisien. Kedua, sebagai bentuk implementasi demokrasi di tingkat lokal yang secara agregat akan mewujudkan demokrasi di tingkat nasional (Asrori et al., 2021). Dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk berinovasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 BAB XXI Pasal 386 sampai dengan Pasal 390. Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah ini sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui landasan hukum tersebut, Pemerintah Pusat menjamin perlindungan kepada kepala daerah yang melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah (Febrian, 2018). Landasan ini juga sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan terobosan (*breakthrough*) untuk mengatasi kondisi birokrasi yang selama ini memiliki stigma negatif, serta untuk menghidupkan budaya kerja produktif (Adler, 1999 dalam Asrori et al., 2021). Melalui inovasi daerah diharapkan cara kerja konvensional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berubah ke arah yang lebih baik (Asrori, et al., 2020).

Inovasi Daerah, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017, dimaknai sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, 2017). Inovasi daerah diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Ada tiga bentuk utama inovasi daerah, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Implementasi inovasi daerah terbukti memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah muncul sebagai adaptasi terhadap masalah yang ada (Suhendra, 2021). Telah banyak inovasi daerah yang telah terbukti berperan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan (Okuputra & Nasikh, 2022). Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ra'is & Rohman, 2020). Penerapan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan serta mendapatkan pelayanan prima (Sari & Pratiwi, 2021).

Inovasi daerah menjawab tantangan upaya peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui berbagai pembaruan dalam tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan menjadi lebih efektif dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Kumorotomo (2009) mengemukakan bukti empiris peran inovasi tata kelola pemerintahan dalam mengurangi korupsi dari praktik lelang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen. Tidak hanya itu, praktik implementasi inovasi pelayanan publik melalui penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta juga memberikan bukti nyata bahwa inovasi daerah dapat mengurangi korupsi.

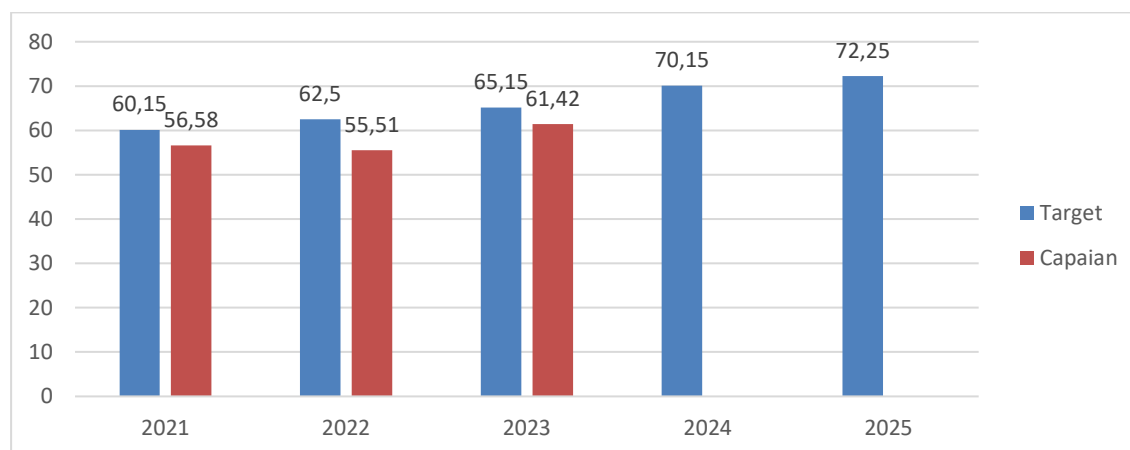
Badan Strategi dan Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pengukuran dan Penilaian Inovasi Daerah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Penilaian inovasi daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, menggunakan instrumen Indeks Inovasi Daerah (IID). Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu, yang merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian ini menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dalam memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Penilaian IID mengklasifikasi pemerintah daerah ke dalam empat kategori, yaitu sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai. Pemerintah daerah terinovatif selanjutnya akan memperoleh penghargaan dari Menteri Dalam Negeri melalui ajang *Innovative Government Award* (IGA). Penerima penghargaan IGA selanjutnya akan menerima insentif fiskal yang dapat digunakan untuk pengembangan dan kemajuan daerah. Insentif inilah yang mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Blitar secara aktif melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaporkan penerapan hasil inovasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui website Indeks Inovasi Daerah (<https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>), yang akan digunakan untuk pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan sebagai materi penilaian untuk pemberian penghargaan maupun insentif kepada daerah. Kegiatan pelaporan inovasi daerah di Kabupaten Blitar dikoordinatori oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan Pengembangan, dalam hal ini oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang). Kabupaten Blitar pernah memperoleh predikat kabupaten sangat inovatif pada 2019 dan 2020. Namun, peringkat Kabupaten Blitar mengalami penurunan yang cukup signifikan pada dua tahun terakhir (Bappedalitbang Kab. Blitar, 2023).

Pelaksanaan inovasi daerah merupakan salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blitar. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, wa Robbun Ghofuur*)”, salah satu misi yang dilaksanakan adalah melalui pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas (RPJDM Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026). Dengan begitu, arah kebijakan yang dilakukan adalah mendorong pelaksanaan inovasi daerah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan salah satu indikator sasaran yang mendukung Misi ke-3 “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas” pada RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026. Pada tahun 2021 dan 2022, target IID tidak dapat tercapai. Sebagaimana tertuang pada Gambar 1, bahwa target IID tahun 2024 masih jauh dari capaian IID tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program inovasi daerah di Kabupaten Blitar selama ini dan merumuskan strategi pelaksanaan program inovasi daerah yang sesuai dengan situasi Kabupaten Blitar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar dan sebagai bahan masukan dalam mengoptimalkan implementasi inovasi daerah Kabupaten Blitar.



Gambar 1 Target dan Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blitar

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Studi literatur dilakukan terhadap notulen, nota dinas, laporan kegiatan dan regulasi terkait inovasi daerah. Wawancara dilakukan untuk melengkapi informasi terkait implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Informan adalah pejabat yang menangani inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar. Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blitar dalam implementasi inovasi daerah, serta peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) eksternal yang mempengaruhi implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Peserta FGD adalah perwakilan dari Perangkat Daerah yang menangani inovasi daerah, dalam hal ini pejabat/staf yang ditugaskan sebagai anggota Forum Komunikasi Inovasi Daerah. Jumlah peserta FGD sebanyak 6 orang dari Perangkat Daerah yang mewakili 3 (tiga) bentuk inovasi daerah, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Penentuan peserta menggunakan metode purposive sampling untuk mendapatkan informasi sesuai tujuan penelitian. Dari masing-masing bentuk inovasi daerah ditentukan 3 (tiga) Perangkat Daerah yang mewakili instansi berbentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), badan/dinas/kantor, dan kecamatan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis berorientasi kasus untuk memahami implementasi inovasi daerah secara spesifik di Kabupaten Blitar. Selain itu, analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan ekosistem inovasi daerah berdasarkan kerangka kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) internal serta peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) eksternal (Start & Hovland, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Inovasi Daerah

Inovasi daerah pada dasarnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Usulan inovasi daerah tidak hanya dibatasi dari Pemerintah Daerah, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan usulan inovasi daerah.

Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, didefinisikan sebagai semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terdapat 3 (tiga) bentuk inovasi daerah, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi

pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
2. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik;
3. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

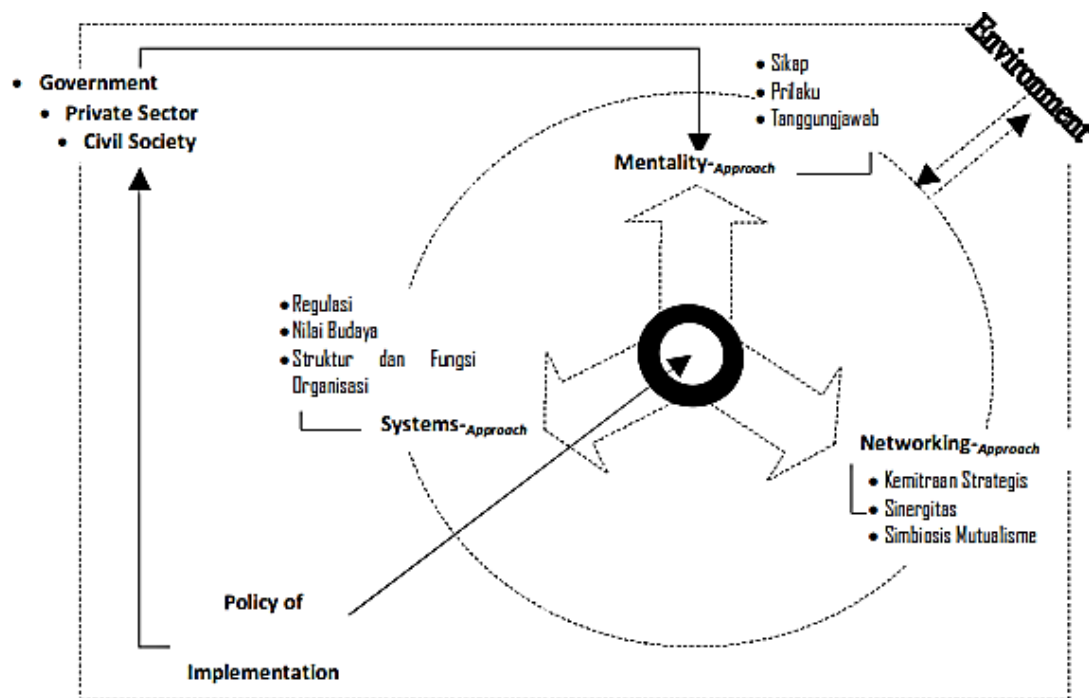
Berikut kriteria inovasi daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah:

1. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
3. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. dapat direplikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 mengatur tahapan suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi inovasi daerah, yang meliputi tahapan pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan inovasi daerah. Selanjutnya, Pemerintah Daerah melaporkan penerapan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas inovasi daerah yang diterapkan.

Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), berupaya menumbuhkembangkan dan menyebarkan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinu. Upaya tersebut dilakukan dengan memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. BSKDN Kemendagri melakukan penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan untuk mendapatkan gambaran praktik penyelenggaraan inovasi oleh pemerintah daerah (Kemendagri, 2023). Penilaian inovasi daerah menggunakan instrumen Indeks Inovasi Daerah (IID). Pemerintah daerah terinovatif selanjutnya akan mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri pada ajang *Innovative Government Award (IGA)*.

Implementasi inovasi daerah sebagai kebijakan publik memerlukan sinergi peran antar aktor atau stakeholder inovasi daerah. Ada tiga sektor utama yang terlibat dalam kebijakan publik, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Kadji, 2015). Pemerintah bertindak sebagai pembuat kebijakan serta pelaksana kebijakan. Sektor swasta memiliki kepentingan terhadap kebijakan karena perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial melalui penciptaan serta penyediaan lapangan kerja. Sedangkan masyarakat sipil, yang terdiri dari perguruan tinggi, media, dan LSM, berperan sebagai objek dan subjek kebijakan. Sinergi antar aktor tersebut dapat terwujud melalui pendekatan MSN-Approach (Mentality, Systems, and Networking) (Kadji, 2015). Gambar 2 mengilustrasikan Model MSN-Approach dalam Implementasi Kebijakan.



Gambar 2 Model MSN-Approach dalam Implementasi Kebijakan

Sumber: Kadji, 2015

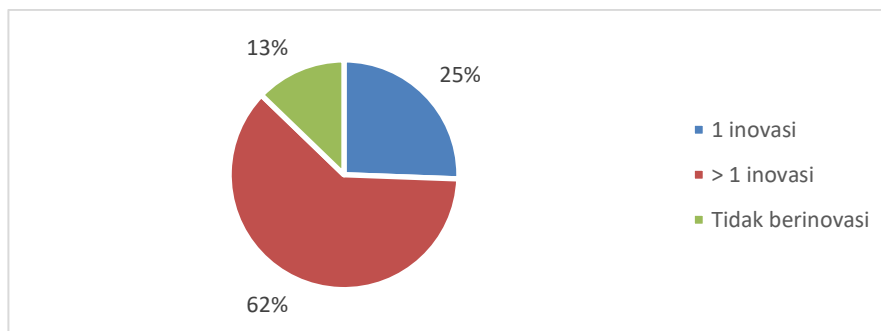
B. Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar

Dalam melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan pendampingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah dalam mendorong terciptanya inovasi, baik itu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya. Kegiatan pendampingan dimaksud dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Kegiatan pendampingan ini merupakan salah satu upaya dalam menumbuhkan ekosistem inovasi daerah.

Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya menumbuhkan ekosistem inovasi daerah. Melalui berbagai kebijakan dan kegiatan, diharapkan seluruh Perangkat Daerah/unit kerja maupun ASN dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berikut Langkah-langkah Upaya nyata yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka menumbuhkan ekosistem inovasi daerah antara lain melalui Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Blitar:

Melalui Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya memberikan kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Blitar. Peraturan Bupati ini sebagai aturan turunan di tingkat lokal yang mengatur tentang penerapan inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Sebagai bentuk turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar merilis Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang inovasi Daerah Kabupaten Blitar. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi ekpastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan. Penerapan inovasi daerah di Kabupaten Blitar bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggraan pemerintahan daerah melalui Peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan Peningkatan daya saing daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Blitar berdasarkan prinsip pPeningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualits pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Selain itu, sebagaimana diamanatkan Pasal 14 Ayat (1), Bupati Blitar mengharuskan setiap Perangkat Daerah untuk melaksanakan minimal 1 (satu) inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada setiap tahun anggaran, atau dikenal dengan *One Agency One Innovation* (Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi). Kebijakan ini merupakan Langkah nyata Bupati Blitar dalam menumbuhkembangkan budaya inovasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyampaikan 1 (satu) atau lebih Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah. Penyampaian usulan inovasi daerah dari Perangkat Daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.



Gambar 3 Perbandingan Jumlah Perangkat Daerah Berinovasi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar, 2023

Melalui penerapan Gerakan *One Agency One Innovation*, hampir seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah menerapkan setidaknya 1 (satu) inovasi. Data dari Bappedalitbang Kabupaten Blitar (2023) menyebutkan bahwa sebesar 97,03% dari sejumlah 86 unit kerja di Kabupaten Blitar telah memiliki setidaknya 1 (satu) inovasi daerah. Namun demikian, masih terdapat sebanyak 11 perangkat daerah/unit kerja yang belum berinovasi atau belum dapat melaporkan inovasi daerahnya. Dari sebanyak 11 Perangkat Daerah yang belum dapat melaporkan inovasi daerah, 8 diantaranya adalah kecamatan. Kecamatan banyak mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan *One Agency One Innovation*. Sebagian besar kecamatan merasa bingung harus berinovasi apa, karena dengan cara kerja seperti biasanya (Business as Usual) sudah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pemahaman tentang inovasi daerah masih rendah dan budaya inovasi masih belum terbentuk sehingga ketika diharuskan melaksanakan inovasi, Perangkat Daerah merasa kesulitan. Namun ada juga Perangkat Daerah yang sudah memiliki inovasi yang bermanfaat, namun tidak berlanjut penerapannya karena ada pergantian Kepala Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Blitar secara rutin melaporkan penerapan inovasi daerah kepada Kementerian Dalam Negeri. Sesuai dengan Pasal 20 sampai dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, terkait dengan laporan penerapan hasil inovasi, Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaporkan penerapan hasil inovasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui website Indeks Inovasi Daerah (<https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>), yang akan digunakan untuk pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan sebagai materi penilaian untuk pemberian penghargaan maupun insentif kepada daerah. Berikut rekam jejak Kabupaten Blitar dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 1 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Blitar Tahun 2018 s.d. 2023

Tahun	Skor IID	Kategori	Keterangan
2018	510	Inovatif	Peringkat 57 dari 205 kabupaten
2019	10.530	Sangat Inovatif	Peringkat 32 dari 514 kabupaten/kota
2020	3.922	Sangat Inovatif	Peringkat 32 dari 415 kabupaten
2021	56,58	Inovatif	Peringkat 39 dari 415 kabupaten
2022	55,51	Inovatif	Peringkat 77 dari 415 kabupaten
2023	61,42	Sangat Inovatif	Peringkat 32 dari 415 kabupaten

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan dalam capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blitar. Prestasi Kabupaten Blitar cukup membanggakan pada tahun 2019 dan 2020, yaitu dengan memperoleh predikat Kabupaten Sangat Inovatif dengan posisi peringkat 32 secara nasional. Namun demikian, penurunan

capaian mulai terjadi pada tahun 2021, dan bahkan semakin terpuruk pada tahun 2022. Meskipun masih dalam predikat Kabupaten Inovatif, namun secara peringkat turun drastis dari tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini mengindikasikan bahwa terdapat sesuatu yang harus diperbaiki dalam implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Perlu dilakukan langkah evaluatif dan strategis dalam mengoptimalkan implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar.

Dalam mengkaji implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar, Model Implementasi Kebijakan melalui *MSN-Approach (Mentality, Systems, Networking)* menjadi kerangka yang relevan. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga pilar utama: mentalitas pelaksana kebijakan, sistem yang mendukung, serta jejaring kerja sama antar aktor yang terlibat (Kadji, 2015).

1. *Mentality-Approach* (Pendekatan Mentalitas)

Pendekatan mentalitas melihat implementasi kebijakan dari sejauh mana produk kebijakan dapat menyentuh dan merubah perilaku dari pihak aparatur (pembuat dan implementor kebijakan), pihak praktisi bisnis, dan juga masyarakat (Kadji, 2015). Di Kabupaten Blitar, inovasi daerah didorong melalui regulasi seperti Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah. Namun, masih terdapat perangkat daerah yang enggan berinovasi karena menganggapnya sebagai pekerjaan tambahan atau beban kerja. Hal ini mencerminkan tantangan mentalitas yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan dukungan pimpinan dan apresiasi terhadap staf yang memiliki inisiatif untuk berinovasi.

Sejak tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Blitar telah turut berpartisipasi dalam pelaporan dan penilaian inovasi daerah. Meskipun belum semua Perangkat Daerah menerapkan inovasi, namun terlihat budaya inovasi sudah mulai terbentuk. Tidak hanya dari sisi aparatur, sektor swasta dan masyarakat juga beradaptasi dengan munculnya inovasi daerah, yang semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah daerah.

2. *Systems-Approach* (Pendekatan Sistem)

Dalam setiap implementasi kebijakan tidak luput dari pengaruh langsung dan tidak langsung dari sebuah sistem yang melingkupi kebijakan itu sendiri (Kadji, 2015). *Systems Approach* menyoroti pentingnya sistem pendukung, seperti regulasi dan mekanisme operasional, dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun sistem regulasi untuk mendukung pelaksanaan inovasi daerah. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah menjadi landasan hukum di tingkat lokal. Regulasi ini tidak hanya mengatur tata cara dan tahapan inovasi daerah, tetapi juga membuka kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, juga mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan produktivitas kinerja. Lebih lanjut, kebijakan *One Agency One Innovation* yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah mewajibkan setiap perangkat daerah untuk melaksanakan inovasi. Namun, kurangnya sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) untuk inovasi membuat beberapa perangkat daerah kurang termotivasi. Sistem ini perlu diperbaiki agar inovasi daerah tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah daerah.

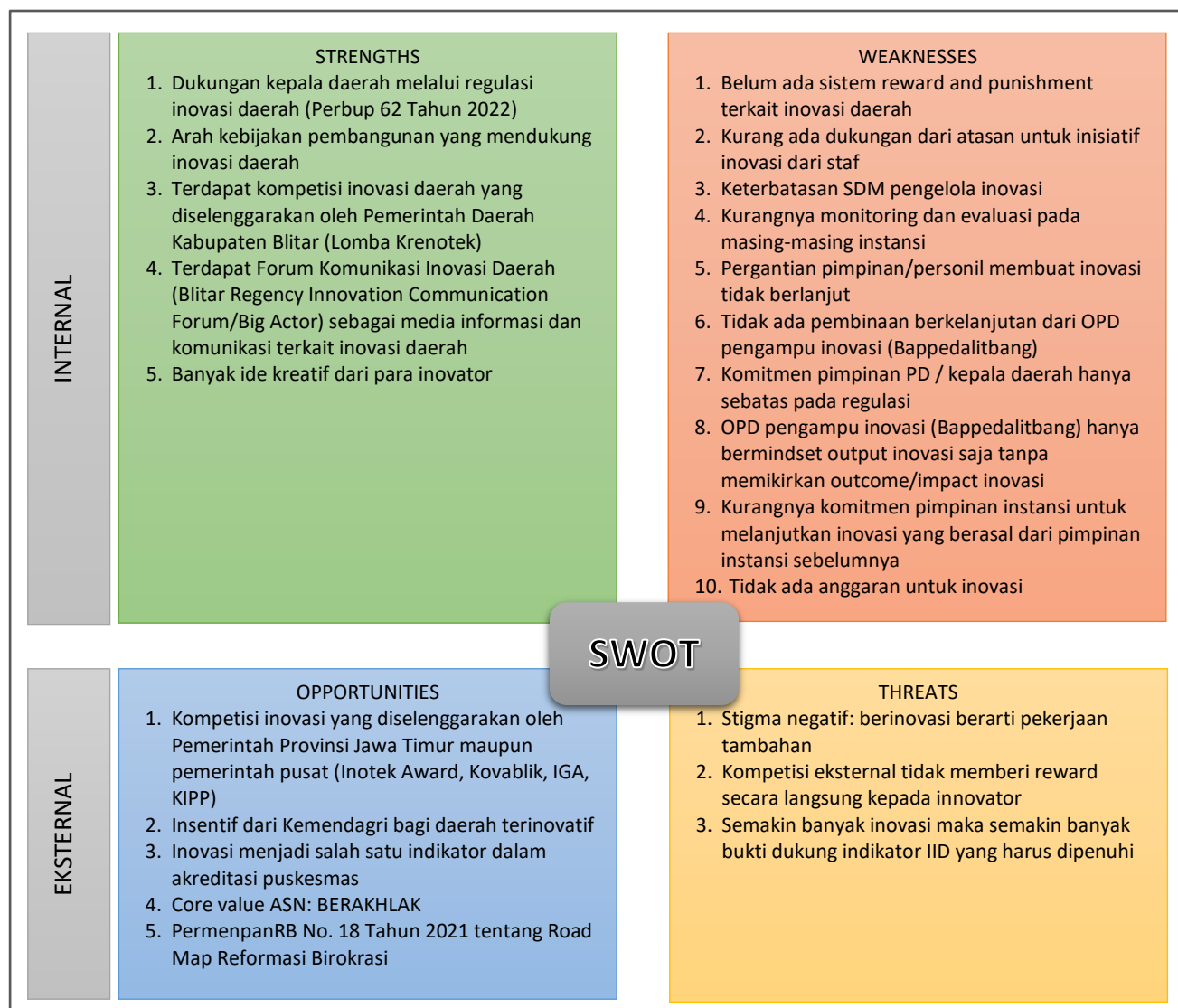
3. *Networking-Approach* (Pendekatan Jejaring Kerjasama)

Sinergitas dan Kerjasama dalam prinsip simbiosis mutualisme antara pihak *government, private sector, dan civil society* mutlak diwujudkan dalam kerangka membangun untuk kepentingan publik (Kadji, 2015). Jejaring kerjasama dan kolaborasi dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Blitar sudah mulai terjalin melalui forum inovasi daerah dan kerja sama dengan perguruan tinggi. Banyak inovasi daerah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan secara kolaboratif antar Perangkat Daerah. Tidak hanya itu, beberapa inovasi bahkan sudah melibatkan pihak di luar pemerintah daerah, baik perguruan tinggi, swasta, masyarakat, maupun media. Namun demikian, masih diperlukan penguatan jejaring untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam proses inovasi, khususnya sektor swasta dan komunitas masyarakat. Keterlibatan aktor non-pemerintah dapat memperkaya ide inovasi dan mempercepat implementasinya.

C. Strategi Implementasi Inovasi Daerah

Sebagai upaya evaluatif atas implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar, dalam penelitian ini dilakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) internal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blitar dalam implementasi inovasi daerah, serta peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) eksternal yang mempengaruhi implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar. Dari hasil identifikasi faktor-faktor tersebut, selanjutnya ditampilkan pada matrik analisis

SWOT, untuk selanjutnya disusun rekomendasi strategi dalam mengoptimalkan implementasi inovasi daerah. Dalam rangka mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar, dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) secara daring pada Jum'at, 16 Juni 2023. Peserta FGD sebanyak 6 (enam) orang yang merupakan pejabat atau staf yang menangani inovasi daerah instansinya, dalam hal ini anggota Forum Komunikasi Inovasi Daerah. Perangkat Daerah yang terlibat yaitu RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Puskesmas Wonodadi sebagai perwakilan OPD berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPEPDALITBANG) sebagai perwakilan OPD berbentuk dinas dan badan, serta Kecamatan Wonodadi dan Kecamatan Wates sebagai perwakilan OPD berbentuk kecamatan.



Gambar 4 Matrik SWOT: Hasil Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman terhadap Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Dari hasil pemetaan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar selanjutnya dihitung bobot dan ratingnya untuk melihat posisi implementasi inovasi daerah Kabupaten Blitar. Berdasarkan perhitungan dari pembobotan dan rating, diperoleh posisi implementasi inovasi daerah Kabupaten Blitar yaitu pada kuadran IV, sehingga strategi yang sebaiknya diterapkan dalam implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar adalah *Turn Around Strategy*, yaitu strategi untuk melakukan pembenahan/ perbaikan terhadap kondisi yang ada sekarang.

Strategi implementasi inovasi daerah Kabupaten Blitar yang sesuai dengan kondisi saat ini yang paling tepat yaitu dengan cara mengatasi atau mengurangi kelemahan untuk meraih peluang yang ada. Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain:

1. Menambahkan poin terkait reward and punishment pada regulasi inovasi daerah yang telah ada.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 belum diatur terkait *reward* bagi Perangkat Daerah atau ASN yang berinovasi, maupun *punishment* bagi Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Kebijakan *One Agency One Innovation*. Hal ini menyebabkan Kebijakan *One Agency One Innovation* dipandang sebelah mata. Ketiadaan kebijakan maupun ketidakmampuan birokrasi, dan administrasi dalam merespons inovasi menjadi beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan inovasi (Manar & Alfirdaus, 2023). Aspek kebijakan dan insentif seharusnya menjadi perhatian bagi pemangku keijakan dalam penerapan inovasi daerah (Manar & Alfirdaus, 2023). *Reward* atas inovasi dapat berupa insentif/tambahan anggaran bagi Perangkat Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dan berdampak pada perbaikan kinerja dan/atau penyelenggaraan pemerintahan, atau dapat berupa apresiasi dari Pimpinan untuk ASN yang berinovasi. Regulasi yang mengatur reward and punishment akan menumbuhkan budaya inovasi dan menjadi motivasi bagi Perangkat Daerah dan/atau ASN untuk berinovasi.

2. Penguatan komitmen Pimpinan, baik Kepala Daerah maupun Kepala Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan inovasi daerah.

Sering kali terjadi inisiatif inovasi dari staf tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan dari atasan, inovasi tidak berlanjut penerapannya karena terjadi pergantian pimpinan organisasi, dan bahkan masih ada perangkat Daerah yang belum menerapkan inovasi daerah. Praktik baik dari beberapa daerah lain yang telah berhasil dalam penerapan inovasi daerah membuktikan bahwa komitmen Pimpinan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi inovasi daerah (Mahpudin, 2022)(Wiriyanto, 2020). Komitmen pimpinan dapat diwujudkan dalam dukungan Pimpinan dalam penerapan inovasi, dukungan dalam pengalokasian anggaran, maupun komitmen untuk keberlanjutan inovasi.

3. Kolaborasi dalam pelaksanaan inovasi daerah.

Tidak sedikit dijumpai di lapangan bahwa kendala pelaksanaan inovasi daerah adalah karena keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah maupun kapasitas SDM pelaksana inovasi. Kolaborasi menjadi kunci penting dalam menyelesaikan permasalahan keterbatasan SDM. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti bisnis, universitas, dan organisasi nirlaba dapat memberikan akses ke keahlian, sumber daya, dan sudut pandang baru, yang dapat memicu inovasi (Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar & Universitas Brawijaya, 2023).

KESIMPULAN

1. Dalam konteks *MSN-Approach*, implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal mentalitas pelaksana dan penguatan sistem penghargaan. Meskipun jejaring kerja sudah mulai terbentuk, diperlukan peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat realisasi inovasi. Dengan memperbaiki ketiga pilar ini, inovasi di Kabupaten Blitar dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap implementasi inovasi daerah di Kabupaten Blitar, dapat disimpulkan bahwa posisi saat ini berada di kuadran IV, yang menunjukkan perlunya perbaikan dan pembenahan dalam strategi implementasi. Strategi yang paling tepat untuk diterapkan adalah *Turn Around Strategy*, yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Terdapat beberapa langkah kunci yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas inovasi daerah. Pertama, penting untuk menambahkan regulasi mengenai *reward* dan *punishment* untuk mendorong perangkat daerah dan ASN agar berinovasi secara aktif, mengingat saat ini belum ada pengaturan yang jelas terkait insentif bagi mereka yang berhasil menerapkan inovasi. Kedua, penguatan komitmen dari pimpinan, baik kepala daerah maupun kepala perangkat daerah, sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan dan dukungan terhadap inisiatif inovasi. Tanpa dukungan yang kuat dari pimpinan, banyak inisiatif inovasi dari staf cenderung tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Terakhir, kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti sektor bisnis, universitas, dan organisasi nirlaba menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam jumlah maupun kapasitas. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat terjalin sinergi yang menghasilkan ide-ide baru dan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong inovasi daerah secara lebih efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Kabupaten Blitar diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan inovasi daerah dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

REFERENSI

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. (2021). Peta Pembinaan Inovasi Daerah. Bina Praja Press.
2. Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, IV, 44–55.
3. Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. UNG Press Gorontalo.
4. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. (2023). Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award & Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah. BSKDN Kemendagri.
5. Mahpudin, M. (2022). Inovasi pelayanan publik: Pengalaman dari Kota Cilegon, Indonesia. *Matra Pembaruan*, 6(2), 107–117. <https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.107-117>
6. Manar, D. G., & Alfirdaus, L. K. (2023). Analisis Kegagalan Inovasi Pemerintah Daerah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 18–30. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.18-30>
7. Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 18(1), 159–166. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379>
8. Ra'is, D. U., & Rohman, A. (2020). Inovasi Daerah Sebagai Sumber Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Percepatan Pemulihan Ekonomi. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 67–72.
9. Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2021). Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2874>
10. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. (2023). Policy Paper Pengembangan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Blitar. Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Blitar.
11. Suhendra, A. (2021). Inovasi Daerah Dalam Reformasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang. *Matra Pembaruan*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.39-48>
12. Wiryanto, B. (2020). Kepemimpinan Inovatif Kepala Daerah untuk Sektor Publik di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Bupati Abdullah Azwar Anas). Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102503>